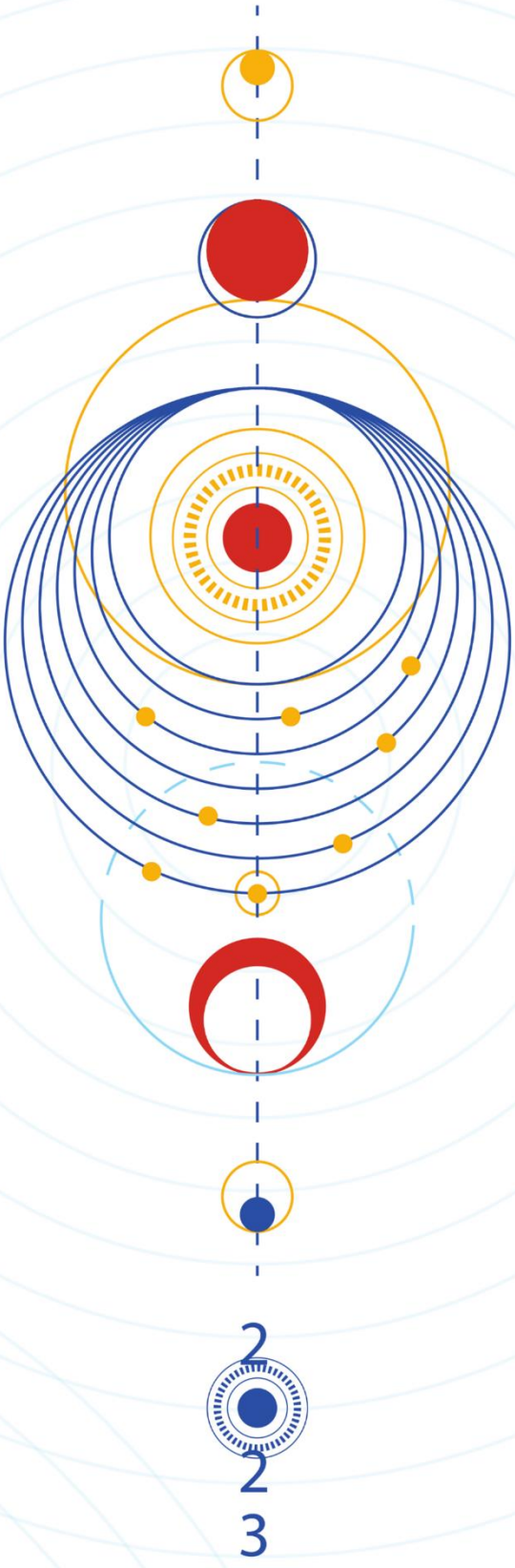

Menyongsong Hari Esok
Dengan Optimisme dan Integritas

Laporan Kinerja

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kemenkeu
Corporate University

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga sepanjang periode Triwulan III Tahun 2023 ini kami dapat melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dengan baik. Dan terus melanjutkan transformasi pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dengan terus berupaya mewujudkan Kementerian Keuangan menjadi *Learning Organization* dengan didukung oleh manajemen pengetahuan yang maju.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja BPPK untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan selama periode Tahun 2023. Laporan Kinerja ini memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang dapat diukur dengan indikator-indikator kinerja dan juga realisasi anggaran BPPK selama Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini sepatutnya tidak hanya untuk memenuhi kewajiban formal tetapi juga harus dapat memberikan gambaran mengenai progres yang sudah dicapai oleh BPPK dalam merespons perubahan.

Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan. Kami percaya bahwa dengan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan, BPPK akan mampu memberikan manfaat besar kepada Kementerian Keuangan khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Andin Hadiyanto

Ringkasan Eksekutif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengukur pencapaian dan kualitas kinerja tahun 2023 BPPK telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2023 dari 26 IKU yang dimiliki BPPK seluruhnya memenuhi target yang ditetapkan. Perincian 26 IKU tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tingkat implementasi learning organization (realisasi sebesar 92,22% dari target sebesar 90%).
2. Indeks integritas organisasi (realisasi sebesar 108,98 dari target 95,55).
3. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya (realisasi sebesar 91,49% dari target 85%)
4. Indeks pembangunan karakter (realisasi sebesar 4,5 dari target 4).
5. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya (realisasi sebesar 94,48% dari target 87%).
6. Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan (realisasi sebesar 116,49% dari target 100,00%).
7. Nilai evaluasi reformasi birokrasi (realisasi sebesar 88,62% dari target 86%).
8. Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara (realisasi sebesar 116,50% dari target 100%).
9. Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu (realisasi sebesar 4 dari target 3).
10. Tingkat implementasi pembelajaran yang inklusif dan kreatif (realisasi sebesar 4,76 dari target 4,00).
11. Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran (realisasi sebesar 5 dari target 4).
12. Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi (realisasi sebesar 89,13% dari target78%).
13. Persentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC (realisasi sebesar 113,64% dari target 100%).
14. Indeks kualitas penelitian (realisasi sebesar 233,8 dari target 181)

15. Persentase kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan standar mutu pendidikan tinggi (realisasi sebesar 98,58% dari target 96,40%).
16. Tingkat efektivitas beasiswa Kemenkeu (realisasi sebesar 96,49 dari target 85)
17. Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung (realisasi sebesar 120% dari target 100%).
18. Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being* (realisasi sebesar 118,21 dari target 100%).
19. Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu (realisasi sebesar 100% dari target 100%).
20. Persentase penyelesaian Program IS RBTK (realisasi sebesar 99,58% dari target 92%).
21. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan (realisasi sebesar 120 dari target 100).
22. Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu (realisasi sebesar 108,67% dari target 100%).
23. Tingkat penggunaan aset bersama (realisasi sebesar 120% dari target 45%).
24. Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015 (realisasi sebesar 114,66 dari target 100).
25. Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK (realisasi sebesar 114,35% dari target 100%).
26. Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (realisasi sebesar 90,34 dari target 82).

Capaian kinerja dari keseluruhan IKU tersebut menyumbang Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPK sebesar 112,00. NKO tersebut menurun jika dibandingkan dengan NKO BPPK tahun 2022 yaitu 113,20. Penurunan NKO ini disebabkan karena terdapat IKU lama yang targetnya meningkat signifikan, sehingga walaupun secara realisasi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tetapi capaiannya menjadi tidak terlalu tinggi. Selain itu, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kemenkeu, terdapat perubahan bobot perhitungan NKO (perspektif *stakeholder* dan *customer* memiliki bobot lebih tinggi dari sebelumnya).

Untuk mewujudkan strategi dan pencapaian kinerja periode tahun 2023, BPPK memiliki total pagu anggaran sebesar Rp436.749.612.000,00. Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan dari awal tahun sampai akhir periode tahun 2023 adalah sebesar Rp421.089.198.491,00 (96,41% dari total pagu anggaran). Rincian realisasi anggaran menurut Kegiatan sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan Legislasi dan Litigasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp3.960.000,00 dan tidak memiliki realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2023.
2. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum memiliki pagu anggaran sebesar Rp163.810.393.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp155.903.958.429,00 atau tercapai sebesar 95,17%.
3. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.524.925.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp1.427.551.302,00 atau tercapai sebesar 93,61%.
4. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM memiliki pagu anggaran sebesar Rp270.898.248.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp263.288.165.072,00 atau tercapai sebesar 97,19%.
5. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal memiliki pagu anggaran sebesar Rp170.367.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp139.891.561,00 atau tercapai sebesar 82,11%.
6. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi memiliki pagu anggaran sebesar Rp341.719.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp329.632.127,00 atau tercapai sebesar 96,46%.

Daftar Isi

I Pendahuluan

A.	Latar Belakang	3
B.	Tugas dan Fungsi	4
C.	Peran Strategis	4
D.	Struktur Organisasi	5
E.	Sistematika Laporan	7
F.	Sumber Daya Manusia	7

II Perencanaan Kinerja

A.	Rencana Strategis	11
B.	Rencana Kerja	18
C.	Rencana Kerja dan Anggaran	21
D.	PenetapanPerjanjian Kinerja	26

III **Akuntabilitas Kinerja**

A.	Capaian Renstra	45
B.	Capaian Kinerja Organisasi	47
C.	Realisasi Anggaran	166
D.	Realisasi Output	170
E.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	177
F.	Kinerja Lain-Lain	181
G.	Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP 2022	203

IV **Penutup**

A.	Penutup	209

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 : Matriks Kinerja BPPK Tahun 2020 – 2024 15
Tabel 2. 2 : Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2023 18
Tabel 2. 3 : Sasaran Kegiatan dan IKK Tahun 2023 19
Tabel 2. 4 : Pagu Anggaran BPPK Periode Tahun 2023 22
Tabel 2. 5 : Perincian Perubahan Anggaran Menurut Jenis Belanja Tahun 2023 26
Tabel 2. 6 : Perbandingan SS dan IKU Stakeholder Perspective Tahun 2022 & 2023 28
Tabel 2. 7 : Perbandingan SS dan IKU Customer Perspective Tahun 2022 & 2023 28
Tabel 2. 8 : Perbandingan SS dan IKU Internal Process Perspective 2022 & 2023 29
Tabel 2. 9 : Perbandingan SS dan IKU Learning & Growth Perspective Tahun 2022 & 2023 31
Tabel 2. 10 : Daftar IKU Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2023 32
Tabel 2. 11 : Daftar Risiko Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2023 sebelum Adendum 34
Tabel 2. 12 : Daftar Risiko Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2023 setelah Adendum 37
Tabel 2. 13 : Perbandingan Inisiatif Strategis BPPK 40
Tabel 3. 1 : Capaian Renstra BPPK Tahun 2021 - 2023 45
Tabel 3. 2 : Capaian Kinerja tiap Perspektif 47
Tabel 3. 3 : Target, Realisasi dan Capaian IKU BPPK Tahun 2023 48
Tabel 3. 4 : SS SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter 51
Tabel 3. 5 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi LO 57
Tabel 3. 6 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Integritas Organisasi 64
Tabel 3. 7 : Rincian Realisasi IKU Semester I 67
Tabel 3. 8 : Rincian Realisasi IKU Semester II 68
Tabel 3. 9 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya 71
Tabel 3. 10 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Pembangunan Karakter 75
Tabel 3. 11 : SS Program Pengembangan SDM yang Relevant, Applicable, Impactful, Accessible 75
Tabel 3. 12 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya 83
Tabel 3. 13 : SS Dukungan Manajemen yang Efektif 85
Tabel 3. 14 : SS Pembelajaran yang Inklusif, Kreatif, dan Berdampak 101

Tabel 3. 15 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran 108

Tabel 3. 16 : Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi yang Kredibel 109

Tabel 3. 17 : SS Manajemen Pengetahuan yang Reliabel dan Berdayaguna 117

Tabel 3. 18 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan *Knowledge* pada *Platform* KLC 120

Tabel 3. 19 : SS Pendidikan yang fit for purposes 121

Tabel 3. 20 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Penelitian 125

Tabel 3. 21 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan standar mutu pendidikan tinggi 126

Tabel 3. 22 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan 128

Tabel 3. 23 : SS Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif 129

Tabel 3. 24: Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Well Being 139

Tabel 3. 25 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTK 146

Tabel 3. 26 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 149

Tabel 3. 27 : SS Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal 154

Tabel 3. 28 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Penggunaan Aset Bersama 156

Tabel 3. 29 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015 160

Tabel 3. 30 : SS Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif 160

Tabel 3. 31 : Perbandingan Target dan Realisasi sub-IKU Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK 162

Tabel 3. 32 : SS Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif 163

Tabel 3. 33 : Realisasi Anggaran BPPK Periode Tahun 2023 Menurut Jenis Belanja 167

Tabel 3. 34 : Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran BPPK 2022 dan 2023 167

Tabel 3. 35 : Realisasi Anggaran BPPK Periode Tahun 2023 Menurut Kegiatan 168

Tabel 3. 36 : Realisasi Output BPPK Periode Tahun 2023 170

Tabel 3. 37 : Perincian Kegiatan Implementasi PUG di BPPK Tahun 2023 184

Tabel 3. 38 : Kegiatan Tim PUG Tahun 2023 diluar Rencana Kerja 186

Tabel 3. 39 : Daftar Benchmarking ke BPPK Tahun 2023 202

Daftar Gambar

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi BPPK 6

Gambar 2.1 : Peta Strategi BPPK Tahun 2023 27

Gambar 3.1 : Tren Nilai Kinerja Organisasi BPPK 47

Gambar 3.2 : Ambassador Kolaborasi Digital Terbaik (individu) 191

Gambar 3.3 : Penghargaan PPID Tingkat I Kemenkeu Kategori Informatif Tahun 2023192

Gambar 3.4 : Top Digital Implementation 2023 & Top Leader on Digital Implementation 2023 193

Gambar 3.5 : Best Corporate University – Business Impact, GlobalCCU Awards 2023 193

Gambar 3.6 : WCO Certificate of Merit 194

Gambar 3.7 : Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat Terbaik III Kategori Adaptive Learning Strategy 194

Gambar 3.8 : Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 196

Gambar 3.9 : Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 196

A. Latar Belakang
B. Tugas dan Fungsi
C. Peran Strategis
D. Struktur Organisasi
E. Sistematika Laporan
F. Sumber Daya Manusia

Bab I
Pendahuluan

Matahari adalah bintang terbesar yang menjadi pusat dari sistem tata surya dan menjadi poros dari planet-planet yang mengelilinginya. Layaknya matahari, Kemenkeu hadir sebagai pusat pengelolaan dari peredaran uang negara.

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan asas akuntabilitas sebagai salah satu asas umum, penyelenggaraan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perwujudan dari peraturan di atas, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan adanya beberapa ketentuan tersebut, sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* dalam bentuk laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi instansi pemerintah akan dapat diwujudkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Periode Triwulan III Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta BPPK untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang

telah ditetapkan. Laporan Kinerja BPPK Periode Triwulan III Tahun 2023 ini juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPPK pada periode yang akan datang.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BPPK menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut.

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pemanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri Keuangan.

C. Peran Strategis

Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan negara. Peranan tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, akuntabel, dan andal. Pembentukan SDM yang memiliki kualitas tersebut dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang *link and match* dengan tujuan dan kebutuhan organisasi.

Untuk mewujudkan *link and match* antara pengembangan kompetensi SDM dengan tujuan strategi organisasi, Kementerian Keuangan sejak tahun 2016 telah menerapkan strategi *corporate university*. Untuk mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensi SDM baik yang bersifat strategis, jabatan, individual, maupun kebutuhan yang

sifatnya insidental maka Kementerian Keuangan melakukan pendekatan yang sifatnya proaktif dan tidak lagi reaktif melalui mekanisme pemenuhan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP).

BPPK memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan strategi Kementerian Keuangan *Corporate University*, BPPK memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kompetensi SDM dan menyusun kebijakan manajemen pengetahuan (*knowledge management*).

Adapun dalam menjalankan peran tersebut, BPPK dihadapkan pada berbagai tantangan baik yang berasal dari internal atauapun eksternal. Berikut adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi BPPK.

1. Pelatihan
    a. Kemenkeu *Corporate University* belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan oleh setiap lini organisasi Kemenkeu.
    b. Minimnya kontrol atas kesesuaian pengiriman peserta dengan pembelajaran.
    c. Belum terintegrasinya pembelajaran dengan *career path.*
    d. Pelaksanaan pelatihan belum sepenuhnya dikonsolidasikan melalui BPPK. Masih ada Unit Eselon I yang menyelenggarakan pelatihan secara mandiri tanpa koordinasi dengan BPPK.
    e. Belum optimalnya penjaminan mutu pembelajaran.
2. Manajemen Pengetahuan
    a. Manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan belum sinergi dan efektif.
    b. Pemanfaatan pengetahuan belum optimal sebagau solusi penyelesaian pekerjaan.
    c. Budaya belajar dan berbagi pengetahuan masih relatif rendah.

D. Struktur Organisasi

Saat ini BPPK terdiri atas Sekretariat Badan, enam Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) dan Politenik Keuangan Negara STAN. Keenam Pusdiklat tersebut adalah Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Kekayaan Negara dan

Perimbangan Keuangan, dan Pusdiklat Keuangan Umum.

Untuk penyelenggaraan pembelajaran di daerah, BPPK memiliki unit pelaksana teknis yang terdiri atas sebelas Balai Diklat Keuangan (BDK) dan satu Balai Diklat Kepemimpinan. Kesebelas BDK tersebut antara lain BDK Medan, BDK Pekanbaru, BDK Palembang, BDK Cimahi, BDK Yogyakarta, BDK Malang, BDK Denpasar, BDK Pontianak, BDK Balikpapan, BDK Makassar, dan BDK Manado.

Struktur organisasi BPPK adalah sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.1. berikut.

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi BPPK

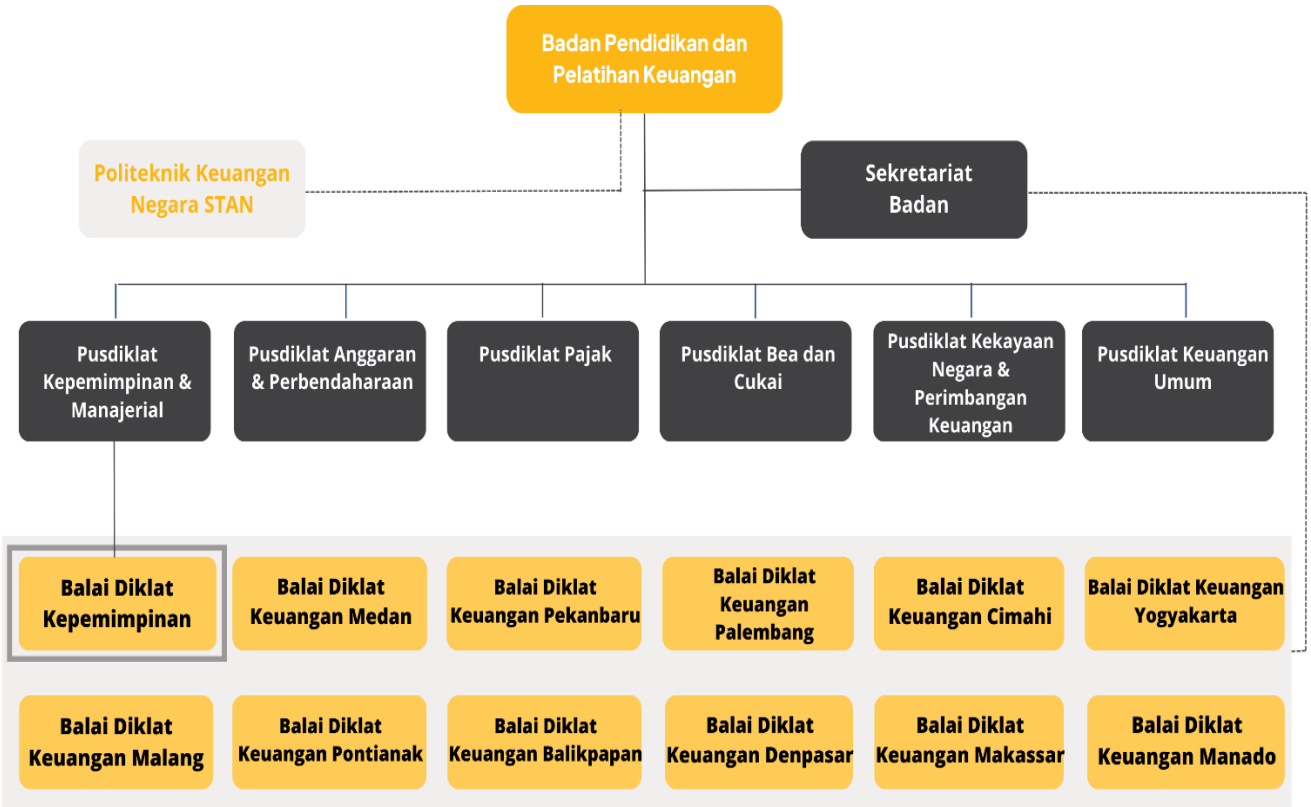

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPPK Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini disajikan latar belakang disusunnya Laporan Kinerja; tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPPK; peran strategis dan permasalahan yang dihadapi BPPK; sistematika penyajian; serta sumber daya manusia.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi rencana strategis BPPK; rencana kerja BPPK tahun 2023; rencana kerja dan anggaran BPPK tahun 2023 dan penetapan perjanjian kinerja dan risiko.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat capaian kinerja BPPK tahun 2023; realisasi anggaran BPPK tahun 2023; realisasi capaian output; kinerja lain-lain; dan tindak lanjut evaluasi AKIP 2022

Bab IV. Penutup

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja BPPK sepanjang tahun 2023.

F. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan didukung oleh 1.258 pegawai Aparatur Sipil Negara dimana 1.180 adalah pegawai aktif, 12 pegawai yang sedang melaksanakan *secondment*, 12 pegawai dengan status CPNS dan 54 pegawai tugas belajar.

Komposisi pegawai di BPPK menurut jenis kelamin adalah 856 pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 402 pegawai berjenis perempuan.

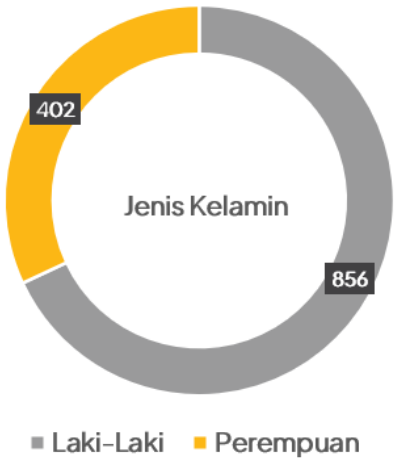

Berdasarkan pendidikan, komposisi pegawai di BPPK adalah sebagai berikut.

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	S-3	34	3
2	S-2	325	116
3	S-1/D-4	308	180
4	D-3	110	79
5	D-1	16	8
6	SMA/SMP/SD	63	16
Total		856	402

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di BPPK adalah sebagai berikut.

Golongan	Laki-Laki	Perempuan
I	-	-
II	97	77
III	591	274
IV	168	51
Jumlah	856	402

Bab II
Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis
B. Rencana Kerja
C. Rencana Kerja dan Anggaran
D. Perjanjian Kinerja & Risiko

Matahari juga berperan sebagai penerang dalam kehidupan. Seperti halnya Kemenkeu yang selalu menerangi dan memberikan harapan positif bagi perekonomian Indonesia.

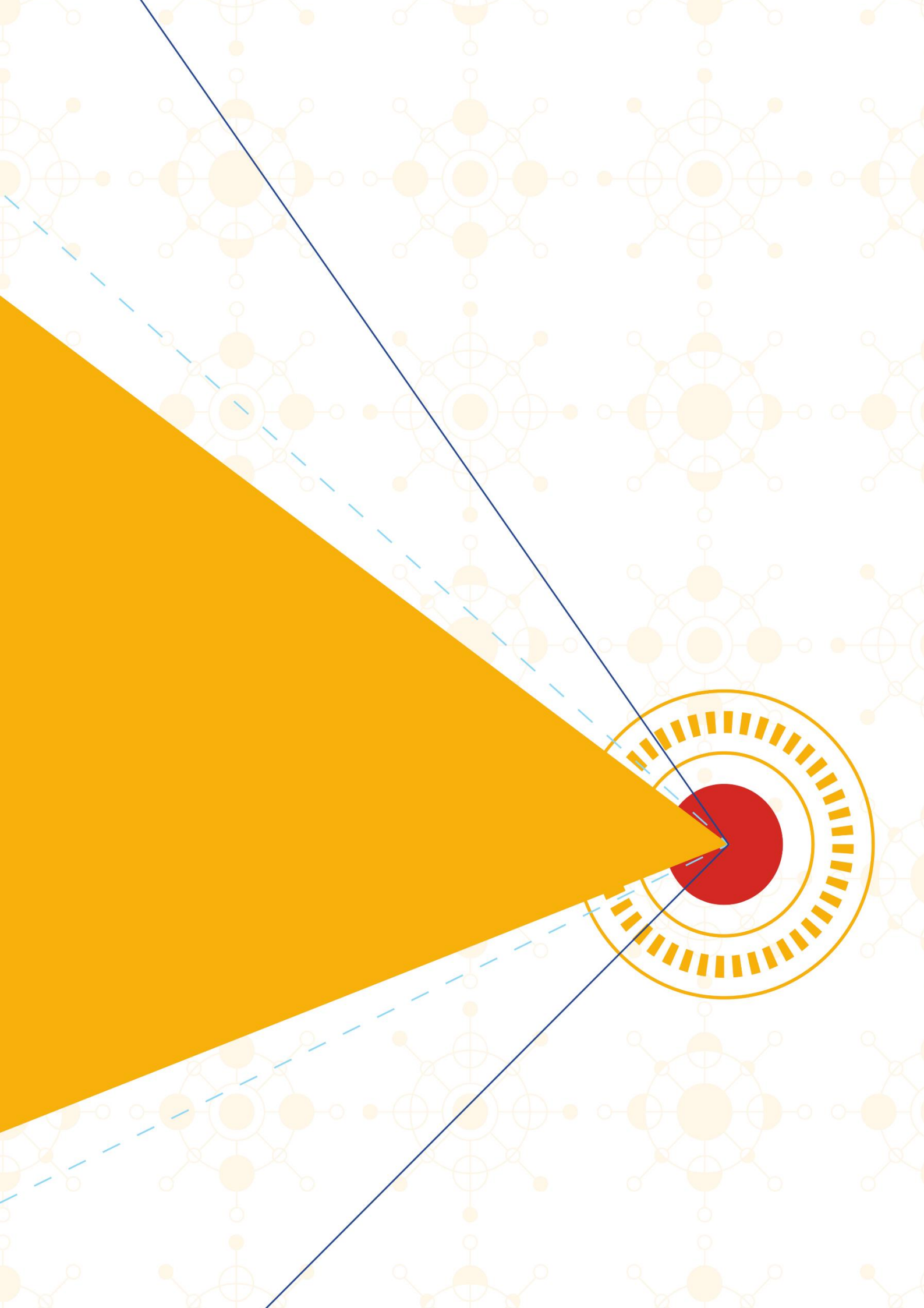

Bab II
Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, setiap organisasi Unit Eselon I, Unit organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, dan Unit Organisasi Eselon II yang berkedudukan di Kantor Pusat di lingkungan Kementerian Keuangan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut, maka disusunlah Renstra BPPK Tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-124/PP/2020 tentang Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2020-2024. Adapun di dalam Renstra tersebut terdapat visi, misi, arah kebijakan, dan strategi serta target kinerja BPPK selama periode 2020-2024.

1. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam KEP-124/PP/2020 tentang Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2020 – 2024, visi BPPK adalah **Menghasilkan SDM pengelola keuangan negara yang Unggul dan Beretika dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".** Dengan visi ini BPPK berkomitmen untuk terus mencetak punggawa keuangan negara yang tidak hanya memiliki kualitas kompetensi dan kinerja tinggi tetapi juga beretika dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan dan juga Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, BPPK juga memperbarui misinya selama periode 2020 – 2024 agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan kebih baik. Dalam mewujudkan visinya tersebut, BPPK mendukung Misi Kementerian Keuangan Nomor 5 "Mengembangkan proses bisnis inti

berbasis digital dan pengeolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi". Adapun misi BPPK adalah sebagai berikut:

a. Mengelola Pendidikan yang berkualitas tinggi dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*
b. Memperkuat pelatihan yang berdampak tinggi bagi SDM keuangan negara dakam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University.*
c. Mengembangkan program sertifikasi kommpetensi keuangan negara yang berkualitas dan *fit for purposes*.
d. Mewujudkan manajemen pengetahuan keuangan negara yang andal dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University.*
e. Mengembangkan sistem tata Kelola berbasis digital dan manajemen sumber daya yang optimal.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, BPPK menetapkan Tujuan BPPK Tahun 2020 – 2024 yang merupakan penjabaran dari Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024 nomor 5, yaitu "Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien".

Sasaran strategis Kementerian Keuangan dalam tujuan tersebut yang didukung oleh BPPK adalah "Organisasi dan SDM yang optimal". Adapun indikator kinerja pada sasaran strategis tersebut adalah:

a. Tingkat implementasi *learning organization*;
b. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya;
c. Persentase lulusan Pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik; dan
d. Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (*Competency Gap Index / CGI*)

3. Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagai Unit Eselon I yang bertugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan, BPPK berupaya mendukung tercapainya Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien dengan menjalankan misi kelima Kementerian Keuangan "Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi". Upaya tersebut diwujudkan melalui tujuh arah

kebijakan dan delapan belas strategi yang akan BPPK implementasikan pada tahun 2020 – 2024.

Arah Kebijakan 1:
Penyelenggaraan Pendidikan tinggi vokasi yang fit for purpose di bidang keuangan negara, termasuk pada penguasaan teknologi informasi.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

a. Penguatan kurikulum Pendidikan terapan sesuai dengan kebutuhan pengguna (*link and match*) dan berbasis nilai (*value based education*).
b. Penguatan peran PKN STAN melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip-prinsip *good university governance*.

Arah kebijakan 2:
Pengelolaan beasiswa Kementerian Keuangan yang optimal.

Strategi untuk mewujudkannya adalah sebagai berikut.

a. Penyelerasan program beasiswa Kementerian Keuangan dengan kebijakan manajemen talenta
b. Pengembangan program beasiswa afirmasi untuk pegawai yang berasal dari Indonesia Timur (Papua).

Arah kebijakan 3:
Penguatan sistem pembelajaran berbasis digital dan pelatihan berdampak tinggi pada peningkatan kinerja keuangan negara.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Penguatan pembelajaran yang mengedepankan karakteristik RAIA (*Relevant, Applicable, Impactful, dan Accessible*) dan bermuatan etika dengan fokus pada tercapainya tujuan strategis Kemenkeu.
b. Optimalisasi penyelenggaraan pembelajaran berbasis digital bagi SDM keuangan negara
c. Optimalisasi pengelolaan pelatihan/pembelajaran bagi SDM keuangan negara pada KLID.
d. Implementasi sistem penjaminan kualitas pembelajaran.

Arah kebijakan 4:
Optimalisasi program sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan adalah sebagai berikut.

a. Harmonisasi kebijakan pembinaan kompetensi dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara.

b. Penguatan sistem penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan.

Arah kebijakan 5:

Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan adalah sebagai berikut.

a. Pembangunan kerangka manajemen pengetahuan yang mendukung budaya berbagi pengetahuan dan pemanfaatan pengetahuan bagi solusi kinerja SDM keuangan negara.
b. Peningkatan fungsionalitas dan sentralisasi sistem manajemen pengetahuan.

Arah kebiijakan 6:

Organisasi dan SDM yang agile dalam rangka penguatan implementasi Kementerian Keuangan *Corporate University*

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan adalah sebagai berikut.

a. Penataan organisasi dan pengembangan proses bisnis berbasis digital dalam rangka penguatan implementasi Kementerian Keuangan *Corpu.*
b. Pengembangan pola kerja dan pola pengembangan kompetensi SDM berbasis fungsi yang aplikatif dan berdampak tinggi.
c. Penguatan kemitraan strategis dengan institusi pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi terbaik.
d. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) yang efektif dan efisien.

Arah kebiijakan 7:

Pemutakhiran sarana prasarana berwawasanlingkungan dan teknologi informasi dalam mendukung pembelajran yang efektif dan efisien

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan adalah sebagai berikut.

a. Pembangunan infrastruktur dan oenguatan implementasi sharing facilities berbasis keunggulan komparatif.
b. Penggunaan teknologi informasi termutakhir dalam mendukung pembelajaran.

4. Matriks Target Kinerja

Dalam memastikan ketercapaian setiap sasaran strategis dan program yang telah dirumuskan, BPPK merumuskan indikator-indikator kinerja beserta targetnya yang merupakan matriks terukur sebagai panduan dan komitmen kinerjanya. Adapun indikator kinerja berikut target kinerja tertuang dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 : Matriks Kinerja BPPK Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					UIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase lulusan Pendidikan dengan predikat minimal baik	90%	93%	93%	93%	93%	PKN STAN
2	Indeks Kualitas Penelitian	90	148	193	238	283	PKN STAN
3	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	-	75%	80%	82%	85%	Pusdiklat KM
4	Tingkat Implementasi *Learning Organization**	75%	77%	80%	82%	85%	Setban, Seluruh Pusdiklat, dan PKN STAN
5	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya**	90%	80%	82%	85%	87%	Seluruh Pusdiklat
6	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	77%	84%	85%	86%	87%	Seluruh Pusdiklat
7	Persentase lulusan Pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	90%	93%	-	-	-	Seluruh Pusdiklat, Balai
8	Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran/CGI	-	-	90%	92%	94%	Seluruh Pusdiklat

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					UIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
9	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	50%	70%	70%	70%	80%	Seluruh Pusdiklat
10	Persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kemenkeu	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	Seluruh Pusdiklat
11	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4	4	5	5	5	Pusdiklat, Balai
12	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	70%	80%	80%	80%	80%	Pusdiklat
13	Tingkat pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC	100%	100%	100%	100%	100%	Pusdiklat
14	Tingkat Kematangan Knowledge Management	-	-	2	2	3	Pusdiklat
				BPPK	Kemenkeu		
15	Persentase jam pelatihan SDM keuangan negara KLID terhadap jam kerja pegawai***	-	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	Seluruh Pusdiklat
16	Persentase pegawai yang telah memenuhi SKJ****	93,67%	94%	94%	94%	94%	Seluruh Pusdiklat dan PKN STAN
17	Persentase kualitas pengelolaan BLU****	80%	80%	80%	80%	80%	PKN STAN
18	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK****	85%	87%	90%	92%	95%	Setban

* Tahun 2020, Tingkat implementasi learning organization BPPK memiliki lingkup UE1 BPPK. Mulai tahun 2021 lingkup tingkat implementasi organization BPPK menjadi level Kemenkeu

** Tahun 2021 akan ada reformulasi, yang menyebabkan target turun.

*** 0,25% persentase jam pelatihan SDM keuangan KLID termasuk ke dalam 4,5% persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kemenkeu

**** mandatory Kemenkeu

5. Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan lima tujuan dan strategi yang ada di renstra Kementerian Keuangan tahun 2020 – 2024, Kementerian Keuangan menetapkan dua belas program pada tahun 2020 menjadi lima program pada tahun 2021 – 2024.

Sebelum Dilakukan Restrukturisasi Program (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 BPPK menetapkan program "Program Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara". Adapun sasaran program (*outcome*)-nya adalah SDM yang Berkinerja Tinggi. Selain itu, ditetapkan sembilan kegiatan di lingkungan BPPK Tahun 2020 sebagai berikut.

a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK;
b. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
c. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepabeanan dan Cukai;
d. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
e. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
f. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Perpajakan;
g. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepemimpinan dan Manajemen serta Pengelolaan Beasiswa Pascasarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan;
h. Pendidikan Tinggi di Bidang Keuangan Negara; dan
i. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keuangan Negara di Daerah.

Setelah Dilakukan Restrukturisasi Program (Tahun 2020)

Sementara itu, untuk tahun 2021–2024 dilakukan restrukturisasi program di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga program yang ditetapkan di BPPK adalah "Program Dukungan Manajemen". Adapun sasaran program berupa organisasi dan SDM yang optimal sedangkan indikator program yang ditetapkan adalah tingkat implementasi learning organization. Kegiatan-kegiatan pada program ini antara lain:

a. Pengelolaan Organisasi dan SDM;
b. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum;
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi;
d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik;
e. Legislasi dan Litigasi; dan
f. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal.

Penyusunan Rencana kerja (Renja) BPPK telah dilakukan pada tahun 2022. Renja memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja diperinci menurut indikator keluaran, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran serta cara pelaksanaannya.

B. Rencana Kerja

Renja kemudian digunakan sebagai panduan kegiatan yang merefleksikan target, voume, dan anggaran yang digunakan serta menjadu target pelaksanaan kerja di tahun berjalan. Adapun fungsi lain dari renja adalah sebagai revisi atas dokumen rencana yang telah dituangkan kedalam Renstar.

Tabel berikut ini adalah perincian sasaran program dan indikator kinerja program beserta alokasi anggaran pada tahun anggaran 2023.

Tabel 2. 2 : Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2023

Kode	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target 2023	Alokasi 2023
01	Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian		405,591,490,000
01.25	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - BPPK	4,35	
01.26	Tingkat Implementasi Learning Organization - BPPK	82	
01.27	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya - BPPK	85	
02	Sistem Teknologi Informasi Keuangan		499,250,000
02.13	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK - BPPK	92	

Kode	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target 2023	Alokasi 2023
03	Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi		154,495,000
03.11	Indeks Integritas - BPPK	91,5	
	Total		406,245,235,000

Sementara itu perincian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan tersaji dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 3 : Sasaran Kegiatan dan IKK Tahun 2023

Kode	Kegiatan / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program	Target 2023	Alokasi 2023
4678	Legislasi dan Litigasi		45,048,000
01	Litigasi yang Optimal		
01.01	Persentase Pelaksanaan Penanganan Perkara	100%	
4679	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		122,813,793,000
01	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel		
01.01	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	
01.02	Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	
4680	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PKN STAN)		37,246,408,000
01	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel		
01.01	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	
01.02	Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	
4681	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		660,939,000

Kode	Kegiatan / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program	Target 2023	Alokasi 2023
01	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan		
01.01	Indeks Ketepatan waktu penyediaan informasi publik	100	
01.02	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	
4682	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan (PKN STAN)		916,809,000
01	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan		
01.01	Indeks Ketepatan waktu penyediaan informasi publik	100	
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM		190,999,608,000
01	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi		
01.01	Persentase alumni pelatihan yang meningkat perilaku kerjanya	86%	
01.02	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	94%	
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN)		52,908,885,000
01	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi		
01.01	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik	93%	
4685	Pengelolaan risiko, pengendalian dan pengawasan internal		66,290,000
01	Pengelolaan risiko, pengendalian dan pengawasan internal yang Efektif		

Kode	Kegiatan / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program	Target 2023	Alokasi 2023
01.01	Indeks Efektivitas UKI	80	
4686	**Pengelolaan risiko, pengendalian dan pengawasan internal (PKN STAN)**		**88,205,000**
01	**Pengelolaan risiko, pengendalian dan pengawasan internal yang Efektif**		
01.01	Persentase rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang ditindaklanjuti	97%	
4687	**Pengelolaan Sistem Informasi dan teknologi**		**499,250,000**
01	**Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal**		
01.01	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	92%	
	Total		**406,245,235,000**

C. Rencana Kerja dan Anggaran 2023

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPPK tahun 2023 disusun berdasarkan RKP, Renja Kementerian Keuangan, renja BPPK, dan alokasi pagu anggaran tahun 2023.

Untuk tahun 2023 dalam RKA BPPK ditetapkan bahwa BPPK menjalankan satu program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp406.245.235.000,00. Program Dukungan Manajemen ini dicapai melalui 10 kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

1. Kegiatan Legislasi dan Litigasi, diukur dengan indikator kinerja, yaitu Persentase pelaksanaan penanganan perkara dengan target 100%. Alokasi kegiatan tersebut sebesar Rp45.048.000,00.
2. Kegiatan Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum, diukur dengan indikator kinerja, yaitu Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dengan target 95% dan Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan dengan target 100%. Alokasi kegiatan tersebut sebesar Rp122.813.793.000,00.
3. Kegiatan Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum (PKN STAN), diukur dengan indikator kinerja, yaitu Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dengan target

95% dan Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan dengan target 100%. Alokasi kegiatan tersebut sebesar Rp37.246.408.000,00.

4. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, diukur dengan indikator kinerja, yaitu Indeks ketepatan waktu penyediaan informasi publik dengan target 100 dan Indeks efektivitas ekosistem kehumasan dengan target 3,55. Alokasi kegiatan tersebut sebesar Rp660.939.000,00.
5. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN), diukur dengan indikator kinerja, yaitu Indeks ketepatan waktu penyediaan informasi publik dengan target 100. Alokasi kegiatan tersebut sebesar Rp916.809.000,00.
6. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM, diukur dengan Persentase alumni pelatihan yang meningkat perilaku kerjanya dengan target 86% dan Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan dengan target 94%. Alokasi kegiatan tersebut sebesar Rp190.153.207.000,00.
7. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN), diukur dengan Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik dengan target 93%. Alokasi kegiatan tersebut sebesar Rp53.755.186.000,00.
8. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal, diukur dengan Indeks Efektivitas UKI dengan target 80. Alokasi kegiatan tersebut sebesar Rp66 .290.000,00.
9. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal (PKN STAN), diukur dengan Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti dengan target 97%. Alokasi kegiatan tersebut sebesar Rp88.205.000,00.
10. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi, diukur dengan Persentase penyelesaian proyek sistem strategis TIK dengan target 92%. Alokasi kegiatan tersebut sebesar Rp499.250.000,00.

Tabel 2. 4 : Pagu Anggaran BPPK Periode Tahun 2023

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
4678	Legislasi dan Litigasi	45.048.000	3.960000
4679	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	122.813.793.000	117.940.223..000
4680	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum (PKN STAN)	37.246.408.000	45.870.170.000

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
4681	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	660.939.000	683.116.000
4682	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN)	916.809.000	841.809.000
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM	190.153.307.000	217.647.938.000
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN)	53.755.186.000	53.250.310.000
4685	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	66.290.000	82.162.000
4686	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal (PKN STAN)	88.205.000	88.205.000
4687	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	499.250.000	341.719.000
	TOTAL	406.245.235.000	436.749.612.000

Dalam perjalanan tahun 2023, pagu anggaran BPPK telah mengalami perubahan dan pergeseran. Sepanjang periode Tahun 2023, BPPK melakukan 312 kali revisi yang terdiri darii 146 kali revisi DIPA dan 166 kali revisi KPA. Berikut ini adalah ringkasan revisi pagu anggaran di BPPK sepanjang tahun 2023.

1. Revisi *automatic adjustment*

Revisi ini dilakukan untuk menindaklanjuti Nota Dinas Menteri Keuangan nomor ND-10/MK.1/2022 tentang Pemenuhan Automatic Adjustment Belanja Kementerian Keuangan TA 2023 dengan target BPPK sebesar Rp5.187.356.000,00. Adapun revisi ini adalah berupa pemblokiran anggaran sebesar target tersebut.

2. Revisi kewenangan DJA (Revisi penambahan anggaran Pelatiha PSIAP)

Revisi ini dilakukan dalam rangka pergeseran anggaran antar satker antar unit; penambahan dan penurunan volume RO; pergeseran anggaran antar-jenis belanja antar satker; perubahan RPD pada Halaman III DIPA; dan perubahan catatan dan pembukaan blokir pada Halaman IV DIPA.

3. Revisi DJA Relaksasi *Automatic Adjustment*

Revisi ini dilakukan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal nomor ND-11/SJ/SJ.1/2023 tanggal 10 Juli 2023 hal Penyampaian Persetujuan Pembukaan *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian Keuangan TA 2023. Alokasi yang disetujui untuk buka blokir pada BPPK adalah sebesar Rp5.187.256.000,00 yang digunakan untuk anggaran renovasi rumah dinas, kebutuhan AKP Insidental dan kebutuhan kegiatan pembentukan karakter mahasiswa PKN STAN. Selain kebutuhan tersebut, telah teridentifikasi pula beberapa kekurangan anggaran Pelatihan Teknis Kesamaptaan dan Pelatihan Orientasi Pengembangan Karakter pada beberapa satker sebagai dampak dari adanya perubahan desain pembelajaran pada pelatihan dimaksud.

4. Revisi DJA Optimalisasi Asean Chairmanship BKF

Revisi ini terkait penambahan pagu BPPK dari optimalisasi anggaran kegiatan Asean Chairmanship dari BKF, untuk memenuhi anggaran *Executive Training* Pimpinan Kementerian Keuangan Tahun 2023. Revisi ini dilakukan berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-971/SJ.1/2023 tanggal 8 September 2023 hal Tindak Lanjut Optimalisasi Anggaran Kegiatan Asean Chairmanship TA 2023. Alokasi yang disetujui untuk dipindahkan ke DIPA BPPK setelah melalui penelitian dan penelaahan usulan revisi adalah sebesar Rp9.756.000.000,00.

5. Revisi Pemindahan Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional

Revisi ini dilakukan untuk mengakomodir perubahan-perubahan berikut.

- Pergeseran anggaran dari Belanja Operasional Sekretariat Badan ke Belanja Non Operasional Pusdiklat KM sebesar Rp9.756.000.000,00 untuk pemenuhan anggaran Executive Training sebagai tindak lanjut Revisi DJA sebelumnya.
- Pemenuhan kekurangan anggaran access point PKN STAN yang bersumber dari DIPA Sekretariat Jenderal c.q. Pusintek sebesar Rp1.566.000.000,00.
- Realokasi anggaran honor piket pelatihan menjadi belanja pegawai (uang lembur) sebesar Rp55.000.000,00 sebagai salah satu tindak lanjut ND Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Nomor ND-471/IJ.7/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Hasil Konfirmasi mengenai KMK terkait SBML dan Satuan Biaya yang berlaku di lingkungan BPPK.

- Penyesuaian anggaran dan jamlator Pelatihan Sistem Informasi Perpajakan (PSIAP) (PU) berdasarkan jumlah peserta dan kurikulum terbaru yang dilaksanakan di Pusdiklat Pajak dan Balai Diklat Keuangan.
- Pemenuhan anggaran Peralatan Fasilitas Perkantoran berupa fasilitas pendukung Mess Sekretariat Badan dan Ruang Menteri, Peningkatan Fasilitas Asrama Pusdiklat AP, BC, dan KU sebesar total Rp953.544.000,00.
- Penambahan anggaran Belanja Operasional Sekretariat Badan dan Pusdiklat BC sebesar total Rp637.000.000.
- Penambahan anggaran untuk kegiatan FGD Tim PMO sebesar Rp81.759.000,00.
- Penambahan anggaran untuk kegiatan HORI di Sekretariat Badan sebesar total Rp51.639.000,00.
- Pemenuhan anggaran Pembelajaran Klasikal di Pusdiklat KNPK sebesar Rp76.000.000,00.
- Penambahan anggaran mutasi pegawai sebesar total Rp864.722.000,00.

6. Revisi Pemenuhan Karyasiswa Beasiswa

Revisi ini memuat substansi sebagai berikut.

- Pemenuhan kebutuhan anggaran Karyasiswa Beasiswa pada Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, satker BPPK (411868) sebesar total Rp5.552.697.000,00.
- Pemenuhan kebutuhan anggaran pelatihan yang sumber pemenuhannya diambil dari Satker BPPK (411868) sebesar total Rp593.727.000,00
- optimalisasi anggaran yang digunakan untuk penambahan belanja modal.

7. Revisi Pemenuhan Pagu Minus Belanja Pegawai Kementerian Keuangan

Revisi ini dilakukan untuk memenuhi pagu minus belanja pegawai Kemenkeu sesuai nota dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1319/SJ.1.2023 tanggal 4 Desember 2023 hal Usulan Revisi Anggaran dalam rangka

Penyelesaian Kekurangan Belanja Pegawai Kementerian Keuangan TA 2023. Dengan adanya revisi ini, pagu belanja pegawai di BPPK dipindahkan sebanyak Rp1.217.511.000,00 ke Sekretariat Jenderal. Adapun ringkasan perubahan pagu anggaran BPPK Periode Tahun 2023 tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 : Perincian Perubahan Anggaran Menurut Jenis Belanja Tahun 2023

	Pagu Awal	Pagu Akhir	Selisih
Pendapatan BLU	9,965,000	9,965,000	0
PNBP Lainnya	1,984,119	1,984,119	0
Jumlah Pendapatan	**11,949,119**	**11,949,119**	**0**
Belanja Pegawai	11,332,860,000	9,876,406,000	-1,456,454,000
Belanja Barang	334,930,321,000	364,361,763,000	29,431,442,000
Belanja Modal	59,982,054,000	62,511,443,000	2,529,389,000
Jumlah Belanja	**406,245,235,000**	**436,749,612,000**	**30,504,377,000**

D. Penetapan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penetapan perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu periode tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

1. Peta Strategi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK) Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, peta strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan Sasaran Strategis (SS) organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta strategi

merupakan media yang dapat memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi organisasi. BPPK telah menetapkan perjanjian kinerja Nomor PK-11/MK/2023 yang berisi sebelas sasaran strategi. Berikut adalah peta strategi BPPK tahun 2023.

Gambar 2. 1 : Peta Strategi BPPK Tahun 2023

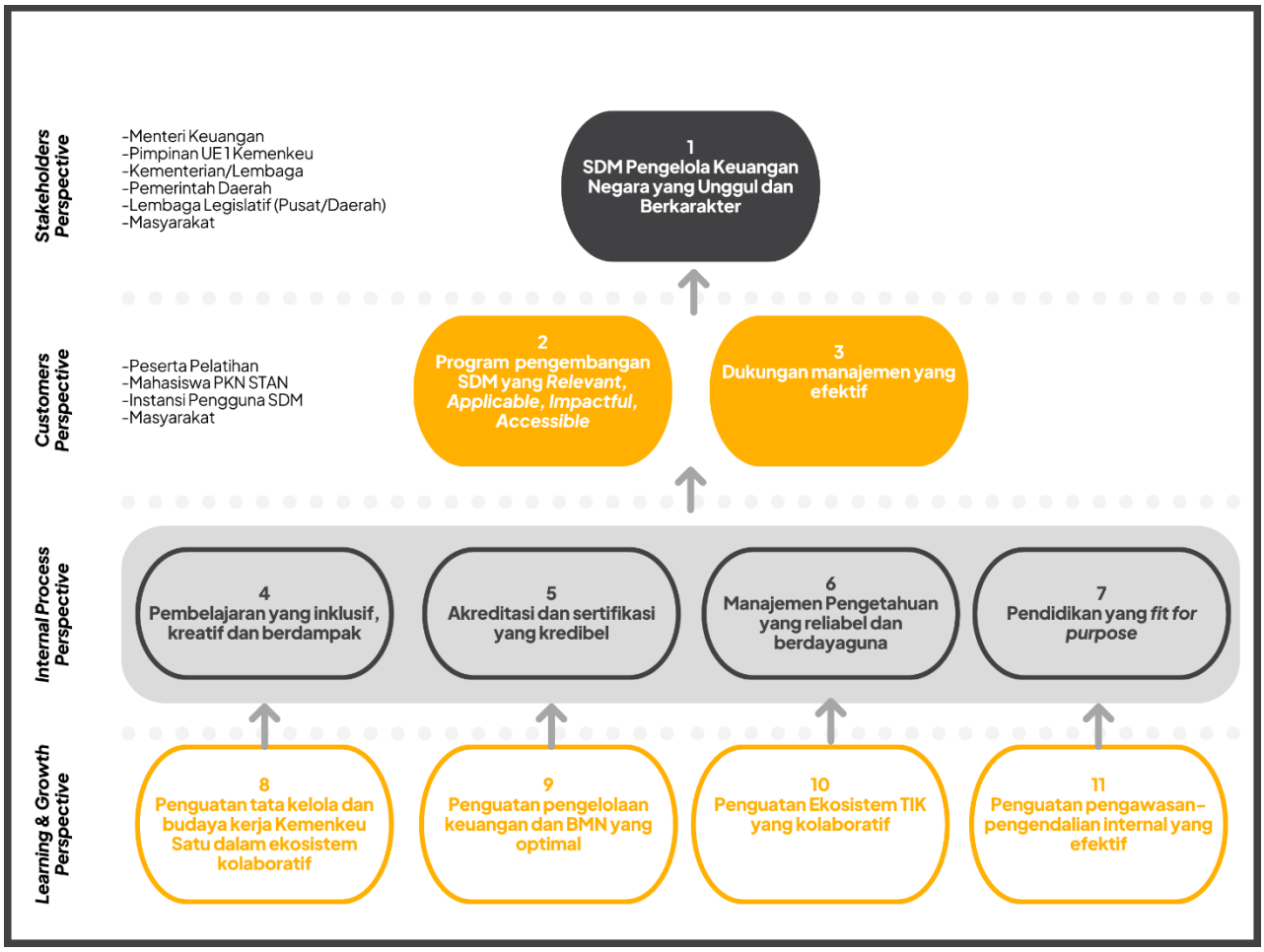

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis atau kinerja organisasi. Dalam dokumen Kontrak Kinerja, ditetapkan IKU untuk masing-masing Sasaran Kegiatan. Adapun jumlah keseluruhan IKU BPPK pada tahun 2023 adalah sebanyak 26 IKU dimana ada penambahan 1 IKU karena adanya adendum perjanjian kinerja. Selain penambahan 1 IKU, terdapat juga pergeseran Sasaran Strategis pada IKU Indeks Integritas Organisasi yang semula berada pada SS *Learning & Growth Perspective* menjadi *Stakeholder Perspective* dan perubahan *trajectory* target IKU Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara, IKU Tingkat penyelesaian ekosistem *delayering* dan optimalisasi pengelolaan Jafung, dan Sub-IKU Tingkat penyelesaian *data analytics*.

Tabel-tabel berikut menjelaskan perbandingan antara SS dan IKU masing-masing perspektif tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

.

Tabel 2. 6 : Perbandingan SS dan IKU *Stakeholder Perspective* Tahun 2022 & 2023

	Tahun 2022	Target		Tahun 2023	Target
1	SDM pengelola keuangan negara yang kompeten		1	SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter	
1a-CP	Tingkat implementasi *learning organization*	85 (skala 100)	1a-CP	Tingkat implementasi *learning organization*	90%
1b-CP	Tingkat implementasi pembelajaran terintegrasi	80			
			1b-CP	Indeks Integritas Oganisasi	95,5
1c-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	82%	1c-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	85%
			1d-N	Indeks Pembangunan Karakter	4 (skala 5)

Tabel 2. 7 : Perbandingan SS dan IKU *Customer Perspective* Tahun 2022 & 2023

	Tahun 2022	Target		Tahun 2023	Target
2	Pembelajaran yang Relevant, Applicable, Impactful dan Accesible		2	Program Pengembangan SDM yang Relevant, Applicable, Impactful, Accessible	
2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	85%	2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	87%
3	Dukungan program Kementerian Keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel		3	Dukungan Manajemen yang Efektif	
3a-CP	Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70			
			3a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%
3b-CP	Nilai evaluasi reformasi birokrasi	85	3b-CP	Nilai evaluasi reformasi birokrasi	86
3c-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,45			
			3c-CP	Tingkat Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara	100%
			3d-CP	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3

Tabel 2. 8 : Perbandingan SS dan IKU *Internal Process Perspective* 2022 & 2023

	Tahun 2022	Target	Tahun 2023	Target
4	Pendidikan yang *fit for purposes*			
4a-N	Indeks kualitas penelitian	335	pindah ke SS 7	
4b-N	Tingkat efektifitas beasiswa Kementerian Keuangan	80%	pindah ke SS 7	

	Tahun 2022	Target		Tahun 2023	Target
5	Pelatihan yang valid		4	Pembelajaran yang Inklusif, Kreatif, dan Berdampak	
			4a-N	Tingkat Implementasi Pembelajaran yang Inklusif dan Kreatif	4 (skala 5)
5a-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4	4b-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	5 (skala 5)
5b-N	Tingkat validasi program pembelajaran	100			
6	Sertifikasi kompetensi yang kredibel		5	Akreditasi dan sertifikasi yang kredibel	
			5a-N	Persentase Kualitas Implementasi Program Akreditasi dan Sertifikasi	78%
			5a1-N	Tingkat Efektivitas program penyiapan Akreditasi Program Pelatihan Bidang Keuangan Negara	70%
6a-N	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	85%	5a2-N	Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi	86%
7	Manajemen pengetahuan yang reliabel		6	Manajemen Pengetahuan yang Reliabel dan Berdayaguna	
7a-N	Tingkat pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC	100%	6a-N	Persentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC	100%
7b-N	Tingkat kematangan knowledge management	3			
			7	Pendidikan yang fit for purposes	
			7a-N	Indeks kualitas penelitian	181
			7b-N	Persentase kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan standar mutu Pendidikan tinggi	96%
			7c-N	Tingkat efektifitas beasiswa Kementerian Keuangan	85

Tabel 2. 9 : Perbandingan SS dan IKU *Learning & Growth Perspective* 2022 & 2023

	Tahun 2022	Target		Tahun 2023	Target
8	Penguatan Tata Kelola Dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif		8	Penguatan Tata Kelola Dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	
			8a-CP	Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100%
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	8b-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*	100%
			8c-CP	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%
8b-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%	8d-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%
8c-CP	Tingkat implementasi budaya kemenkeu	100			
8d-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	8e-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100
			8f-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%
9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal		9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	
			9a-CP	Tingkat penggunaan aset bersama	45%
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	9b-N	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
9b-CP	Tingkat penggunaan aset bersama	25		9a-CP	
10	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif		10	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif	
10a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%

11	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif		11	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	
11a-CP	Indeks integritas organisasi	95,3		Pindah ke SS 1	
			11a-CP	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal	82

Keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut:

Tabel 2. 10 : Daftar IKU Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2023

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter	1a-CP	Tingkat implementasi learning organization	90,00%
		1b-CP	Indeks integritas organisasi	95,55
		1b1-CP	*Indeks integritas*	*91,10*
		1b2-CP	*Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK*	*100,00*
		1c-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	85,00%
		1d-N	Indeks pembangunan karakter	4,00
2	Program Pengembangan SDM yang *Relevant, Applicable, Impactful, Accessible*	2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	87,00%
3	Dukungan Manajemen yang Efektif	3a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100,00 %
		3b-CP	Nilai evaluasi reformasi birokrasi	86,00
		3c-CP	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100,00 %
		3d-CP	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3,00
4	Pembelajaran yang Inklusif, Kreatif, dan Berdampak	4a-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang inklusif dan kreatif	4,00
		4b-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4,00
5	Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi yang Kredibel	5a-N	Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi	78,00%
		5a1-N	*Persentase kesiapan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara*	*70,00%*

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		5a2-N	*Persentase kualitas implementasi program sertifikasi*	*86,00%*
6	Manajemen Pengetahuan yang Reliabel dan Berdayaguna	6a-N	Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC	100,00 %
7	Pendidikan yang Fit for Purpose	7a-N	Indeks kualitas penelitian	181,00
		7b-N	Persentase kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan standar mutu pendidikan tinggi	96,40%
		7c-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kemenkeu	85,00
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	8a-CP	Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100,00 %
		8b-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100,00 %
		8c-CP	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100,00 %
		8d-CP	Persentase penyelesaian Program IS RBTK	92,00%
		8e-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100,00
		8f-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100,00 %
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	9a-CP	Tingkat penggunaan aset bersama	45,00%
		9b-N	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100,00
		9b1-CP	*Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15*	*90,40*
		9b2-CP	*Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran*	*100,00*
		9c3-N	*Indeks efisiensi belanja birokrasi*	*85,00*
10	Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif	10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100,00 %
		10a1-CP	*Persentase penyelesaian proyek strategis TIK*	*92,00%*
		10a2-CP	*Tingkat penyelesaian data analytics*	*92,00%*
11	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif	11a-CP	Indeks Efektivitas UKI	82,00

Sumber : Perjanjian Kinerja dan Adendum Perjanjian Kinerja BPPK

3. Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko di BPPK diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. Pada proses manajemen risiko BPPK tahun 2023, dari 11 (sebelas) sasaran organisasi, dilakukan identifikasi dan analisis pada awal tahun. Dari hasil identifikasi dan analisis tersebut terdapat 11 (sebelas) risiko yang dilakukan mitigasi dari total 31 risiko yang teridentifikasi. Namun karena adanya adendum pada bulan September maka terdapat penambahan risiko yang dimitigasi menjadi 13 (tiga belas) risiko. Risiko-risiko tersebut tergambar dalam piagam risiko berikut.

Tabel 2. 11 : Daftar Risiko Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2023 sebelum Adendum

No	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko		Besaran Risiko	
				Awal Periode	Residual Harapan
1	SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter	1.1	Tingkat pemahaman pegawai terhadap *Learning Organization* belum memadai	17	11
		1.2	Asistensi *knowledge management* kurang optimal	11	10
		1.3	Peserta tidak dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran	17	11
		1.4	Program pembangunan karakter kurang berdampak pada pembentukan karakter mahasiswa	14	11
2	Program Pengembangan SDM yang *Relevant, Applicable, Impactful, Accessible*	2.1	Peserta pembelajaran yang dikirim tidak sesuai dengan persyaratan pada kerangka acuan program	6	6
3		3.1	Peserta SPMB tidak memperoleh pelayanan prima	17	11

No	Sasaran Organisasi		Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
				Awal Periode	Residual Harapan
	Dukungan Manajemen yang Efektif	3.2	Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum atau tidak ditindaklanjuti	5	5
		3.3	Desain pembelajaran belum s esuai dengan kebutuhan *stak eholders*	6	6
4	Pembelajaran yang Inklusif, Kreatif, dan Berdampak	4.1	Layanan pembelajaran tidak sesuai dengan ekspektasi peserta	6	6
		4.2	Adanya proses dalam tahapan pembelajaran yang belum sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku di BPPK	11	11
5	Akreditasi dan Sertifikasi yang Kredibel	5.1	Peserta *training of trainers* tidak memenuhi batas kelulusan	13	11
		5.2	Asistensi yang tidak tepat	13	11
		5.3	Uji kompetensi jabatan fungsional dan sejenisnya tidak berhasil diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan ada perubahan kebijakan	8	8
6	Manajemen Pengetahuan yang Reliabel dan Berdayaguna	6.1	Aset intelektual yang terdapat pada platform KLC tidak sesuai kebutuhan	6	6
7	Pendidikan yang *Fit for Purpose*	7.1	Tidak dapat menghasilkan penelitian yang berdampak bagi urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara	2	2
		7.2	Tidak terdapat perbaikan kesesuaian penyelenggaraan pendidikan di PKN STAN dengan	13	11

No	Sasaran Organisasi		Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
				Awal Periode	Residual Harapan
			Standar Mutu Perguruan Tinggi		
		7.3	Tidak tercukupinya anggaran karyasiswa beasiswa	15	10
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	8.1	Keterlambatan proses penyelesaian *delayering*	13	11
		8.2	Tidak terpenuhinya kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk pejabat struktural	10	10
		8.3	Keterlambatan penyelesaian tahapan penyusunan cetak biru organisasi Kemenkeu	6	6
		8.4	Keterlambatan penyelesaian *milestone* dari target yang ditetapkan	2	2
		8.5	Kurang optimalnya informasi yang disampaikan BPPK dalam mendukung agenda isu proaktif dan mengantisipasi respon terhadap isu negatif atau sensitif di Kemenkeu	1	1
		8.6	Rendahnya tingkat kesadaran pegawai atas budaya Kemenkeu	11	6
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	9.1	Terdapat temuan salah saji dalam pemeriksaan LK BA 015	1	1
		9.2	Nilai *smart* DJA rendah	17	13
		9.3	Indikator penyerapan anggaran IKPA tidak mencapai nilai optimal	17	13
		9.4	Terdapat gedung dan/atau sarpras di lingkungan BPPK yang belum sesuai dengan standar barang dan standar kebutuhan	1	1

No	Sasaran Organisasi		Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
				Awal Periode	Residual Harapan
10	Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif	10.1	Kegagalan pada tahap perencanaan pengembangan proyek strategis	6	6
		10.2	Kegagalan sistem IT	10	10
11	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	11,1	Adanya tangkap tangan, pungli, dan tindakan korupsi yang dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum pada pegawai di lingkungan BPPK	1	1
		11,2	Pembangunan ZI-WBK/WBBM pada unit kerja BPPK yang diusulkan belum optimal berdasarkan hasil evaluasi lapangan	11	5

Sumber : Piagam Manajemen Risiko BPPK

Tabel 2. 12 : Daftar Risiko Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2023 setelah Adendum

No	Sasaran Organisasi		Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
				Awal Periode	Residual Harapan
1	SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter	1.1	Tingkat pemahaman pegawai terhadap *Learning Organization* belum memadai	17	11
		1.2	Asistensi *knowledge management* kurang optimal	11	10
		1.3	Peserta tidak dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran	17	11
		1.4	Program pembangunan karakter kurang berdampak pada pembentukan karakter mahasiswa	14	11
		1.5	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal	17	13

No	Sasaran Organisasi		Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
				Awal Periode	Residual Harapan
2	Program Pengembangan SDM yang *Relevant, Applicable, Impactful, Accessible*	2.1	Peserta pembelajaran yang dikirim tidak sesuai dengan persyaratan pada kerangka acuan program	6	6
3	Dukungan Manajemen yang Efektif	3.1	Peserta SPMB tidak memperoleh pelayanan prima	17	11
		3.2	Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum atau tidak ditindaklanjuti	5	5
		3.3	Desain pembelajaran belum s esuai dengan kebutuhan *stak eholders*	6	6
4	Pembelajaran yang Inklusif, Kreatif, dan Berdampak	4.1	Layanan pembelajaran tidak sesuai dengan ekspektasi peserta	6	6
		4.2	Adanya proses dalam tahapan pembelajaran yang belum sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku di BPPK	11	11
5	Akreditasi dan Sertifikasi yang Kredibel	5.1	Peserta *training of trainers* tidak memenuhi batas kelulusan	13	11
		5.2	Asistensi yang tidak tepat	13	11
		5.3	Uji kompetensi jabatan fungsional dan sejenisnya tidak berhasil diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan ada perubahan kebijakan	8	8

No	Sasaran Organisasi		Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
				Awal Periode	Residual Harapan
6	Manajemen Pengetahuan yang Reliabel dan Berdayaguna	6.1	Aset intelektual yang terdapat pada platform KLC tidak sesuai kebutuhan	6	6
7	Pendidikan yang *Fit for Purpose*	7.1	Tidak dapat menghasilkan penelitian yang berdampak bagi urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara	2	2
		7.2	Tidak terdapat perbaikan kesesuaian penyelenggaraan pendidikan di PKN STAN dengan Standar Mutu Perguruan Tinggi	13	11
		7.3	Tidak tercukupinya anggaran karyasiswa beasiswa	15	10
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	8.1	Keterlambatan proses penyelesaian *delayering*	13	11
		8.2	Tidak terpenuhinya kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk pejabat struktural	10	10
		8.3	Keterlambatan penyelesaian tahapan penyusunan cetak biru organisasi Kemenkeu	6	6
		8.4	Keterlambatan penyelesaian *milestone* dari target yang ditetapkan	2	2
		8.5	Kurang optimalnya informasi yang disampaikan BPPK dalam mendukung agenda isu proaktif dan mengantisipasi respon terhadap isu negatif atau sensitif di Kemenkeu	2	2
		8.6	Dihapus	-	-

No	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko		Besaran Risiko	
				Awal Periode	Residual Harapan
		8.7	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	25	16
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	9.1	Terdapat temuan salah saji dalam pemeriksaan LK BA 015	6	6
		9.2	Nilai *smart* DJA rendah	17	13
		9.3	Indikator penyerapan anggaran IKPA tidak mencapai nilai optimal	17	13
		9.4	Terdapat gedung dan/atau sarpras di lingkungan BPPK yang belum sesuai dengan standar barang dan standar kebutuhan	5	5
10	Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif	10.1	Kegagalan pada tahap perencanaan pengembangan proyek strategis	6	6
		10.2	Kegagalan sistem IT	10	10
11	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	11.1	-	-	-
		11.2	Pembangunan ZI-WBK/WBBM pada unit kerja BPPK yang diusulkan belum optimal berdasarkan hasil evaluasi lapangan	11	5

Sumber : Adendum Piagam Manajemen Risiko BPPK

4. Inisiatif Strategi

Selain 26 IKU yang diukur, BPPK memiliki Inisiatif Strategis (IS). IS merupakan kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target IKU sehingga berimplikasi pada pencapaian SS. Tabel 2.11 berikut menyandingkan IS BPPK tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 13 : Perbandingan Inisiatif Strategis BPPK

Tahun	*SS/IKU*	*Inisiatif Strategis*	Output / Outcome	*Biaya*
2022	SDM Pengelola Keuangan Negara	Penguatan Implementasi	Terwujudnya Kemenkeu	-

Tahun	*SS/IKU*	*Inisiatif Strategis*	Output / Outcome	*Biaya*
	yang Kompeten / Tingkat Implementasi *Learning Organization*	Manajemen Pengetahuan dan Pembelajaran Terintegrasi untuk Mewujudkan Kementerian Keuangan Sebagai *Learning Organization*	sebagai *learning organization* dengan tingkat implementasi tinggi (80%)	
2023	Dukungan Program Kementerian Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel / Tingkat Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara	Pelaksanaan Penjaminan mutu pembelajaranmelalui akreditasi pelatihan teknis di bidang Keuangan Negara bagi KLID	Program Pelatihan Teknis di Bidang Keuangan Negara terakreditasi pada KLID.	Rp105.814.000

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Renstra
B. Capaian Kinerja Organisasi
C. Realisasi Anggaran
D. Realisasi Output
E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
F. Kinerja Lain-Lain
G. Tindak Laniut atas Evaluasi AKIP 2022

Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karena peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat.

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Renstra

Capaian rentra BPPK tahun 2023 berikut tahun sebelumnya tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3. 1 : Capaian Renstra BPPK Tahun 2021 - 2023

No	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase lulusan Pendidikan dengan predikat minimal baik	93%	99,94%	93%	96,12%	93%	95,72%
2	Indeks Kualitas Penelitian	148	442	193	546,5	238	280
3	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	75%	81,47%	80%	99,41%	82%	96,49%
4	Tingkat Implementasi Learning Organization*	77%	93,2	80%	91,01	82%	92,22%
5	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya**	80%	89,9%	82%	88,78%	85%	91,49%
6	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	84%	98,37%	85%	98,85%	86%	94,48%
7	Persentase lulusan Pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%	98,21%	-	-	-	-
8	Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM	-	-	90%	-	92%	-

No	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Kemenkeu melalui pembelajaran/CGI						
9	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	70%	99,43%	70%	94,88%	70%	89,27%
10	Persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kemenkeu	4,5%	5,2%	4,5%	7,02%	4,5%	9,45%
11	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4	5	5	5	5	5
12	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	80%	98,8%	80%	99,32%	80%	97,75%
13	Tingkat pemanfaatan knowledge pada platform KLC	100%	116%	100%	115,29%	100%	113,64%
14	Tingkat Kematangan Knowledge Management	-	-	2	4	2	4
15	Persentase jam pelatihan SDM keuangan negara KLID terhadap jam kerja pegawai***	0,25%	1,6%	0,25%	1,72%	0,25%	1,74%
16	Persentase pegawai yang telah memenuhi SKJ****	94%	115,56%	94%	99,46%	94%	99,31%
17	Persentase kualitas pengelolaan BLU****	80%	78,11%	80%	120%	80%	120%
18	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK****	87%	100%	90%	100%	92%	111%

Indikator kinerja Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik tidak memiliki target pada tahun 2023. Indikator kinerja Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran/CGI memiliki target pada tahun 2022

dan 2023 namun untuk realisasi belum dapat dihitung karena belum dapat diimplementasikan pada tahun tersebut.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi guna menggambarkan tugas dan fungsinya secara proporsional adalah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja BPPK tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi IKU pada setiap perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh hasil bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPK tahun 2023 adalah sebesar 112,00. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tertuang pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 : Capaian Kinerja tiap Perspektif

Perspektif	*Bobot*	*Nilai*
Stakeholder	30%	109,57
Customer	20%	110,38
Internal Process	25%	114,38
Learning & Growth	25%	113,37
Nilai Kinerja Organisasi	100%	112,00

Perkembangan NKO BPPK dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tergambar dalam **Gambar 3.1** berikut.

Gambar 3. 1 : Tren Nilai Kinerja Organisasi BPPK

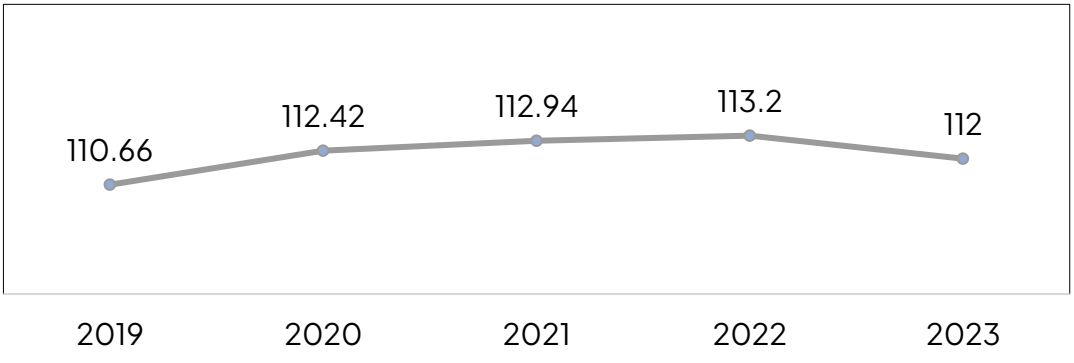

Meskipun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan NKO di tahun 2022 namun dari 26 IKU yang dimiliki BPPK seluruhnya memiliki capaian berstatus hijau (memenuhi target). Adapun penyebab penurunan NKO pada tahun 2023 yang telah diidentifikasi sebagai berikut.

1. Terdapat IKU lama yang targetnya meningkat signifikan, sehingga walaupun secara realisasi terdapat peningkatan, tetapi capaiannya menjadi tidak terlalu tinggi;
2. Sesuai KMK-300/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan terdapat perubahan bobot perhitungan NKO (perspektif *stakeholder* dan *customer* memiliki bobot lebih tinggi dari sebelumnya).

Capaian dari keseluruhan 26 IKU tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3. 3 : Target, Realisasi dan Capaian IKU BPPK Tahun 2023

Kode SS /IKU	Sasaran Strategis / IKU (Bobot)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
A	*STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)*			109,57
1	**SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter**			109,57
1a-CP	Tingkat implementasi learning organization	90,00%	92,22%	102,47
1b-CP	Indeks integritas organisasi	95,55	108,98	114,06
1b1-CP	*Indeks integritas*	*91,10*	*93,64*	*102,79*
1b2-CP	*Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK*	*100,00*	*113,76*	*113,76*
1c-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	85,00%	91,49%	107,64
1d-N	Indeks pembangunan karakter	4,00	4,5	112,50
B	*CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)*			110,38
2	**Program Pengembangan SDM yang Relevant, Applicable, Impactful, Accessible**			108,60
2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	87,00%	94,48%	108,60
3	**Dukungan Manajemen yang Efektif**			112,16
3a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100,00%	116,49%	116,49
3b-CP	Nilai evaluasi reformasi birokrasi	86	88,82	103,28
3c-CP	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100,00%	116,50%	116,50

Kode SS /IKU	Sasaran Strategis / IKU (Bobot)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
3d-CP	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3	4	120,00
C	*INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)*			**114,83**
4	**Pembelajaran yang Inklusif, Kreatif, dan Berdampak**			**119,50**
4a-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang inklusif dan kreatif	4	4,76	119,00
4b-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4	5	120,00
5	**Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi yang Kredibel**			**114,27**
5a-N	Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi	78,00%	89,13%	114,27
5a1-N	*Persentase kesiapan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara*	*70,00%*	80,50%	115,00
5a2-N	*Persentase kualitas implementasi program sertifikasi*	*86,00%*	97,75%	113,66
6	**Manajemen Pengetahuan yang Reliabel dan Berdayaguna**			**113,64**
6a-N	Persentase pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC	100,00%	113,64%	113,64
7	**Pendidikan yang Fit for Purpose**			**111,93**
7a-N	Indeks kualitas penelitian	181	233,80	120,00
7b-N	Persentase kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan standar mutu pendidikan tinggi	96,40%	98,58%	102,26
7c-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kemenkeu	85	96,49	113,52
D	*LEARNING AND GROWTH PERSEPCTIVE 25%)*			**113,37**
8	**Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif**			**111,63**
8a-CP	Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100,00%	118,21%	118,21
8c-CP	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100,00%	100,00%	100,00
8d-CP	Persentase penyelesaian Program IS RBTK	92,00%	99,58%	108,24
8e-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	120,00	120,00
8f-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100,00%	108,67%	108,67
9	**Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal**			**117,33**

Kode SS /IKU	Sasaran Strategis / IKU (Bobot)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
9a-CP	Tingkat penggunaan aset bersama	45,00%	120,00%	120,00
9b-N	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	114,66	114,66
9b1-CP	*Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15*	*90,4*	*98,05*	*108,46*
9b2-CP	*Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran*	*100*	*115,52*	*115,52*
9b3-N	*Indeks efisiensi belanja birokrasi*	*85*	*146,00*	*120,00*
10	**Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif**			**114,35**
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100,00%	114,35%	114,35
10a1-CP	*Persentase penyelesaian proyek strategis TIK*	92,00%	111,00%	*120,00*
10a2-CP	*Tingkat penyelesaian data analytics*	85,00%	100,00%	*108,70*
11	**Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif**			**110,17**
11a-CP	Indeks Efektivitas UKI	82	90,34	110,17
	NILAI KINERJA ORGANISASI			**112,00**

Penjelasan capaian IKU Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selama tahun 2023 untuk masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut.

SS-1. SDM PENGELOLA KEUANGAN NEGARA YANG UNGGUL DAN BERKARAKTER

SDM pengelola keuangan negara yang unggul dan berkarakter adalah SDM yang memiliki kompetensi yang unggul dan cakap dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif dan efisien sesuai target yang ditetapkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi.

Selain itu, juga dapat menunjukkan adanya perilaku baik, terpuji, santun, berkarakter, serta mencerminkan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, sinergi, profesionalisme, pelayanan, dan kesempurnaan. Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan tiga buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3. 4 : SS SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	**Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter**			**109,57**
1a-CP	Tingkat implementasi *learning organization*	90,00%	92,22%	102,47
1b-N	Indeks Integritas Organisasi	95,55	109,98	114,06
1c-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	85,00%	91,49%	107,64
1d-N	Indeks pembangunan karakter	4,00	4,50	112,50

Indeks capaian untuk SS ini adalah **109,57** Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS "SDM Pengelolaan Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter" adalah sebagai berikut.

1a-CP Tingkat Implementasi *Learning Organization*

Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO) merepresentasikan nilai unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dalam penerapan *learning organization*. *Learning organization* (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi *learning organization* diatur dalam KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*learning organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK-1/KM.11/2021 tentang Pedoman Teknis Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran tingkat implementasi LO menggunakan metode yang dikembangkan dari konsep *Enterprise Learning System Assessment*, yang merupakan salah satu komponen dalam penerapan strategi Kemenkeu *Corporate University*. Tingkat implementasi *learning organization* dapat ditinjau dari input, proses, dan output pembelajaran yang dapat dilakukan dengan komponen penilaian terdiri dari:

1. *Strategic fit and management commitment;*
2. *Learning function organization;*

3. *Learners;*
4. *Knowledge management Implementation;*
5. *Learning value chain;*
6. *Learning solutions;*
7. *Learning spaces;*
8. *Learners' performance;*
9. *Leaders' participation in learning process;* dan
10. *Feedback.*

Pengukuran IKU ini menggunakan metode penilaian, *self assesment* dan survei.

1. **Penilaian**: dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat.
2. ***Self Assesment***: dilakukan oleh unit yang membidangi pengembangan pegawai di setiap Eselon I dan/atau unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK
3. **Survei**:
   a. Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh BPPK.
   b. Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survei.
   c. Responden survei adalah seluruh pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi Sampel.

FORMULA IKU

$$\textbf{\textit{Capaian IKU Tingkat Implementasi LO}} = \frac{(30\%\ x\ Penilaian)+(30\%\ x\ Self\ Assesssment)+(40\%\ x\ Survey)}{Target\ IKU\ Implementasi\ LO}\ x\ 100$$

Lingkup penilaian BPPK adalah *Learning Organization* pada seluruh Unit Eselon I Kemenkeu (sama seperti realisasi Kemenkeu).

Pada tahun 2023, IKU tingkat implementasi LO ditargetkan dapat mencapai 90 poin (skala 100). Dari pengukuran tingkat implementasi LO yang telah dilakukan, realisasi IKU ini mencapai 92,22 poin yang menjadikan capaian dari IKU ini berada di angka 102,47. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan target, realisasi, dan capaian IKU Tingkat Implementasi LO.

BPPK	SS: SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter 1a-CP: Tingkat Implementasi Learning Organization							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	90%	90%	Max/TLKV
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92,22%	92,22%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	102,47	102,47	

Hasil penilaian tingkat implementasi LO yang dilakukan pada unit-unit di lingkungan Kemenkeu tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Unit Organisasi	Survei (40%)	Self Assessment (30%)	Penilaian Komite (30%)	Nilai Akhir
1	Setjen	90,46	94,44	94,16	92,76
2	Itjen	88,84	94,25	94,21	91,93
3	DJA	87,93	93,05	93,45	91,12
4	DJP	91,70	94,53	86,22	90,91
5	DJBC	92,91	95,37	92,37	93,48
6	DJPB	96,96	96,06	93,86	95,76
7	DJKN	96,65	94,21	92,74	94,74
8	DJPK	90,62	94,52	93,34	92,61
9	DJPPR	88,96	91,98	93,04	91,09
10	BKF	86,14	92,66	92,31	89,95
11	BPPK	93,91	95,65	95,44	94,89
12	LNSW	85,37	94,02	83,31	87,34
	Kemenkeu	**90,84**	**94,23**	**92,04**	**92,22**

$$Capaian\ IKU\ Tingkat\ Implementasi\ LO = \frac{Realisasi\ Tingkat\ Implementasi\ LO}{Target\ IKU\ Implementasi\ LO}\ x\ 100$$

$$Capaian\ IKU\ Tingkat\ Implementasi\ LO = \frac{(40\%\ x\ Survei) + (30\%\ x\ Self\ Assesssment) + (30\%\ x\ Penilaian\ Komite)}{Target\ IKU\ Implementasi\ LO}\ x\ 100$$

$$Capaian\ IKU\ Tingkat\ Implementasi\ LO = \frac{(40\%\ x\ 90{,}84) + (30\%\ x\ 94{,}23) + (30\%\ x\ 92{,}04)}{90}\ x\ 100$$

$$Capaian\ IKU\ Tingkat\ Implementasi\ LO = \frac{92{,}22}{90}\ x\ 100 = \mathbf{102{,}47}$$

Kendala yang muncul pada pencapaian IKU *Tingkat Implementasi Learning Organization* adalah masih terdapat Unit Eselon I yang tidak memiliki pegawai yang mengikuti pelatihan yang dapat diukur dampak peningkatan kinerjanya dan belum optimalnya proses manajemen pengetahuan di beberapa unit eselon I Kementerian Keuangan. Namun demikian target IKU Tingkat implementasi *Learning Organization* di tahun 2023 tetap dapat tercapai.

Beberapa upaya dilakukan untuk mendukung ketercapaian IKU ini, diantaranya sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Analisis dan diseminasi hasil penilaian implementasi *Learning Organization* 2022
2. Pembentukan Komite *Learning Organization* tahun 2023, yang terdiri dari Tim Pengelola Mitra, Tim Pengelola Komunikasi, Tim Pengelola Dampak Perubahan, Tim pengelola Pengendalian Mutu, dan Tim Sekretariat
3. Penyusunan rencana kerja komite *Learning Organization,* termasuk didalamnya proses asistensi/pendampingan setiap Unit Eselon I dan pengukuran tingkat implementasi *Learning Organization.*
4. Penyusunan SK Tim *Learning Organization and Knowledge Management* (LOKM) 2023 untuk memperkuat peran UIC masing-masing unit kerja dalam melaksanakan amplifikasi program kerja implementasi *Learning Organization*
5. Pelaksanaan Rapat koordinasi pengelola LOKM unit kerja di lingkungan BPPK dengan agenda harmonisasi rencana kerja dan *current issues* terkait manajemen pengetahuan.
6. Pembahasan r*efinement* kategori aset intelektual pada *Knowledge Management System* (KMS) berdasarkan *Enterprise Architecture* (EA) Kemenkeu dan panitia penjaminan mutu.
7. *One on One Meeting* dengan masing-masing UIC Unit Kerja di BPPK sebagai upaya monev progres implementasi LOKM di BPPK.
8. Pembahasan perubahan ketentuan pengukuran tingkat implementasi *Learning Organization*
9. Penetapan KMK Perubahan penilaian tingkat implementasi *Learning Organization*, yang telah mencakup pengukuran untuk menilai Pembelajaran Terintegrasi dan Kemantangan Manajemen Pengetahuan (dalam satu instrument dengan instrument penilaian *Learning Organization*).

Rencana aksi yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang terkait dengan IKU tingkat implementasi LO adalah sebagai berikut:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Implementasi LO di BPPK tahun 2024	Seluruh Unit	Sepanjang tahun 2024
2. Asistensi Implementasi LO seluruh UE1 tahun 2024	Pusdiklat dan BDK Komite LO BPPK)	Sepanjang tahun 2024
3. Pengukuran dan Pelaporan Tingkat Implementasi LO tahun 2024	Komite LO	Triwulan IV tahun 2024

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* adalah tidak terwujudnya *continous improvement* sebagai hasil dari pembentukan budaya belajar. Terkait dengan risiko ini, rencana mitigasi sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Rencana Mitigasi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi terkait perangkat penilaian LO oleh tim pengelola mitra kepada Unit Eselon I yang menjadi unit sampel penilaian LO	Bagian TIKMP, Pusdiklat dan BDK (Komite LO BPPK)	Sepanjang tahun 2023
2	Intensifikasi pemahaman terkait learning organization pada acara-acara webinar, misalnya LOKeR		
3	Tim Pengelola Mitra LO melakukan pendampingan dengan metode *one on one meeting* dengan masing-masing unit sampel dan melakukan sosialisasi komponen penilaian LO tahun 2023		
4	Asistensi Implementasi LO kepada seluruh UE1 oleh masing-masing Pusdiklat mitra		

Hingga akhir tahun 2023, mitigasi risiko yang telah dilaksanakan oleh BPPK adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan Tim Pengelola Mitra yang berisi Perwakilan Pusdiklat dan Balai Diklat untuk dapat melakukan pendampingan dalam hal implementasi *Learning Organization.*
2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran terintegrasi pada setiap Unit Eselon I.

3. Pelaksanaan Sosialisasi dan asistensi terkait hasil pengukuran implementasi *Learning Organization* tahun 2022 kepada Unit Eselon I yang disesuai dengan kebutuhan sepanjang tahun.
4. Penyusunan rencana kerja masing-masing tim *Learning Organization* tahun 2023.
5. Pemutaran video *Learning Organization* dalam acara LOKeR yang diselelenggarakan setiap minggu dan diikuti oleh Instansi Kemenkeu dan Non Kemenkeu sebagai sarana implementasi berbagi pengetahuan.
6. Pelaksanaan webinar melalui acara LOKeR yang terdapat pada Kanal Youtube Pembelajaran Terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan tujuan membangun *knowledge institution* melalui *learning organization* dan implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan.
7. Pelaksanaan Fun Quizzez bertema implementasi *Learning Organization* di lingkungan BPPK.

Langkah-langkah mitigasi tersebut telah berhasil menurunkan level risiko dari level tinggi ke level rendah. Berikut ini adalah grafik yang mengilustrasikan penurunan level risiko tersebut.

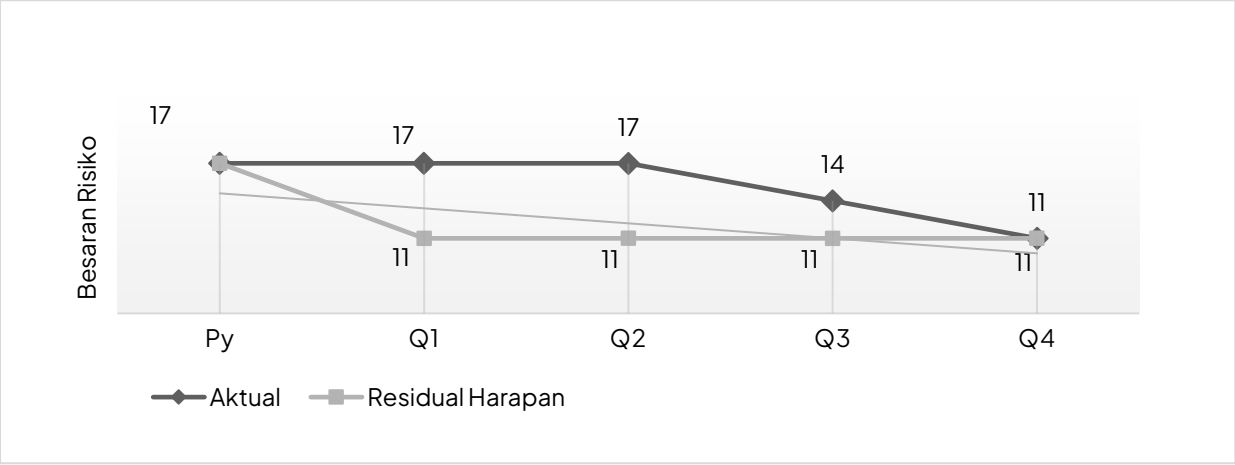

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian IKU Tingkat implementasi *Learning Organization,* realisasi IKU berhasil melebihi target yang sudah ditetapkan. IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* sudah diimplementasikan sejak tahun 2020, dan masih akan berlanjut di tahun 2024 dengan target yang semakin meningkat. Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan target renstra/renja, target

IKU, realisasi, dan capaian IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* tahun 2020-2023. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan level nasional.

Tabel 3. 5 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi LO

	2020	2021	2022	2023
Target Renstra BPPK	75%	77%	80%	82%
Target Renstra Kemenkeu	75%	77%	80%	82%
Target Renja	-	77%	80%	82%
Target Iku	75	77	85	90%
Realisasi Iku	95,59	93,2	91,01	92,22%

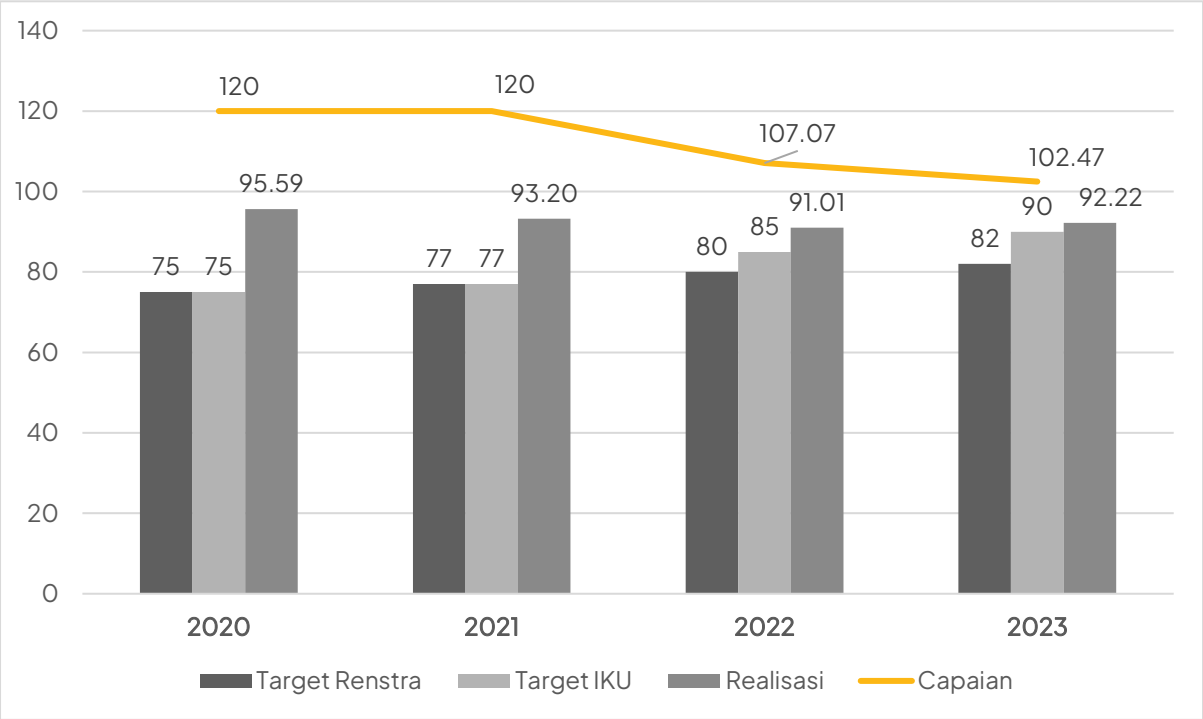

1b-N Indeks Integritas Organisasi

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kemenkeu (responden eksternal) dan menjadikan *pilot project* perwujudan *good governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

IKU indeks integritas organisasi terdiri dari dua Sub IKU yaitu:

1. **Indeks Integritas**

Indeks integritas diperoleh dari penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi integritas selama 12 bulan.

Responden Penilaian Integritas terdiri dari :

- Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
- Eskternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

2. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis intergritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya

sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM. Ruang lingkup Sub IKU ini hanya mengukur prestasi predikat ZI WBK yang dievaluasi oleh Tim Penilai Kementerian Keuangan.

FORMULA IKU

Capaian IKU = Rata-Rata Realisasi dari Seluruh Komponen

Indeks integritas diperoleh dari hasil Survei Penilaian Integritas yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa hal terkait SPI Kementerian Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. KPK melaksanakan SPI pada 639 K/L/PD di seluruh Indonesia. Pengisian survei online dilakukan melalui platform survei milik KPK.
2. Kemenkeu menggunakan pengolahan data primer hasil survei KPK yang kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi sehingga menghasilkan indeks penilaian integritas.
3. Indeks capaian IKU merupakan indeks penilaian integritas ditambah skor apresiasi.
4. Apresiai terdiri dari capaian atas realisasi tindak lanjut hasil SPI 2022 dan kegiatan pencegahan antikorupsi selama tahun 2023.

Target dan capaian dari IKU Indeks Interitas Organisasi pada tahun 2023, dijelaskan dalam tabel berikut

BPPK	SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter 1b-CP Indeks Integritas Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	95,55	95,55	Max/TLKV
Realisasi	-	-	-	-	-	108,98	108,98	
Capaian	-	-	-	-	-	114,06	114,06	

Berikut ini adalah rincian dari realisasi Sub IKU Indeks Integritas di BPPK dan unit eselon I lain di Kemenkeu.

Unit	*Integritas Kemenkeu 2023*	*Apresiasi*			*Realisasi Sub IKU*
		TL SPI	Kegiatan Pencegahan	Total Apresiasi	
Setjen	87,39	100	100	5	92,39
DJA	90,93	98,08	85,00	4,58	95,51
DJP	81,32	96,21	83,40	4,49	85,81
DJBC	77,75	89,37	73,76	4,08	81,83
DJPB	92,73	100	84,81	4,62	97,35
DJKN	84,57	100	83,86	4,60	89,17
DJPK	90,11	95,56	100	4,89	95,00
DJPPR	91,60	100	80	4,5	96,10
Itjen	90,63	96,35	92,22	4,71	95,34
BKF	88,58	100	62,14	4,05	92,63
BPPK	89,25	99,67	76,05	4,39	93,64
LNSW	90,53	100	80	4,5	95,03

Realisasi untuk Sub IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK diperoleh dari 60% bobot Nilai LKE, 20% bobot Tingkat Kelulusan pada Tim Penilai UEI (TP UEI) dan 20% bobot Tingkat Kelulusan pada Tim Penilai Kementerian (TPK). Berikut ini adalah rincian Sub IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di BPPK dan unit eselon I lain di Kemenkeu.

Unit	Nilai LKE	Lulus TP UE I	Lulus TPK	Realisasi Sub IKU
Setjen	74,77	20,00	17,14	111,92
DJP	70,93	20,00	14,62	105,55
DJBC	73,14	20,00	20,00	113,14
DJPB	72,71	20,00	17,78	110,49
DJKN	70,65	20,00	17,14	107,80
DJPK	68,58	20,00	20,00	108,58

Unit	Nilai LKE	Lulus TP UE I	Lulus TPK	Realisasi Sub IKU
DJPPR	72,45	20,00	20,00	112,45
BKF	69,82	20,00	20,00	109,82
BPPK	74,63	20,00	20,00	114,63

Di tahun 2023 terdapat 5 unit yang diusulkan untuk penilaian ZI-WBK dari BPPK, dari lima unit yang diusulkan tersebut seluruhnya berhasil lulus Tim Penilai UEI dan Tim Penilai Kementerian.

Capaian dari masing-masing Sub IKU adalah sebagai berikut.

Komponen	s.d. Q4 target	s.d. Q4 realisasi	s.d. Q4 capaian
Indeks integritas	91.1	93.64	102.79
Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK	100	114.63	114.63
Indeks integritas organisasi	**95.55**	**104.14**	**108.98**

Tantangan yang dihadapi oleh BPPK dalam pencapaian IKU ini sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal masih membutuhkan penguatan, terutama terkait efektifitas *early warning system*, saluran pengaduan dan sosialiasi antikorupsi;
2. Apabila Inspektorat Jenderal melaksanakan perombakan strategi penguatan integritas Kementerian Keuangan sebagai respon atas isu negatif yang terjadi, maka mekanisme pelaksanaan tindak lanjut SPI akan megalami penyesuaian.;
3. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian di dalam perhitungan Indeks Integritas maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK;
4. Pedoman berbentuk suplemen yang akan mengatur proses Penilaian Mandiri, Penjaminan Kualitas, dan evaluasi tahun 2023 menunggu penetapan dan sosialisasi dari BPKP.

Dalam rangka pencapaian IKU Indeks Integritas Organisasi, berikut ini adalah upaya yang telah dilaksanakan oleh BPPK sepanjang tahun 2023.

1. Penyusunan dan pengkoordinasin pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut hasil SPI tahun lalu pada seluruh unit di lingkungan BPPK;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan IR VI tentang matriks tindak lanjut SPI;
3. Penyampaian Laporan Realisasi Tindak Lanjut Rencana Aksi SPI Triwulan II;
4. Pelaksanaan koordinasi awasl dengan Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai liaison dengan BPKP terkait perencanaan pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut hasil SPI;
6. Pelaksanaan monitoring realisasi rencana aksi tindak lanjut SPI;
7. Pelaksanaan survei SPI dan monitoring pengisian survei.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah sebagai berikut.

1. Meminta rencana aksi tindak lanjut hasil SPI tahun lalu kepada unit terkait di lingkungan BPPK;
2. Menyusun matriks rencana tindak lanjut BPPK kemudian menyampaikan kepada Inspektorat Jenderal;
3. Mengkoordinasikan Tindak Lanjut Rencana Aksi SPI Triwulan III dan IV;
4. Melaksankaan monitoring atas tindak lanjut SPI;
5. Melaksanakan koordinasi yang intensif terkait pelaksanaan SPI selanjutnya;
6. Melaksanakan koordinasi intens dengan Sekretariat Jenderak terkait rencana Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Keuangan melalui korespondensi informal terlebih dahulu.
7. Mengikuti sosialisasi SPIP jika peraturan terbaru dari BPKP telah terbit.

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap IKU Indeks Integritas Organisasi adalah adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Inspektorat Jenderal, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum. Terkait dengan risiko ini, rencana mitigasi yang dilakukan oleh BPPK adalah sebagai berikut.

No	Rencana Mitigasi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi anti korupsi dan penguatan budaya secara berkelanjutan	Seluruh unit di lingkungan BPPK	Sepanjang tahun 2023

No	Rencana Mitigasi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
2	Penegakan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran	Seluruh pegawai dan UKI	
3	Penguatan *awareness* pengawasan antar sesama pegawai (Atasan, bawahan, dan sesame *peers)/* penguatan lini pertama	Seluruh pegawai	

Hingga akhir tahun 2023, mitigasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi antikorupsi di lingkungan BPPK
2. Penegakan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran.
3. Internalisasi nilai-nilai budaya Kemenkeu.

Langkah-langkah mitigasi tersebut telah berhasil menurunkan level risiko dari level tinggi pada triwulan II dan III ke level rendah. Berikut ini adalah grafik yang mengilustrasikan penurunan level risiko.

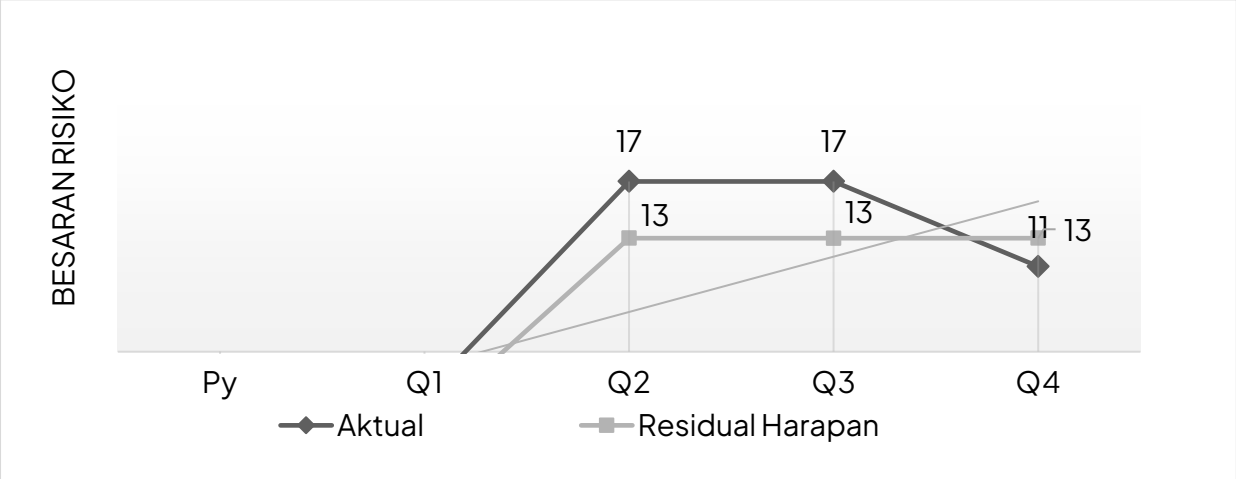

IKU Indeks integritas organisasi telah ditetapkan sebagai IKU pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sejak tahun 2020 meskipun IKU ini tidak tercantum dalam Renstra ataupun Renja BPPK, IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan level nasional.. Ringkasan target, realisasi dan capaian IKU sejak tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Integritas Organisasi

	2020	2021	2022	2023
Target Renstra	-	-	-	-
Target Renja	-	-	-	-
Target IKU	95,05	95,1	95,3	95,5
Realisasi IKU	108,68	110,53	107,97	108,98
Capaian IKU	114,34	116,29	113,29	114,06

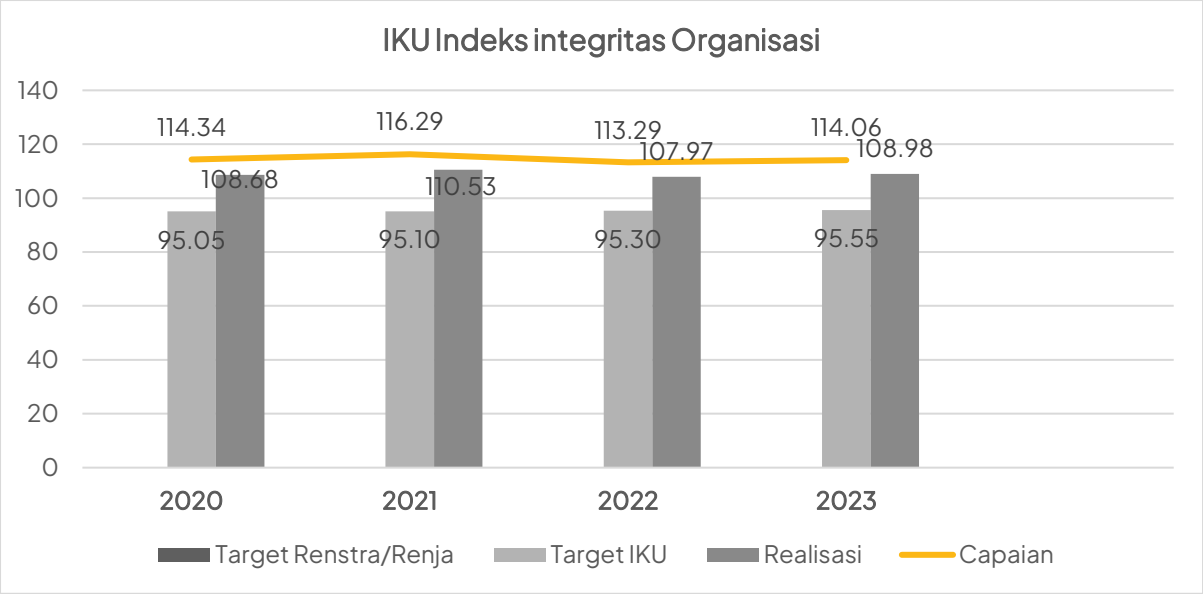

Salah satu komponen dari IKU Indeks Integritas Organisasi, yaitu Indeks Integritas terdapat pada renstra Kemenkeu. Berikut adalah perbandingan target dan realisasi tersebut.

Perbandingan Sub-IKU Indeks Integritas

	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu	90,5	90,5	91	91,5
Target Sub IKU	-	-	90,6	91,1
Realisasi Sub IKU	-	-	91,07	93,64

1c-N Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya

IKU ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan yang nantinya berdampak pada peningkatan kinerja individu dan mengukur kuantitaf program yang dilakukan epaspem sampai dengan dampak pembelajaran. Pengukuran dampak pembelajaran dilakukan antara lain dengan mengevaluasi capaian *leading indicator, desired result,* isolasi/*group control, trend lines*

dan penilaian dari atasan. Evaluasi dilakukan 3-5 bulan setelah pegawai selesai mengikuti pelatihan. Objek evaluasi dikaitkan dengan tujuan organisasi dalam konsep renstra masing-masing unit eselon I yang menjadi mitra utama.

Alumni pelatihan yang dievaluasi pada IKU ini adalah alumni dari program pelatihan yang telah didesain untuk dievaluasi sampai dengan dampak pembelajaran. Alumni pelatihan yang dievaluasi adalah alumni pelatihan yang telah lolos evaluasi perilaku pembelajaran. Alumni pelatihan yang diukur harus memiliki target kinerja yang terukur dan telah ditempatkan pada jabatan sesuai dengan kompetensi dari pelatihan yang diikuti.

Indikator keberhasilan dampak pembelajaran adalah adanya peningkatan kinerja setelah pelatihan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data capaian kinerja individu atau unit sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Indikator pengukuran kinerja sebelum dan setelah pelatihan dapat mencakup waktu, kualitas, biaya, pendapatan, hasil pekerjaan, dan lain-lain.

Dalam hal data awal tidak tersedia, dapat menggunakan alternatif:

a. data standar yang telah tersedia (contoh: SKTJ untuk jabatan tersebut, IKU dsb.);
b. nilai rata-rata kinerja peer yang sejenis pada lokasi kantor yang sama;
c. nilai standar yang ditentukan oleh unit teknis terkait.

Program yang dievaluasi pascapembelajaran sampai dengan dampak pembelajaran pada tahun 2023 adalah seluruh program yang pada KAP nya tercantum evaluasi sampai dengan dampak pembelajaran dan diselenggarakan pada Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023.

Jika hanya terdapat evaluasi pasca pembelajaran pada salah satu semester, maka realisasi tahunan sama dengan realisasi pada semester yang terdapat evaluasi pasca pembelajaran dimaksud.

FORMULA IKU

$$\text{Realisasi Tahunan} = \frac{(\text{Realisasi Semester I} + \text{Realisasi Semester II})}{2}$$

$$\text{Realisasi Semester I} = (50\% \times \text{Komp A}) + (30\% \times \text{Komp B}) + (20\% \times \text{Komp C})$$

Realisasi Semester II = (50% x Komponen D + (50% x Komponen E)
Komponen A : Persentase peserta yang meningkat kinerjnya dibanding peserta yang diukur peningkatan dampak kinerjanya **Komponen B** : Persentase peserta yang meningkat kinerjanya dibanding peserta yang diukur peningkatan perilaku kerjanya **Komponen C** : Persentase peserta yang meningkat kinerjanya dibanding peserta yang lulus pembelajaran **Komponen D** : Peserta yang meningkat kinerjanya / Peserta yang lulus pembelajaran x 100 **Komponen E** : Jumlah Program yang dievaluasi s.d dampak pembelajaran/ Target Jumlah Program Evaluasi Dampak Pembelajaran x 100%

Pada periode tahun 2023, realisasi dan capaian IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya adalah sebagai berikut.

Berdasarkan capaian dari masing-masing Sub IKU, maka realisasi dan capaian dari IKU Indeks Integritas Organisasi adalah sebagai berikut.

BPPK	SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter 1c-N Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	85%	85%	-	85%	85%	85%	Max/TLKV
Realisasi	N/A	85,02%	85,02%	N/A	85,02%	91,49%	91,49%	
Capaian	N/A	100,02	100,02	N/A	100,02	107,64	107,64	

Sampai dengan Semester I 2023, terdapat 9 program pembelajaran yang telah selesai diukur evaluasi level 4, dengan hasil:

- Komponen A: 238 peserta meningkat kinerjanya dari 250 peserta yang diukur dampak pembelajaran (95,02%)
- Komponen B: 238 peserta meningkat kinerjanya dari 285 peserta yang diukur peningkatan perilaku kerjanya (83,51%)
- Komponen C: 238 peserta meningkat kinerjanya dari 385 peserta yang lulus pelatihan (61,82%)

Tabel 3. 7 : Rincian Realisasi IKU Semester I

Nama Pelatihan	Lulus Level 4	Subjek Level 4	Subjek Level 3	Lulus Level 2	Realisasi
Pelatihan *Optimizing Collaborative Action* bagi Pejabat Administrator di Lingkungan DJP (PKM)	14	14	14	18	95.56%
PKP Angkatan 11 s.d. 14 (BDPIM)	82	86	109	117	84.26%
PJJ Literasi Perbendaharaan Tingkat Menegah	32	32	32	66	89.70%
Pelatihan Teknis Intelijen Analis	20	20	20	29	93.79%
Pelatihan Jarak jauh Teknis Perbendaharaan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai (BDK Pontianak dan BDK Pekanbaru)	22	22	22	56	87.86%
Pelatihan Teknis *Mirroring Analysis* di Bidang Kepabeanan dan Cukai Angkatan II	20	20	20	30	93.33%
PJJ Kemampuan Menulis Tingkat Dasar untuk Jafung AKPD Tahun 2022	23	31	37	37	68.18%
PJJ Kemampuan Menulis Tingkat Lanjutan untuk Jafung AKPD Tahun 2022	6	6	7	8	90.71%
Pelatihan penilaian angka kredit JF Pustakawan	19	19	24	24	89.58%
Realisasi Semester I					**85,02%**

Pada Semester II, terdapat 15 program pembelajaran yang akan diukur evaluasi level 4, dengan hasil:

- Komponen D: 451 peserta meningkat kinerjanya dari 594 peserta yang lulus pelatihan (75,93%)
- Komponen E: Telah diselesaikan 24 Program Epaspem level 4 dari target 18 program (120%)

Tabel 3. 8 : Rincian Realisasi IKU Semester II

Nama Pelatihan	Peserta Meningkat Kinerjanya	Peserta Lulus Pembelajaran	Persentase
PKP Angkatan 15 (BDPim)	25	27	92.59%
Pelatihan Jarak Jauh Perencanaan Penganggaran Bagi Kasubbag Umum	53	53	100.00%
Pelatihan Penguatan Pemahaman Mengenai *Regional Chief Economist*	22	22	100.00%
Pelatihan Teknis *Mirror Analysis* di Bidang Kepabeanan dan Cukai	18	30	60.00%
PJJ Teknis Perbendaharaan Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai (BDK Makssar dan BDK Pekanbaru)	38	51	74.51%
Pelatihan Teknis Ahli Hukum Kepabeanan dan Cukai Tingkat Lanjutan	9	30	30.00%
PJJ Sistem Informasi Geografis	44	54	81.48%
PJJ Penugasan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet	30	50	60.00%
PJJ Asisten Penyuluh Pajak	98	157	62.42%
Pelatihan Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Atas Kebijakan Desentralisasi Fiskal Tahun 2023	7	9	77.78%
PJJ Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama Tahun 2023	13	13	100.00%
Pelatihan *Event Management* (Evaluasi Dampak)	25	25	100.00%
Pelatihan Pengolahan Data dan *Machine Learning* menggunakan *Python* (Evaluasi Dampak)	14	15	93.33%
PJJ Implementasi *Learning Organization* dan *Knowledge Management*	23	24	95.83%
PJJ Metodologi Penelitian dan Pengolahan Data Tingkat Lanjutan	32	34	94.12%
Nilai Komponen D	451	594	75.93%

Realisasi Semester 2 = (50%x75,93%)+((50%x120%) = 97.96%

Berdasarkan nilai pada masing-masing komponen maka realisasi = (nilai semester I + nilai semester II)/2 = (85,02% + 97,96%)/2 = **91,49%**

Dalam pencapaian IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya, BPPK menghadapi beberapa kendala sebagai berikut.

1. Masih banyak peserta yang mengikuti pelatihan tetapi tidak menerapkan hasil pembelajaran (karena tidak ditempatkan ditempat yang sesuai, terjadi mutasi, belum mendapatkan penugasan, dll.) sehingga tidak dapat dilanjutkan dalam perhitungan epaspem level 3 dan 4.
2. Masih terdapat alumni pelatihan yang tidak dapat menyampaikan bukti dukung kinerjanya sesuai *leading indicator,* sehingga tidak dapat diukur peningkatan dampak kinerjanya.

Untuk memenuhi target IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya yang telah ditetapkan, BPPK telah melaksanakan berbagai upaya sebagai berikut.

1. Pelaksanaan koordinasi secara intensif dengan Bagian Pengembangan Unit Eselon I dalam hal pengiriman peserta;
2. Perpanjangan waktu pengisian kuesioner untuk meningkatkan *response rate*;
3. Pelaksanaan rapat pemaparan progress epaspem dengan Bagian Pengembangan Unit Eselon I untuk meningkatkan *response rate.*
4. Pelaksanaan FGD Penyusunan *Leading Indicator* dan *tools* evaluasi pascapembelajaran.

Sementara itu rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode mendatang oleh UIC Pusdiklat antara lain:

1. Pelaksanaan Analisis kebutuhan pembelajaran;
2. Penyusunan program pembelajaran;
3. Penyusunan desain dan *development* pembelajaran konvesional dan digital;
4. Penyelenggaraan pelatihan;
5. Pengukuran dampak pembelajaran (Level 1-4).

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya adalah Peserta tidak dapat

mengimplementasikan hasil pembelajaran. Terkait dengan risiko ini, rencana mitigasi yang telah disusun oleh BPPK sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Rencana Mitigasi Risiko	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Perbaikan persyaratan peserta pada kurikulum dibuat lebih spesifik sesuai dengan tujuan pembelajaran	Pusdiklat pemilik program	Sepanjang Tahun 2023
Verifikasi peserta yang akan mengikuti pelatihan sesuai dengan persyaratan pada kurikulum pelatihan	Pusdiklat dan Balai Diklat	Sepanjang Tahun 2023
Koordinasi dengan pengembangan SDM dan peserta pelatihan terkait pelatihan yang diukur pada evaluasi level 4	Pusdiklat pemilik program	Sepanjang Tahun 2023

Hingga akhir tahun 2023, mitigasi risiko yang telah dilaksanakan oleh BPPK adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan koordinasi dengan Pengembangan Pegawai UE1 terkait pengiriman peserta pelatihan;
2. Penentuan *leading indicator* yang lebih tepat dalam penyusunan instrumen evaluasi pasca pembelajaran;
3. Penggunaan matrik untuk verifikasi peserta sesuai persyaratan di dalam KAP;
4. Penyampaian informasi pelatihan terkait rencana pengukuran evaluasi level 4 kepada Unit atau Bagian Pengembangan SDM asal peserta maupun kepada peserta pelatihan di beberapa kegiatan.

Mitigasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023 berhasil menurunkan level risiko Peserta tidak dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran dari level tinggi ke level sedang pada akhir tahun 2023. Tren risiko tersebut tergambar pada grafik berikut.

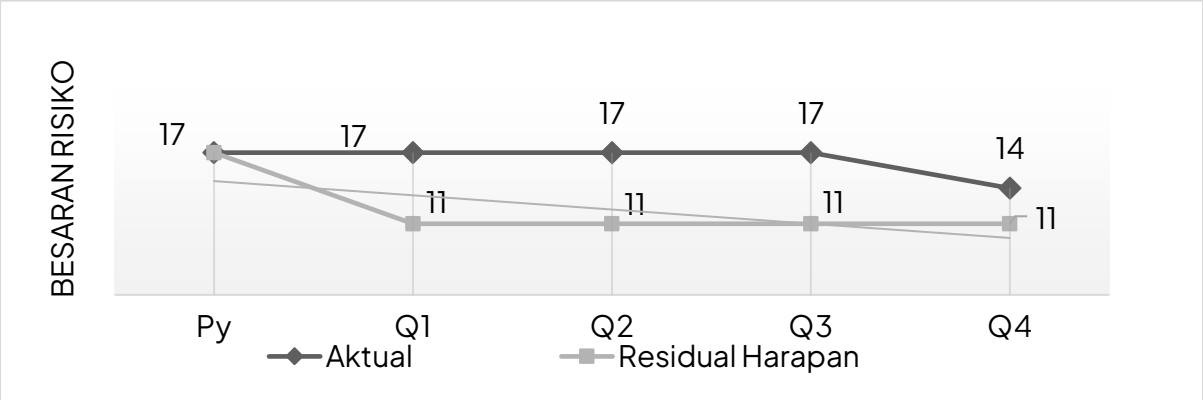

IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya merupakan IKU yang sudah ada di BPPK sejak tahun 2018. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya dari tahun 2018 – 2023.

Tabel 3. 9 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra	-	-	90%	80%	82%	85%
Target IKU	70%	90%	90%	80%	82%	85%
Realisasi IKU	91,53%	96,03%	99,36%	89,34%	88,78%	91,49%
Capaian IKU	120	106,69	110,40	111,67	108,27	107,64

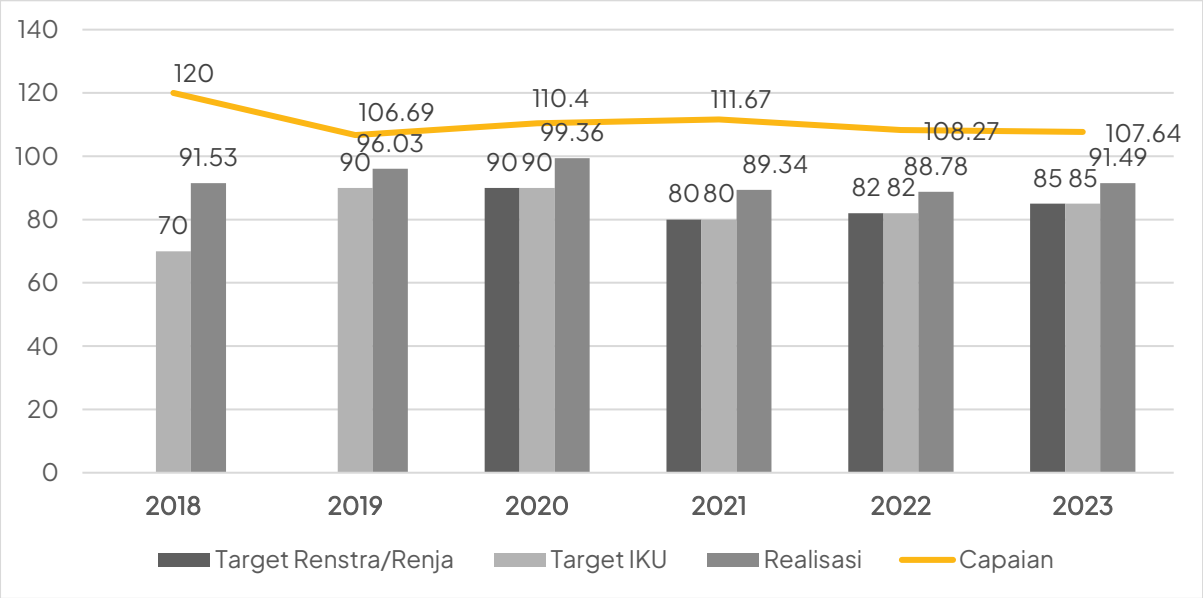

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa target IKU persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya mengalami penurunan pada tahun 2021, hal ini disebabkan adanya perubahan formula di tahun 2021. Pada tahun 2023, IKU ini juga kembali mengalami perubahan formula sehingga target dan realisasinya tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya. IKU ini tidak bisa dibandingkan dalam level nasional.

1d-N Indeks pembangunan karakter

IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2023 dan digunakan untuk mengukur tujuan BPPK terkait menghasilkan SDM yang berkarakter, dan juga sejalan dengan rencana strategis pada penguatan pendidikan berbasis nilai dan pembangunan karakter melalui program Latsar pada Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial (Pusdiklat KM) dan pada mahasiswa PKN STAN.

FORMULA IKU

Realisasi	=	50% Indeks Pembangunan Karakter PKN STAN	+	50% Indeks Pembangunan Karakter Pusdiklat KM

Formula IKU menggunakan nilai kolaborasi antara PKN STAN dan Pusdiklat KM dimana indeks pembangunan karakter PKN STAN diperoleh melalui nilai raport pendidikan karakter mahasiswa PKN STAN sedangkan untuk Pusdiklat KM diperoleh dari Evaluasi Pascapembelajaran level 3 pada peserta Latsar di Pusdiklat KM.

Pada periode Tahun 2023, realisasi dan capaian IKU Indeks pembangunan karakter adalah sebagai berikut.

BPPK	SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter 1d-N Indeks pembangunan karakter							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	4	4	Max/TLKV
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,5	4,5	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	112,5	112,5	

Indeks pembangunan karakter pada PKN STAN diperoleh dari survei yang mengukur persepsi mahasiswa yang mengikuti program pembangunan karakter. Dari hasil survei yang dilakukan diperoleh **indeks 5**. Untuk indeks pembangunan karakter pada Pusdiklat KM diperoleh dari epaspem level 3 pada peserta Latsar. Indeks pembangunan karakter pada Pusdiklat KM merupakan rata-rata dari nilai sikap perilaku peserta Latsar CPNS, nilai MFD Peserta Pelatihan Dasar dan Orientasi Pembentukan karakter, nilai Sosiometri peserta Orientasi pembentukan karakter dan nilai 7 *Habit Repetition* pada *Social Responsibility* Peserta Orientasi Pembentukan Karakter. Berdasarkan rekapitulasi

penilaian atas 745 peserta Latsar diperoleh nilai rata-rata tertimbang sebesar 78,67 yang dikonversi menjadi **indeks 4**.

Realisasi indeks pembanguan karakter = (50% x 4) + (50% x 5) = **4,5**

Untuk pencapaian IKU indeks pembangunan karakter di Pusdiklat KM sampai dengan akhir tahun 2023 tidak ditemukan kendala, namun untuk pembangunan karakter di PKN STAN muncul beberapa kendala sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pembangunan karakter pada mahasiswa PKN STAN seringkali beririsan dengan kegiatan akademik sehingga perlu dilakukan sinkronisasi.
2. Pemahaman yang belum mendasar bahwa status pegawai tugas belajar adalah mahasiswa.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU Indeks pembangunan karakter sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan karakter pada PKN STAN:
   a. Penyelenggaraan workshop pengasuhan bagi calon pengasuh di PKN STAN;
   b. Penyusunan jadwal pengasuhan dan kegiatan pembangunan karakter untuk satu semester ke depan;
   c. Penyusunan desain mata acara orientasi pembangunan karakter sesuai segmen (mahasiswa reguler/alih prorgam).
2. Pembangunan karakter pada Pusdiklat KM:
   a. Penyusunan instrument;
   b. Pengumpulan hasil penilaian dari komponen penilaian Latsar Angkatan I dan II;
   c. Pengumpulan hasil penilaian dari komponen penilaian Orientasi Pembakar Angkatan I;
   d. Rekapitulasi dan pengolahan nilai dari Latsar Angkatan I dan II;
   e. Rekapituasi dan pengolahan nilai dari Orientasi Pembakar Angkatan I dan II;
   f. Pengolahan nilai akhir dan penyusunan laporan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan program pengembangan karakter mahasiswa PKN STAN
2. Pelaksanaan program pelatihan Latihan Dasar CPNS

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap IKU Indeks pembangunan karakter adalah program pembangunan karakter kurang berdampak pada pembentukan karakter mahasiswa. Terkait dengan risiko ini, rencana mitigasi yang telah disusun sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Rencana Mitigasi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Menetapkan Program Pengasuhan Semester	PKN STAN (Unit Pembangunan Karakter)	September 2023
Melaksanakan FGD/observasi lapangan terkait program pembangunan karakter di lembaga pendidikan lainnya		Oktober 2023

Hingga akhir tahun 2023, mitigasi risiko yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Penetapan lima buah Program Pengasuhan Semester (PPS) untuk semester genap TA 2022/2023;
2. Penetapan lima buah Program Pengasuhan Semester (PPS) untuk semester gasal TA 2023/2024;
3. Pelaksanaan FGD/observasi lapangan terkait program pembangunan karakter di lembaga pendidikan lainnya (STT Telkom dan IP).

Mitigasi risiko yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 berhasil menurunkan level risiko dari sedang di awal tahun menjadi rendah di akhir tahun. Berikut ini adalah grafik yang mengilustrasikan penurunan level risiko tersebut.

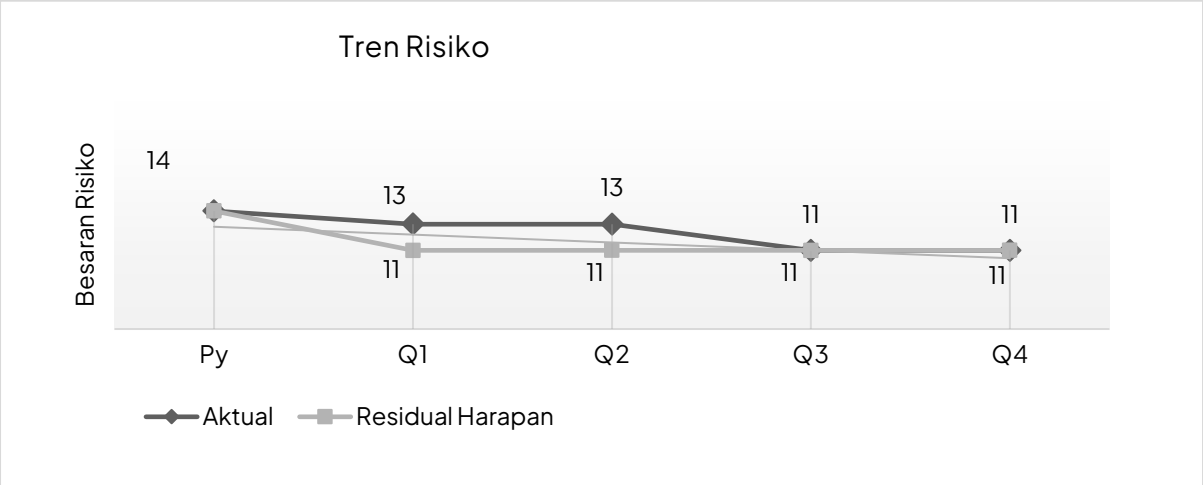

IKU ini merupakan IKU baru di BPPK, sehingga target dan realiasi IKU Indeks pembangunan karakter di tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selain itu IKU ini juga tidak terdapat dalam dokumen Renstra BPPK 2020-2024 dan tidak memiliki perbandingan dalam skala nasional.

Tabel 3. 10 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Pembangunan Karakter

Target 2022	Realisasi 2022	Target Renstra	Target 2023	Realisasi 2023
-	-	-	4	4,5

SS-2. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM YANG *RELEVANT, APPLICABLE, IMPACTFUL, ACCESSIBLE*

Program Pengembangan SDM yang *Relevant, Applicable, Impactful dan Accessible* adalah Program pengembangan kompetensi SDM pegawai yang selaras dengan kriteria pembelajaran Corpu yang mengedepankan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* (*relevant*), dapat diterapkan (*applicable*), memberikan dampak pada pencapaian sasaran organisasi (*impactful*), serta mudah diakses oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja (*accessible*) sehingga tercipta link and match antara pembelajaran dengan kinerja organisasi.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan satu buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3. 11 : SS Program Pengembangan SDM yang *Relevant, Applicable, Impactful, Accessible*

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
2	**Program Pengembangan SDM yang *Relevant, Applicable, Impactful, Accessible***			**108,6**
2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	87%	94,48%	108,6

Indeks capaian pada SS ini pada tahun 2023 adalah **108,6**. Adapun perincian dan penjelasan IKU pada SS Program Pengembangan SDM yang *Relevant, Applicable, Impactful, Accessible* adalah sebagai berikut.

2a-N Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya

IKU ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh para alumni dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK. IKU ini merupakan hasil dari evaluasi perilaku hasil pembelajaran. Data diperoleh melalui kegiatan Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran atas program-program pelatihan yang dirancang dan diselenggarakan oleh Pusdiklat serta disepakati dengan unit pengguna. Pelatihan yang diukur dalam IKU ini adalah seluruh pelatihan yang dalam KAP-nya mencantumkan minimal evaluasi pembelajaran sampai dengan perilaku hasil pembelajaran. Responden dalam kegiatan Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran adalah alumni pelatihan, atasan, rekan kerja, bawahan (jika ada) dengan menggunakan metode survei 360°. Responden yang datanya digunakan dalam perhitungan secara 360° adalah apabila jumlah tanggapan responden atas seorang alumni pelatihan minimal memenuhi 50% dari jumlah responden yang disurvei. Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan pembelajaran.

Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran dilakukan pada alumni yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memenuhi standar kompetensi yang ingin dicapai pada Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta;
2. berkomitmen dan memiliki kepercayaan diri untuk mengimplementasikan materi pembelajaran; dan
3. melaksanakan tugas yang sesuai dengan materi pembelajaran yang diikuti.

Alumni yang memenuhi standar kompetensi pada Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta adalah apabila alumni tersebut berhasil lulus ujian atau berhasil mendapat peningkatan nilai dalam *pre-test* dan *post-test*.

Alumni yang berkomitmen dan memiliki kepercayaan diri adalah apabila alumni tersebut mendapatkan nilai rata-rata minimal 3,40 (dengan skala interval 1-5) atas seluruh pertanyaan yang menggunakan skala berdasarkan form Asesmen Mandiri (Kepercayaan Diri, Komitmen, dan Perilaku) sesuai dengan PER-1/PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pascapembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Alumni yang melaksanakan tugas sesuai dengan materi pembelajaran dibuktikan berdasarkan hasil rekapitulasi dari jawaban responden atas alumni tersebut atau berdasarkan data tugas dan fungsi dari unit kerja alumni.

Indikator keberhasilan dalam IKU ini adalah adanya peningkatan kualitas perilaku kerja alumni pelatihan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pengolahan data atas persepsi responden terhadap diri alumni antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan yang menunjukkan adanya peningkatan.

FORMULA IKU

$$\text{Realisasi Tahunan} = \frac{(\text{Realisasi Semester I} + \text{Realisasi Semester II})}{2}$$

$$\text{Realisasi Semester I} = \frac{\text{Jumlah Alumni Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Kualitas Perilaku Kerja}}{\text{Jumlah Subjek Evaluasi Level 3}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Semester II} = \frac{\text{Jumlah alumni pelatihan yang lulus Epaspem s.d. perilaku hasil pembelajaran}}{\text{Jumlah alumni pelatihan yang lulus pembelajaran}} \times 100\%$$

Target dan realisasi IKU Persentase alumni yang meningkat kualitas perilaku kerjanya di tahun 2023 adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Program Pengembangan SDM yang *Relevant, Applicable, Impactful, Accessible* 2a-N Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	87%	87%	-	87%	87%	87%	Max/TLKV
Realisasi	N/A	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	94,48%	94,48%	
Capaian	N/A	114,37	114,37	N/A	114,37	108,60	108,60	

Adapun rincian realiasi Semester I adalah sebagai berikut.

Nama Pelatihan	Peserta Meningkat Perilaku Kerjanya	Subjek Level 3	Realisasi
PJJ *Communication Skills* Tingkat Dasar	154	154	100.00%
PJJ *Excellent Frontliners*	93	93	100.00%
PJJ *Effective Coaching, Mentoring, and Counseling Skills* Tingkat Menengah	281	281	100.00%
PJJ Service Excellence Bagi Frontliners Di Lingkungan DJKN	103	103	100.00%
Pelatihan Dasar CPNS	674	682	98.83%
PJJ *Optimizing Collaborative Action* Bagi Pejabat Administrator	14	14	100.00%
PJJ *Public Speaking* Angkatan 6 s.d. 12 (BDPIM)	125	125	100.00%
PJJ *Interpersonal Skill* Angkatan 5 s.d. 8 (BDPIM)	73	73	100.00%
PKA Angkatan 6 s.d. 7 (BDPIM)	50	50	100.00%
PJJ Literasi Perbendaharaan Tingkat Menegah	32	32	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Kepabeanan dan Cukai Angkatan II	15	15	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai Angkatan II	20	20	100.00%
Pelatihan Teknis Patroli dan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut (BDK Pekanbaru)	23	23	100.00%
Pelatihan Teknis Pembentukan Pawang Anjing Pelacak DJBC	10	10	100.00%
Pelatihan Teknis Monitoring Dan Evaluasi Fasilitas TPB Dan KITE Berbasis Analisis *IT Inventory*	10	10	100.00%
Pelatihan Teknis Intelijen Analis	20	20	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Teknis Perbendaharaan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai (BDK Pontianak dan BDK Pekanbaru)	22	22	100.00%
Pelatihan Teknis *Mirroring Analysis* Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai Angkatan II	20	20	100.00%
PJJ Kemampuan Menulis Tingkat Lanjutan Untuk Jafung AKPD Tahun 2022	7	7	100.00%

Nama Pelatihan	Peserta Meningkat Perilaku Kerjanya	Subjek Level 3	Realisasi
E-Learning Dasar Pemeriksaan Lelang Tahun 2022	33	33	100.00%
PJJ Analisis Penggunaan Tertinggi Dan Terbaik di BDK Denpasar	26	26	100.00%
Pelatihan Calon Analis Kebijakan	22	22	100.00%
PJJ Menulis Untuk Media Massa	30	30	100.00%
PJJ Desain Presentasi	21	21	100.00%
PJJ Pembuatan Karya Tulis Ilmiah	20	20	100.00%
PJJ Penguatan, Revitalisasi, dan Optimalisasi Unit Kepatuhan Internal (PRO UKI) Kelas Reguler	78	78	100.00%
PJJ Tata Naskah Dinas	90	91	98.90%
PJJ Pengolahan Data Dan Visualisasi Pelaporan	53	55	96.36%
PJJ Manajemen Arsip Elektronik	53	53	100.00%
Pelatihan Penilaian Angka Kredit JF Pustakawan (Level 4)	24	24	100.00%
Realisasi Semester I	**2196**	**2207**	**99.50%**

Sedangkan rincian realisasi untuk Semester II adalah sebagai berikut.

Nama Pelatihan	Peserta Meningkat Perilaku Kerjanya	Peserta Lulus Pembelajaran (level 2)	Realisasi
PJJ *Communication Skills* Tingkat Dasar	291	329	88.45%
PJJ *Excellent Frontliners*	211	228	92.54%
PJJ *Effective Coaching, Mentoring, and Counseling* Skills Tingkat Menengah	96	98	97.96%
E-Learning Creative and Innovative Thinking Techniques for Leaders	34	38	89.47%
PJJ *Public Speaking* Angkatan 1 s.d. 3 (BDPIM)	67	75	89.33%
PPK *Interpersonal skill for profesional leaders* (BDPIM)	44	48	91.67%
PKA Angkatan 8 (BDPIM)	25	25	100.00%
PKP (BDPIM)	27	27	100.00%

Nama Pelatihan	Peserta Meningkat Perilaku Kerjanya	Peserta Lulus Pembelajaran (level 2)	Realisasi
Pelatihan Jarak Jauh Perencanaan Penganggaran *Regional Chief Economist* Bagi Kasubbag Umum	53	53	100.00%
Pelatihan Penguatan Pemahaman Mengenai	22		N/A
Pelatihan Jarak Jauh Analisis Kebijakan Fiskal Regional	32	32	100.00%
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pembiayaan Pengusahaan Hutan Fasilitas Dana Bergulir Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Angkatan I	75	75	100.00%
Pelatihan Jarak *Jauh Asset-Liability Committee* (ALCo)	34	34	100.00%
Pelatihan Pembina Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan Angkatan I dan II	209	209	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai	19	33	57.58%
Pelatihan Teknis Penindakan Kepabeanan dan Cukai (CET) Angkatan I dan II	55	61	90.16%
Pelatihan Jarak Jauh Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Kepabeanan dan Cukai (BDK Malang)	24	30	80.00%
Pelatihan Teknis Monitoring dan Evaluasi Fasilitas TPB dan KITE Berbasis Analisis *IT Inventory* (BDK Malang, BDK Medan, dan BDK Pontianak)	59	90	65.56%
Pelatihan Teknis Pemeriksaan Barang Ekspor (BDK Malang)	21	32	65.63%
Pelatihan Jarak Jauh Statistika untuk Laboratorium Pengujian Menunjang Penerapan ISO/IEC17025:2017	15	15	100.00%
Pelatihan Teknis Kesamaptaan dan Pembentukan Petugas Pendamping Kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan	28	32	87.50%

Nama Pelatihan	Peserta Meningkat Perilaku Kerjanya	Peserta Lulus Pembelajaran (level 2)	Realisasi
Pelatihan Teknis *Mirror Analysis* di Bidang Kepabeanan dan Cukai	27	30	90.00%
Pelatihan Jarak Jauh Teknis Perbendaharaan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai (BDK Makassar dan BDK Pekanbaru)	40	51	78.43%
Pelatihan Teknis Ahli Hukum Kepabeanan dan Cukai Tingkat Lanjutan	26	30	86.67%
Pelatihan Jarak Jauh Pengawasan Pajak Ekonomi Digital	126	195	64.62%
Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis	49	54	90.74%
Pelatihan Jarak Jauh Penguasaan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet	40	50	80.00%
Pelatian Jarak Jauh Fungsional Asisten Penyuluh Pajak	122	157	77.71%
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah (*Blended Learning*) Tahun 2023	29	31	93.55%
PJJ Metodologi Survei dan Riset Pasar Properti bagi Pegawai DJP Ak. II Tahun 2023	23	24	95.83%
PJJ Metodologi Survei dan Riset Pasar Properti bagi Pegawai DJP Ak. I Tahun 2023	23	25	92.00%
Pelatihan Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi atas Kebijakan Desentralisasi Fiskal Tahun 2023	12	14	85.71%
PJJ Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama Tahun 2023	13	13	100.00%
Pelatihan *Loan Agreement*	15	15	100.00%
Pelatihan Calon Analis Kebijakan	22	24	91.67%
Pelatihan *Event Management* (Evaluasi Dampak)	25	25	100.00%
Pelatihan Pembekalan Hakim Baru Pengadilan Pajak	16	17	94.12%

Nama Pelatihan	Peserta Meningkat Perilaku Kerjanya	Peserta Lulus Pembelajaran (level 2)	Realisasi
Pelatihan Pengolahan Data dan *Machine Learning* menggunakan *Python*	17	20	85.00%
Pelatihan Pengolahan Data dan Machine Learning menggunakan Python (Evaluasi Dampak)	15	15	100.00%
Pelatihan *Treasury Data Analysis (Machine Learning)*	31	31	100.00%
PJJ Analisis Keuangan dan Kinerja BUMN	9	10	90.00%
PJJ *Data Governance*: Manajemen Data Untuk Pengelola Data Kementerian Keuangan	37	43	86.05%
PJJ Desain Presentasi	32	35	91.43%
PJJ Implementasi *Learning Organization* dan *Knowledge Management*	24	24	100.00%
PJJ Manajemen Kinerja	113	120	94.17%
PJJ Menulis Untuk Media Massa	21	22	95.45%
PJJ Metodologi Penelitian dan Pengolahan Data Tingkat Lanjutan	33	34	97.06%
PJJ Pengolahan Data Dan Visualisasi Pelaporan	63	68	92.65%
PJJ Pengolahan Data dan Visualisasi Pelaporan Kelas Manajerial	103	103	100.00%
PJJ Penguatan Media Sosial	30	35	85.71%
PJJ Penguatan, Revitalisasi, dan Optimalisasi Unit Kepatuhan Internal (Pro UKI) Kelas Reguler	78	92	84.78%
PJJ *Position Paper*	14	14	100.00%
PJJ Tata Naskah Dinas	32	34	94.12%
Realisasi Semester II	**2,701**	**3,019**	**89.47%**

Realisasi IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya pada tahun 2023 = (99,5% + 89,47%) : 2 = **94,48%**

Dalam pencapaian IKU ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Masih banyak peserta pelatihan yang tidak menerapkan hasil pembelajaran (karena tidak ditempatkan ditempat yang sesuai, terjadi mutasi, belum mendapatkan penugasan) sehingga tidak dapat dilanjutkan dalam perhitungan epaspem level 3.
2. Masih terdapat alumni/atasan/rekan alumni yang tidak mengumpulkan kuisioner Epaspem.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan pelatihan pada semester II tahun 2022 dan pengukuran evaluasi pascapembelajaran s.d. peningkatan perilaku kerja pada periode semester I tahun 2023;
2. Pengukuran program epaspem pada periode semester II 2023.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan di masa mendatang terkait IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya adalah sebagai berikut.

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Pelaksanaa Analisis kebutuhan pembelajaran 2. Penyusunan program pembelajaran 3. Penyusunan desain dan *development* pembelajaran konvesional dan digital 4. Penyelenggaraan pelatihan 5. Pengukuran dampak pembelajaran (Level 1-3)	Pusdiklat	Sepanjang tahun 2024

IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas kerjanya merupakan IKU yang sudah ada di BPPK sejak lama. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi IKU tersebut dari tahun 2020 – 2023.

Tabel 3. 12 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya

	2020	2021	2022	2023
Target Renstra	77%	84%	85%	86%
Target IKU	85%	84%	85%	87%
Realisasi IKU	99,51%	98,37%	98,85%	94,48%
Capaian IKU	117,07	117,1	116,29	108,6

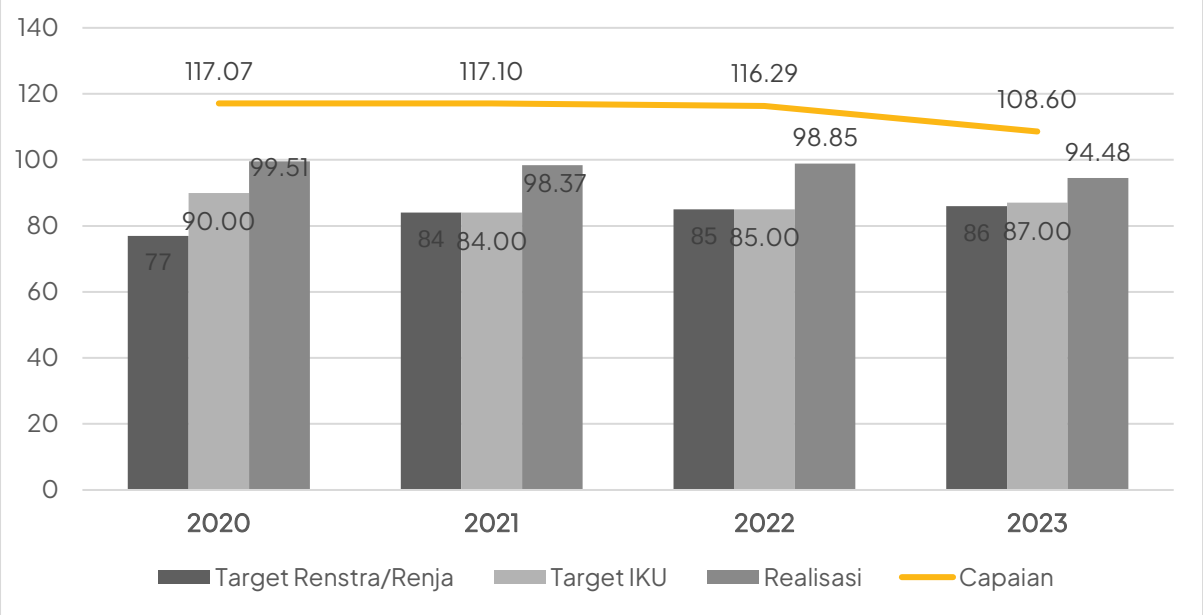

Dari grafik diatas terlihat bahwa capaian IKU mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun hal ini tidak bisa dibandingkan secara langsung dikarenakan IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya mengalami perubahan formulasi di tahun 2023, dalam lingkup nasional IKU ini juga tidak dapat dibandingkan.

SS-3. DUKUNGAN MANAJEMEN YANG EFEKTIF

Dukungan Manajemen yang Efektif dilakukan untuk memenuhi kepuasan kepada pengguna layanan atau *stakeholders*, yang sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan harus berdasar pada: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi empat buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut sebagai berikut.

Tabel 3. 13 : SS Dukungan Manajemen yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3	**Dukungan Manajemen yang Efektif**			**112,16**
3a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100,00%	116,49%	116,49
3b-CP	Nilai evaluasi reformasi birokrasi	86,00	88,82	103,28
3c-CP	Tingkat Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara	100,00%	116,5%	116,50
3d-CP	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3,00	4,00	120,00

Indeks capaian untuk SS ini adalah **112,16**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU adalah sebagai berikut.

3a-CP Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPL) merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

IKU ini mengukur IKPL (*output*) di tahun berjalan dan Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi SKPL tahun sebelumnya (proses) pada setiap Unit Eselon I/LNSW.
Layanan BPPK yang diukur kepuasan layananannya pada tahun 2022 dan 2023, yaitu:

1. E-Learning;
2. PJJ;
3. Pengelolaan Beasiswa; dan
4. SPMB PKN STAN.

IKU ini diukur berdasarkan dua komponen berikut:

1. Komponen I yang merupakan pembobotan dari realisasi IKPL 2023
2. Komponen II yang merupakan penyelesaian rekomendasi SKPL 2022.

FORMULA IKU

Realisasi	=	Nilai Komponen I (85%) + Nilai Komponen II (15%)

Nilai komponen II berasal dari penyelesaian rekomendasi di lingkungan BPPK, sehingga nilai setiap unit akan sama.
Nilai komponen II = (Jumlah rekomendasi yang telah ditindak lanjuti sampai tuntas / jumlah rekomendasi x 100) / 80%
Nilai maksimal komponen II adalah 120

Pada periode tahun 2023, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Dukungan Manajemen yang Efektif 3a-CP Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	12,5%	16,67%	16,67%	18%	18%	116,49%	116,49%	
Capaian	120	120	120	120	120	116,49	116,49	

Realisasi untuk komponen I diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Tim Peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2023 untuk masing-masing UE I/LNSW dan persentase tindaklanjut rekomendasi SKPL 2022 tertuang pada tabel berikut.

Unit	Indeks Kepuasan		Komponen II (15%)		Realisasi IKU
	IKPL	Konversi	Tindak Lanjut	Konversi	UE I
Setjen	4,28	83,63%	100%	18%	101,63%
DJA	4,28	83,63%	100%	18%	101,63%
DJP	4,25	83,05%	100%	18%	101,05%

Unit	Indeks Kepuasan		Komponen II (15%)		Realisasi IKU
	IKPL	Konversi	Tindak Lanjut	Konversi	UE I
DJBC	4,53	92,23%	100%	18%	110,23%
DJPB	4,6	97,75%	100%	18%	115,75%
DJKN	4,43	88,40%	100%	18%	106,40%
DJPK	4,37	85,85%	100%	18%	103,85%
DJPPR	4,45	89,25%	100%	18%	107,25%
Itjen	4,54	93,08%	100%	18%	111,08%
BPPK	4,67	98,49%	100%	18%	116,49%
LNSW	4,26	83,24%	100%	18%	101,24%

Sepanjang tahun 2023 belum ditemukan kendala dalam pencapaian IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Meskipun tidak terdapat kendala yang berarti dalam pencapaian IKU ini, banyak upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan target IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil SKPL tahun 2022;
2. Pelaksanaan pembahasan tindak lanjut rekomendasi SKPL tahun 2022 dengan Biro Organta;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit di lingkungan BPPK dalam pengumpulan *longlist* responden dan pelaksanaan penggalian data responden;
4. Penyampaian informasi pelaksanaan SKPL kepada pengguna layanan;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan Biro Organta dan enumerator dalam penggalian data SKPL

Berikut ini adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.

1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil SKPL tahun 2023;
2. Pemberian Layanan Tahun 2024.

Salah satu kejadian risiko (risk event) yang berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan adalah peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) tidak memperoleh pelayanan prima. Rencana mitigasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Mengkalkulasi kebutuhan sarana prasarana saat penyelenggaraan SPMB 2023	Bagian Keuangan dan Umum - PKN STAN	Sebelum Pelaksanaan SPMB dimulai

Hingga akhir tahun 2023, mitigasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Koordinasi terkait utilisasi server, pengecekan *hardware*, dan *software*;
2. Pelaksanaan Koordinasi dengan berbagai pihak terkait penyelenggaraan tes (misalnya LTMPT dan BKN);
3. Penetapan Pedoman umum SPMB 2023;
4. Pembuatan pusat layanan SPMB saat membuat susunan kepanitiaan SPMB 2023;
5. Penghitungan kebutuhan sarana prasarana saat penyelenggaraan SPMB 2023.

Langkah-langkah mitgasi tersebut telah berhasil menurunkan level risiko dari level tinggi ke level rendah. Berikut ini adalah grafik yang mengilustrasikan penurunan level risiko.

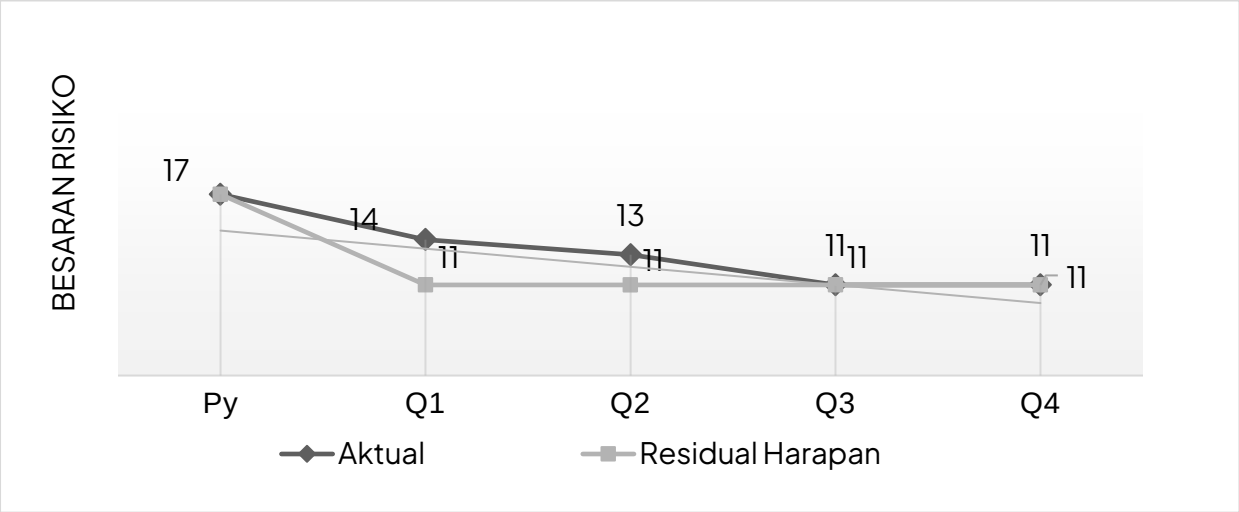

IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan merupakan IKU yang baru diterapkan pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dilihat perbandingannya dari tahun ke tahun. Namun salah satu komponen penghitungan IKU ini yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) merupakan IKU yang diterapkan sejak lama di BPPK sehingga dapat dilihat perbandingannya. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indeks kepuasan pengguna layanan dengan target pada rencana strategis dan rencana kerja tahun 2020-2023.

	2020	2021	2022	2023
Target Renstra BPPK	-	-	-	-
Target Renstra Kemenkeu	4.00	4.05	4.10	4.15
Target Renja	-	4.05	4.10	4.35
Target IKU	4.00	4.41	4.57	-
Realisasi IKU	4.41	4.63	4.58	4.67

3b-CP Nilai evaluasi reformasi birokrasi

IKU nilai evaluasi reformasi birokrasi bertujuan untuk memonitor ketercapaian indeks Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh KemenPANRB. Penilaian reformasi birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Kegiatan dimulai dengan Penilaian Mandiri (*self assessment*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan panduan yang diberikan oleh KemenPANRB melalui dua komponen. Adapun kedua komponen tersebut terbagi ke dalam komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil.

No	Komponen Penilaian
A	**KOMPONEN PENGUNGKIT**
I	**Pemenuhan/Mandatory (20%)**
1	Manajemen Perubahan
2	Deregulasi Kebijakan
3	Penataan dan Penguatan Organisasi
4	Penataan Tata Laksana
5	Penataan Sistem Manajemen SDM
6	Penguatan Akuntabilitas
7	Penguatan Pengawasan
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
II	**Hasil Antara (10%)**
III	**Reform (30%)**
B	**KOMPONEN HASIL**
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2	Kualitas Pelayanan Publik
3	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
4	Kinerja Organisasi

No	Komponen Penilaian
	Subtotal (40)

Realisasi capaian indeks nilai evaluasi reformasi birokrasi ini dikeluarkan oleh KemenPANRB. Ketercapaian Indeks Reformasi Birokrasi dikeluarkan oleh KemenpanRB dengan 7 kategori penilaian sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 - 100	Istimewa
2	A	>80 - 90	Memuaskan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik
4	B	>60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7	D	>0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Pada Periode tahun 2023, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Dukungan Manajemen yang Efektif 3b-CP Nilai evaluasi reformasi birokrasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	86	86	-	86	-	86	Max/TLKV
Realisasi	88,82	88,82	88,82	88,82	88,82	-	88,82	
Capaian	N/A	103,28	103,28	N/A	103,28	N/A	103,28	

Berikut ini adalah penghitungan capaian pada IKU Nilai evaluasi reformasi birokrasi.

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A	Komponen Pengungkit		
1	Pemenuhan	20	17,80
2	Hasil Antara Area Perubahan	10	8,47
3	Reform	30	25,80
Total Komponen Pengungkit		60	52,07

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
B	**Komponen Hasil**		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	9,23
2	Kualitas Pelayanan Publik	10	9,61
3	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10	9,18
4	Kinerja Organisasi	10	8,73
Total Komponen Hasil		40	36,75
INDEKS REFORMASI BIROKRASI		**100**	**88,82**

Dalam pencapaian IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi terdapat kendala yang dihadapi yaitu Peraturan Menpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 baru ditetapkan di tanggal 1 Maret 2023. Peraturan MenpanRB Nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi baru ditetapkan di tanggal 26 Juli 2023 sehingga belum ada sosialisasi tindak lanjut penilaian untuk periode tahun 2023 ini.

Meskipun terdapat kendala dalam pencapaian IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, namun realisasi IKU tersebut tetap diatas target yang ditetapkan. Berikut ini adalah upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi.

1. Pelaksanaan Koordinasi dengan PIC Inspektorat Jenderal (IR VII) Kementerian Keuangan terkait tindak lanjut peraturan yang telah terbit;
2. Pelaksanaan workshop terkait dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang berdampak terhadap pelaksanaan PMPRB di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2023;
3. Pengisian tanggapan BPPK terhadap Lembar Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenkeu 2022 yang diminta oleh KemenPAN RB;
4. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Tahun 2023 tanggal 2 Agustus 2023.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan di masa mendatang adalah sebagai berikut.

Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Melakukan koordinasi intensif dengan seluruh unit eselon I terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui WAG. 2. Koordinasi dengan Setjen dan Itjen terkait hasil pengisian tanggapan dan catatan dari MenPANRB berupa Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023 untuk semua unit eselon I. 3. Permintaan nama PIC Pengumpulan Bukti dari setiap subbagian di Sekretariat BPPK.	Bagian SDM dan KI	2024

IKU nilai evaluasi reformasi birokrasi mulai diimplementasikan di BPPK pada tahun 2022. IKU ini tidak tercantum dalam Renstra BPPK 2020-2024. Namun demikian, IKU ini tercantum dalam Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024.

Adapun perbandingan target dan realisasi IKU nilai evaluasi reformasi birokrasi dengan target Renstra Kementerian Keuangan 2020-2023 adalah sebagai berikut.

	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu	80,1	80,2	80,3	80,4
Target IKU	-	-	85	86
Realisasi IKU	-	-	88,69	88,82

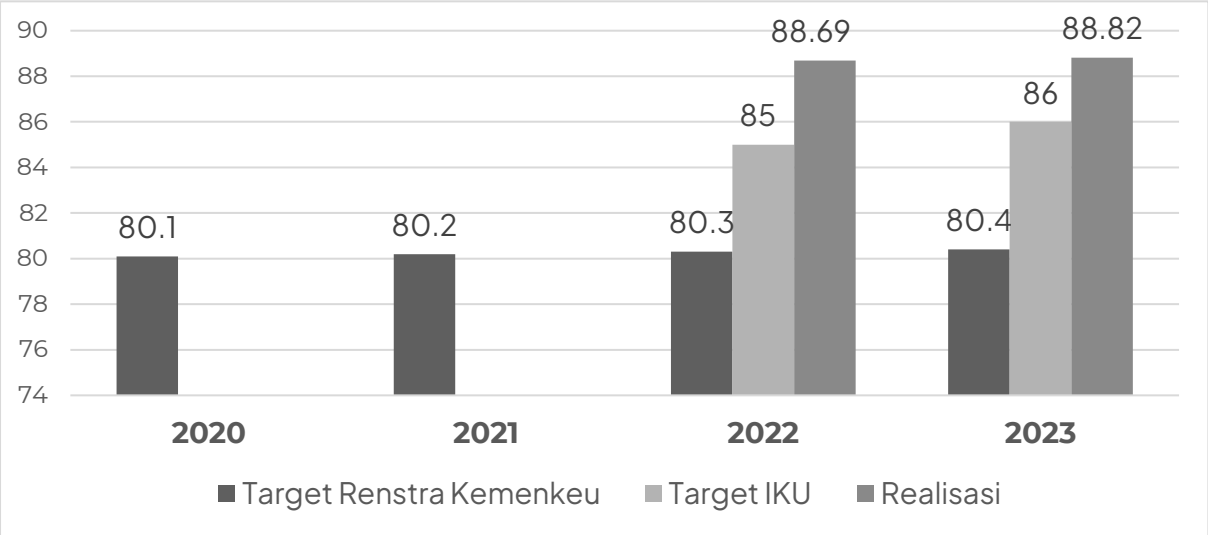

3c-CP Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara

IKU ini merupakan Cascade dari Setjen yang digunakan untuk mengukur peran Kemenkeu di dalam pemetaan dan pengembangan kompetensi pengelola keuangan

negara pada KLDI. BPPK berperan dalam pengembangan kompetensi bagi pengelola keuangan negara melalui pelatihan dan akreditasi dengan pengukuran pada jamlator, indeks kepuasan peserta pelatihan dan Indeks kepuasan Layanan Dukungan Pengembangan Kompetensi (Akreditasi) bagi Pengelola Keuangan Negara KLDI.

Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara pada BPPK diukur menggunakan indeks persepsi peserta pelatihan KLDI dan indeks kepuasan pelayanan pendampingan dalam rangka akreditasi program pelatihan di bidang keuangan negara bagi KLDI.

FORMULA IKU

Realisasi	=	Rata-rata Capaian Komponen A dan Komponen B

Komponen A:

Indeks Kepuasan Peserta (survei skala 1-5), target 4

- Indeks kepuasan peserta pelatihan KLDI adalah tingkat kepuasan peserta pelatihan KLDI yang meliputi evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan
- Evaluasi atas program di Kalender Pembelajaran dengan peserta berasal dari Non-Kemenkeu (kelas homogen KLID dan/atau Non-Kemenkeu)

Komponen B:

Indeks kepuasan Layanan Dukungan Pengembangan Kompetensi Bagi Pengelola Keuangan Negara KLDI (Target 3).

- Layanan yang disurvei adalah:
  a. Training of Trainers di bidang keuangan negara bagi pegawai LPP
     Dilakukan oleh Pusdiklat AP dan Pusdiklat KNPK. ToT diukur evaluasi pelaksanannya dengan skala 1-5
  b. Sosialisasi dan Pendampingan Proses Bisnis Akreditasi
     Dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan. Pusdiklat AP dan KNPK terlibat sesuai kebutuhan/permintaan dari Setban. Diukur evaluasi pelaksanaannya dengan skala 1-5
  c. Pemantauan dan Evaluasi
     Dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan. Dinilai menggunakan evaluasi layanan skala 1-5.

- ToT di bidang keuangan negara bagi Pegawai LPP, dikerjakan oleh Pusdiklat AP dan KNPK.
- Sosialisasi dan Pendampingan proses bisnis, dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan. Pusdiklat AP dan KNPK terlibat sesuai kebutuhan/permintaan dari Setban.
- Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Sekretariat Badan, dinilai menggunakan evaluasi layanan.
- Survei dilakukan oleh masing-masing penyelenggara.

Realisasi dan capaian IKU Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Dukungan Manajemen yang Efektif 3c-CP Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	N/A	110,63%	110,63%	116,31%	116,31%	116,5%	116,5%	
Capaian	N/A	110,63	110,63	116,31	116,31	116,5	116,5	

Realisasi IKU ini pada periode s.d. Desember 2023 berasal dari indeks kepuasan peserta pelatihan non-Kemenkeu, dengan rata-rata sebesar 4,52 dari target 4 (nilai 113), dan Indeks kepuasan 4,75 (skala 5) dari target 3 (nilai 120). Realisasi IKU menjadi (113+120)/2 = 116,50

Komponen A

Unit	s.d. Jun	s.d. Jul	s.d. Ags	s.d. Sept	s.d. Okt	s.d. Nov	s.d. Des
Pusdiklat AP	4.41	4.41	4.48	4.48	4.48	4.5	4.5
Pusdiklat KNPK	4.44	4.47	4.5	4.53	4.53	4.54	4.54
BPPK	**4.4250**	**4.44**	**4.49**	**4.51**	**4.51**	**4.52**	**4.52**

Komponen B

Unit	s.d. Jun	s.d. Jul	s.d. Ags	s.d. Sept	s.d. Okt	s.d. Nov	s.d. Des
Pusdiklat AP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.72	4.83
Pusdiklat KNPK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Unit	s.d. Jun	s.d. Jul	s.d. Ags	s.d. Sept	s.d. Okt	s.d. Nov	s.d. Des
Setban	N/A	N/A	N/A	4.66	4.66	4.66	4.66
BPPK	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**4.66**	**4.66**	**4.69**	**4.75**

Pada pencapaian IKU Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara belum terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi capaian IKU ini. Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk membantu pencapaian IKU Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Untuk indeks kepuasan pelayanan pendampingan dalam rangka akreditasi
   a. Pelaksanaan sosialisasi layanan akreditasi melalui Forum Pembelajaran Keuangan Negara.
   b. Pelaksanaan pendampingan proses bisnis akreditasi

      Akreditasi program pada BPSDM Provinsi Jawa Barat (selesai)

      1. Penetapan Dokumen Hasil Penilaian Akhir Akreditasi Program pada BPSDM Prov. Jawa Barat (KEPKABAN Nomor 95 Tahun 2023 dan Sertifikat Nomor 1/95/2023)
      2. Penyampaian hasil penilaian akhir Akreditasi Program pada BPSDM Prov. Jawa Barat pada 15 Mei 2023 (UND-167/PP.1/2023)
      3. Laporan pelaksanaan Akreditasi Program pada BPSDM Prov. Jawa Barat (LAP-7/PP.1/2023)

      Akreditasi program pada BPSDM Provinsi Jawa Timur (selesai)

      1. Penetapan Dokumen Hasil Penilaian Akhir Akreditasi Program pada BPSDM Prov. Jawa Barat (KEPKABAN Nomor 95 Tahun 2023 dan Sertifikat Nomor 1/95/2023)
      2. Penyampaian hasil penilaian akhir Akreditasi Program pada BPSDM Prov. Jawa Barat pada 15 Mei 2023 (UND-167/PP.1/2023)
      3. Laporan pelaksanaan Akreditasi Program pada BPSDM Prov. Jawa Barat (LAP-7/PP.1/2023)
2. Pemantauan dan Evaluasi
   a. Pembentukan Tim Evaluator pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta melalui KEP-13/PP/2023
   b. Observasi secara daring pelaksanaan program pelatihan terakreditasi pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta

3. Penyusunan survei kepuasan layanan akreditasi program pada https://bit.ly/Survei_Akreditasi.
4. Penyusunan penyempurnaan pedoman akreditasi program
   a. Telah ditetapkan PerKaban nomor Per-2/PP/2023 tentang Pedoman Akreditasi Program Pelatihan Teknis di Bidang Keuangan Negara
5. Penyusunan marketing kit akreditasi program
   a. *Landing page* Akreditasi Program : https://bppk.kemenkeu.go.id/akreditasi/
   b. Video, pamflet, dan bahan *Stakeholder Gathering* bagi BDK
   c. Layanan *contact center* akreditasi program melalui nomor whatsapp dan email : bppk.hubungikami@kemenkeu.go.id.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode mendatang adalah sebagai berikut.

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
Pemantauan dan Evaluasi	Tim Evaluator	2024
Koordinasi penyelenggaraan Pelatihan dengan Peserta dari KLID pada Pusdiklat AP dan KNPK	Bagian OTL (Setban)	2024

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh pencapaian IKU Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara adalah Asistensi dalam rangka penyiapan Akreditasi kurang tepat. Rencana mitigasi yang disusun adalah sebagai berikut.

Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab	Periode
Pemantauan dan evaluasi BPSDM Prov. DKI Jakarta	Tim Evaluator	Sepanjang Tahun
Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pelatihan dengan Peserta dari KLID pada Pusdiklat AP dan KNPK	Bagian OTL	
Penyebaran survei kepuasan layanan akreditasi program secara formal melalui ND Sekretaris Badan	Bagian OTL	Desember 2023
Penyusunan *marketing kit* akreditasi program	Sekretariat BPPK, Pusdiklat AP dan Pusdiklat KNPK	Oktober 2023

Hingga akhir Tahun 2023, mitigasi risiko yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan proses bisnis akreditasi.
2. Pelaksanaan sosialisasi layanan akreditasi melalui Forum Pembelajaran Keuangan Negara yang mengundang peserta dari berbagai KLID.
3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program pelatihan terakreditasi pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
4. Penyusunan *marketing kit* berupa landing page akreditasi program, video & pamflet stakeholder gathering, layanan *contact center*.

Mitigasi risiko yang dilaksanakan berhasil membuat risiko asistensi dalam rangka penyiapan akreditasi kurang tepat tetap berada pada level rendah. Berikut ini adalah grafik yang mengilustrasikan tren risiko asistensi dalam rangka penyiapan akreditasi kurang tepat.

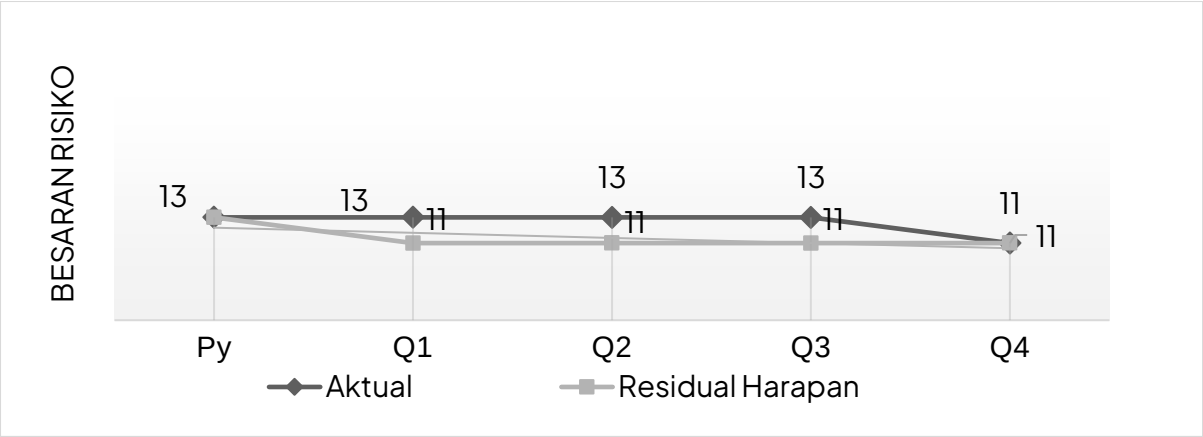

IKU Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara merupakan IKU yang baru di tahun 2023 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini juga tidak terdapat dalam Renstra BPPK.

Target 2022	Realisasi 2022	Target Renstra	Target 2023	Realisasi 2023
-	-	-	100%	116,5%

3d-CP Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu

IKU ini bertujuan untuk mendukung penerapan digitalisasi layanan TIK Kementerian Keuangan. Indikator kinerja Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu merupakan indikator

yang mengukur penerapan digitalisasi layanan dan proses bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan dalam indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan *e-government* di lingkungan Kementerian Keuangan, mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, serta mendukung penyediaan layanan dan pelaksanaan proses bisnis secara efektif dan efisien.

Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu memiliki 3 (tiga) kegiatan yaitu:

Kegiatan IKU 1: Tingkat Penyelesaian Duplikasi Aplikasi

Tingkat penyelesaian duplikasi aplikasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

1. Rencana penghapusan/integrasi/simplifikasi aplikasi/sistem TIK di lingkungan Kementerian Keuangan [40%]
2. Pelaksanaan tindak lanjut rencana tersebut [60%]

Kegiatan IKU 2: Tingkat Pengembangan Digitalisasi Layanan Kemenkeu

Tingkat pengembangan digitalisasi layanan Kemenkeu diukur dari kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi proses bisnis/sistem TIK [25%]
2. Penyusunan atau perubahan regulasi terkait digitalisasi proses bisnis dan laporan [25%]
3. Pengembangan sistem [50%]
4. Piloting sistem [20%]

Kegiatan IKU 3: Tingkat Implementasi e-Perjadin

Detail kegiatan pada Tingkat Implementasi e-Perjadin adalah sebagai berikut

1. Penyusunan regulasi e-perjadin [20%]
2. Pengembangan aplikasi e-perjadin [25%]
3. Manajemen perubahan dan sosialisasi [30%]
4. Uji coba implementasi e-Perjadin [25%]

FORMULA IKU

$$\text{Realisasi} = \frac{(\text{Realisasi Indeks Kegiatan 1} + \text{Realisasi Kegiatan 2} + \text{Realisasi Kegiatan 3})}{\text{3 Kegiatan}}$$

Keterangan:

Formula disesuaikan dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit.

Tingkat penyelesaian duplikasi aplikasi

Indeks 1 -> Jika realisasi kegiatan di bawah 80%

Indeks 2 -> Jika realisasi kegiatan 80%-90%

Indeks 3 -> Jika realisasi kegiatan 100%

Indeks 4 -> Jika realisasi kegiatan melebihi 100%

Tingkat Pengembangan Digitalisasi Layanan Kemenkeu

Indeks 1 -> Jika realisasi kegiatan di bawah 80%

Indeks 2 -> Jika realisasi kegiatan 80%-90%

Indeks 3 -> Jika realisasi kegiatan 100%

Indeks 4 -> Jika realisasi kegiatan melebihi 100%

Tingkat Implementasi e-Perjadin

Indeks 1 -> Jika realisasi kegiatan di bawah 80%

Indeks 2 -> Jika realisasi kegiatan 80%-90%

Indeks 3 -> Jika realisasi kegiatan 100%

Indeks 4 -> Jika realisasi kegiatan melebihi 100%

Realisasi dan capaian IKU Indeks digitalisasi layanan Kemenkeuu pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Dukungan Manajemen yang Efektif 3d-CP Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	3	3	-	3	3	3	Max/TLKV
Realisasi	N/A	3	3	N/A	3	4	4	
Capaian	N/A	100	100	N/A	100	120	120	

Target IKU Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu di BPPK pada tahun 2023 adalah 4 sedangkan realisasi 3 sehingga capaian IKU ini adalah 133,33 namun sesuai dengan KMK

300 tahun 2022 maka capaian maksimal yang dapat diakui adalah 120. Berikut ini adalah rincian realisasi IKU Indeks digitalisasi layanan pada unit-unit di lingkungan Kemenkeu.

Unit	Indeks dan Capaian Sub IKU (Target 3 dari Skala 4)			
	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
Setjen	N/A	3,5	N/A	3,67
DJA	N/A	3	N/A	3,33
DJP	N/A	3,5	N/A	4,00
DJBC	N/A	3	N/A	3,50
DJPb	N/A	3	N/A	3,33
DJKN	N/A	3,5	N/A	4,00
DJPK	N/A	3,5	N/A	3,67
DJPPR	N/A	3,5	N/A	3,67
Itjen	N/A	3,5	N/A	3,67
BKF	N/A	3,5	N/A	3,67
BPPK	N/A	3	N/A	4,00
LNSW	N/A	3	N/A	4,00

Kendala yang muncul pada pencapaian IKU ini adalah Manual IKU baru disampaikan pada 10 Maret 2023, sehingga perlu segera mengidentifikasi kegiatan yang perlu dilakukan untuk pencapaian IKU ini. BPPK perlu mengidentifikasi aplikasi apa saja yang dapat dijadikan *trigger* untuk dihubungkan dengan aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK).

Beberapa Tindakan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023 dalam rangka pencapaian IKU Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan *weekly open class* terkait dengan *collaboration tools* yang dilaksanakan oleh Pusintek.
2. Pelaksanaan kegiatan Sarasehan TIKMP BPPK dengan pembahasan *collaboration tools*.

Rencana aksi untuk periode berikutnya antara lain:

1. Identifikasi aplikasi BPPK yang dapat dihubungkan dengan aplikasi Kemenkeu Satu
2. Proses menghubungkan dengan aplikasi Kemenkeu SatuProses menghubungkan dengan aplikasi ABK.

IKU Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu merupakan IKU yang baru di tahun 2023 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini juga tidak terdapat dalam Renstra BPPK.

Target 2022	Realisasi 2022	Target Renstra	Target 2023	Realisasi 2023
-	-	-	3	4

SS-4. PEMBELAJARAN YANG INKLUSIF, KREATIF, DAN BERDAMPAK

Pembelajaran yang inklusif, kreatif dan berdampak adalah pembelajaran yang pembelajaran yang memiliki kebaruan dalam penyampaiannya, yaitu pembelajaran baru yang bersifat ekspansif kreatif, dan pembelajaran untuk daerah yang sifatnya ekspansif inklusif. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan telah dijamin kualitasnya mulai dari proses analisis kebutuhan pembelajaran, penyusunan desain pembelajaran, validasi program, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, sampai dengan sarana dan prasarana pembelajaran, telah dipastikan sesuai dengan standar minimal yang telah diatur.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi dua buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 14 : SS Pembelajaran yang Inklusif, Kreatif, dan Berdampak

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
4	**Pembelajaran yang Inklusif, Kreatif, dan Berdampak**			**119,50**
4a-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang inklusif dan kreatif	4,00	4,76	119
4b-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4,00	5,00	120

Indeks capaian untuk SS ini adalah **119,50**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU adalah sebagai berikut.

4a-N Tingkat implementasi pembelajaran yang inklusif dan kreatif

IKU ini digunakan untuk mengukur kebaruan dalam *delivery* pembelajaran BPPK. Tujuan IKU Tingkat implementasi pembelajaran yang inklusif dan kreatif adalah untuk mengukur kebaruan dalam delivery pembelajaran BPPK seperti PJJ, E-learning, KCT dan KCOC. Pengukuran dilakukan menggunakan indeks persepsi peserta sesuai dengan ketentuan evaluasi pembelajaran yang berlaku di BPPK. Evaluasi penyelenggaraan PJJ dilakukan sesuai PER-6/PP/2021 tentang Pedoman PJJ, atau ketentuan penggantinya. Evaluasi penyelenggaraan E-learning dilakukan sesuai dengan PER-2/PP/2019 tentang Pedoman E-learning, atau ketentuan penggantinya. Bentuk evaluasi penyelenggaraan KCOC dan KCT mengacu pada ND-203/PP/2020 tentang kegiatan Kemenkeu Corpu Talk dan *Kemenkeu Corpu Open Class*, dan sesuai dengan evaluasi penyelenggaraan yang dilaporkan pada Laporan kegiatan KCT dan KCOC yang diatur pada SE-2/PP/2021 tentang Juknis Pelaporan Kegiatan KCT, KCOC, *Academic Forum Series*, dan kegiatan lain yang sejenis.

Pengukuran dilakukan pada:

1. **Program-program Reguler Hasil AKP yang dilaksanakan Pusdiklat selama ini**
   Evaluasi atas program di Kalender Pembelajaran dengan peserta berasal dari Kemenkeu (kelas homogen), di luar program yang masuk kriteria B dan C
2. **Program pembelajaran baru yang sifatnya ekspansif kreatif**
   Contoh program yang memiliki kebaruan adalah:
   - Pembelajaran Terintegrasi
   - *Co-Creation Learning*
   - Program Predep yang ditambah pengutan karakter (leadership)
   - Program lain yang *metode delivery*-nya belum dilakukan pada tahun sebelumnya

   Kriteria pembelajaran yang memiliki kebaruan adalah Program pembelajaran yang memiliki kebaruan pada salah satu atau beberapa tahapan ADPPE yang belum dilakukan pada tahun sebelumnya, misalnya kebaruan tahapan Analisis, kebaruan tahapan Desain: Action mapping dalam proses desain pembelajaran, kebaruan tahapan Pengembangan: E-learning Bela Negara, yang melibatkan komunitas dalam

penyusunan media e-learning dengan pendekatan cerita film, kebaruan tahapan Pelaksanaan: squad pembelajaran dan kKebaruan tahapan Evaluasi.

3. **Program pembelajaran untuk daerah yang sifatnya ekspansif inklusif**
   Evaluasi atas program di Kalender Pembelajaran dengan peserta berasal dari Non-Kemenkeu (kelas homogen KLID dan/atau Non-Kemenkeu) dan kelas heterogen (peserta campuran dari Kemenkeu dan Non-Kemenkeu)

FORMULA IKU

Realisasi	=	Rata-rata indeks perspesi peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan di BPPK

Indeks persepsi terdiri dari:

1. Program-program Reguler Hasil AKP yang dilaksanakan Pusdiklat selama ini (bobot 70%);
2. Program pembelajaran baru yang sifatnya ekspansif kreatif (bobot 20%); dan
3. Program pembelajaran untuk daerah yang sifatnya ekspansif inklusif (bobot 10%).

Apa bila dari seluruh program pembelajaran yang diselenggarakan oleh suatu unit tidak terdapat program yang masuk ke dalam kategori tertentu, maka realisasi dihitung hanya dari komponen yang diselenggarakan.

Realisasi dan capaian IKU Tingkat implementasi pembelajaran yang inklusif dan kreatif pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Pembelajaran yang Inklusif, Kreatif, dan Berdampak 4a-N Tingkat implementasi pembelajaran yang inklusif dan kreatif							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/TLKV
Realisasi	4,76	4,72	4,72	4,74	4,74	4,76	4,76	
Capaian	119	118	118	118,5	118,5	119	119	

- Program-program Reguler Hasil AKP yang dilaksanakan Pusdiklat selama ini, realisasi 4,77 (bobot 70%);
- Program pembelajaran baru yang sifatnya ekspansif kreatif, realisasi 4,75 (bobot 20%); dan
- Program pembelajaran untuk daerah yang sifatnya ekspansif inklusif, realisasi 4,67 (bobot 10%).

Realisasi IKU = (70%x4,77) + (20%x4,75) +(10%x4,67) = **4,76**

Kendala yang dihadapi pada pencapaian IKU ini adalah penyusunan program pembelajaran baru yang bersifat ekspansif kreatif memiliki tantangan tersendiri, mulai dari penentuan ide dan kesesuaian dengan ketentuan yang telah berlaku.

Meskipun menemui kendala dalam pencapaian IKU, target IKU di tahun 2023 tetap dapat terpenuhi. Berikut ini adalah upaya yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023.

1. Pelaksanaan analisis kebutuhan pembelajaran dan penyelenggaraan program pembelajaran dari awal tahun 2023;
2. Penyelenggaraan pembelajaran pada Triwulan III 2023 sesuai standar mutu di BPPK.

Adapun rencana aksi di masa mendatang adalah sebagai berikut.

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
Penyelenggaraan program pembelajaran regular, program pembelajaran kreatif, dan program pembelajaran untuk daerah	Pusdiklat dan BDK	2024

IKU Tingkat implementasi pembelajaran yang inklusif dan kreatif adalah IKU yang baru di tahun 2023 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya. Indikator kinerja tersebut juga tidak terdapat dalam dokumen Renstra BPPK.

Target 2022	Realisasi 2022	Target Renstra	Target 2023	Realisasi 2023
-	-	-	4	4,76

4b-N Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran

IKU ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya pembelajaran di lingkungan BPPK yang terstandardisasi dengan kualitas yang terjaga dalam memenuhi kepuasan peserta pembelajaran dan mencapai target kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

IKU Indeks pemenuhan standar mutu mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pembelajaran dengan berdasar pada standar mutu pembelajaran yang berlaku di BPPK. Pengukuran Kualitas Pembelajaran mengacu pada Keputusan Kepala BPPK terkait penjaminan mutu yang berlaku, terkait:

1. analisis kebutuhan pembelajaran;
2. desain pembelajaran;
3. validasi program;
4. penyelenggaraan pembelajaran;
5. evaluasi pembelajaran; dan
6. sarana dan prasarana pembelajaran.

Pelaksanaan penjaminan mutu dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan secara semesteran/tahunan sesuai kebutuhan. Kriteria yang diuji dalam penjaminan mutu meliputi kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen, kualitas isi, akurasi waktu, dan keamanan informasi. Ruang lingkup dan pembobotan penilaian penjaminan mutu pembelajaran pada Pusdiklat dan Balai Diklat mengikuti Standar Mutu Pembelajaran terbaru. Terdapat penyempurnaan instrument/standar mutu pada tahun 2023.

FORMULA IKU

Realisasi	=	80% indeks hasil penjaminan mutu	+	20% indeks hasil penyelesaian rekomendasi

Indeks 5 = 90 ≤ x ≤100

Indeks 4 = 80 ≤ x <90

Indeks 3 = 70 ≤ x <80

Indeks 2 = 50 ≤ x <70

Indeks 1 = 0 ≤ x < 50

Realisasi dan capaian IKU Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Adapun target IKU adalah 4 sedangkan realisasi di tahun 2023 sebesar 5 sehingga capaian IKU Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran adalah 125 namun sesuai dengan KMK 300 Tahun 2022 maka capaian maksimal 120.

BPPK	SS: Dukungan Manajemen yang Efektif 4b-N Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	4	4	
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	Max/TLKV
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Berikut ini adalah perincian realisasi Indeks pemenugan standar kualitas pembelajaran pada unit-unit di BPPK.

No	Unit	Nilai Standar Mutu (bobot 80%)		Nilai Penyelesaian TL (Bobot 20%)		Indeks Akhir
		Nilai	Indeks	Nilai	Indeks	
1	Pusdiklat KM	94.15	5	92.31	5	5
2	Pusdiklat AP	98.05	5	92.68	5	5
3	Pusdiklat Pajak	99.09	5	95.83	5	5
4	Pusdiklat BC	98.5	5	100	5	5
5	Pusdiklat KNPK	98.05	5	94.44	5	5
6	Pusdiklat KU	98.61	5	100	5	5
7	BDK Medan	95.27	5	100	5	5
8	BDK Pekanbaru	91.09	5	91.67	5	5
9	BDK Palembang	98.38	5	87.5	4	4.8
10	BDK Cimahi	96.56	5	100	5	5

No	Unit	Nilai Standar Mutu (bobot 80%)		Nilai Penyelesaian TL (Bobot 20%)		Indeks Akhir
		Nilai	Indeks	Nilai	Indeks	
11	BDK Yogyakarta	97.32	5	77.78	3	4.6
12	BDK Malang	97.55	5	100	5	5
13	BDK Denpasar	97.23	5	100	5	5
14	BDK Pontianak	98.56	5	100	5	5
15	BDK Balikpapan	93.05	5	100	5	5
16	BDK Makassar	92.73	5	80	3	4.6
17	BDK Manado	99.77	5	100	5	5
18	BDPim Magelang	98	5	100	5	5
	BPPK	**96.78**	5	**95.12**	5	5

Kendala yang muncul dalam pelaksanaan IKU ini adalah perlu adanya penyempurnaan standar mutu pembelajaran tahun 2023, sehingga implementasinya tergantung seberapa cepat standar mutu ini dapat ditetapkan. Meskipun terdapat kendala dalam pencapaian IKU, namun IKU Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran tetap dapat tercapai. Berikut ini adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU ini sepanjang tahun 2023.

1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan audit internal penjaminan mutu oleh Sekretariat Badan ke seluruh Pusdiklat dan BDK.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada masa mendatang adalah sebagai berikut.

1. Penyempurnaan Instrument Penjaminan Mutu
2. Audit Internal Penjaminan Mutu

IKU Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran sudah diimplementasikan sejak lama di BPPK. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi IKU tersebut dari tahun 2020-2023.

Tabel 3. 15 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran

	2020	2021	2022	2023
Target Renstra	4	4	5	5
Target IKU	4	100	4	4
Realisasi IKU	5	100	5	5

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 target merupakan nilai 100 dari skala 100, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terdapat perbedaan nama dan komponen IKU dimana IKU juga mengukur indeks pemenuhan validasi program pembelajaran selain standar kualitas pembelajaran. Untuk target dan realisasi indikator standar kualitas pembelajaran saja pada tahun 2021 adalah 5. Grafik berikut menggambarkan target dan realisasi IKU yang hanya mengukur indikator standar kualitas pemblajaran.

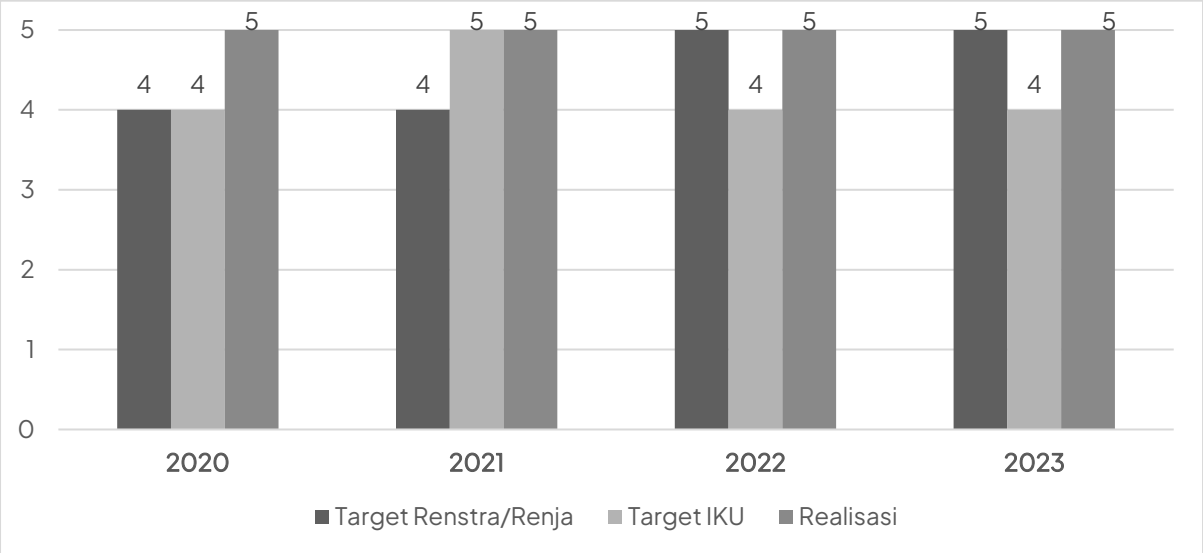

SS-5. AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI YANG KREDIBEL

Sertifikasi kompetensi yang kredibel adalah proses pengakuan kompetensi di bidang keuangan negara yang dilaksanakan dengan mengacu pada standar kompetensi, sesuai dengan kebutuhan unit pengguna dan hasil sertifikasinya dapat dipercaya.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan sebuah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan berikut.

Tabel 3. 16 : Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi yang Kredibel

Kode	*Indikator Kinerja Utama*	*Target*	*Realisasi*	*Capaian*
5	**Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi yang Kredibel**			**114,27**
5a-N	Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi	78.00%	89.13%	114,27

Indeks capaian untuk SS ini adalah **114,27**. Adapun perincian dan penjelasan IKU pada SS "Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi yang Kredibel" ini adalah sebagai berikut.

5a-N Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi

IKU ini bertujuan mengukur kesiapan KLDI untuk dilakukan akreditasi pada program pelatihan di bidang keuangan negara. Pengukuran dilakukan untuk melihat efektifitas pendampingan yang dilakukan oleh BPPK sehingga KLDI siap untuk diakreditasi, dengan minimal kesiapan 70%; dan memastikan bahwa penyelenggaraan sertifikasi diselenggarakan sesuai janji layanan dan ketentuan yang berlaku.

IKU persentase kualitas implementasu program akreditasi dan sertifikasi terdiri dari dua komponen sub IKU berikut:

1. Persentase kesiapan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara;
2. Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi.

Persentase kesiapan Akreditasi Program Pelatihan Bidang Keuangan Negara , diukur *self assessment* dan/atau telaahan kesiapan KLDI dalam akreditasi program pelatihan teknis di bidang keuangan negara.

Kesiapan KLID untuk dilakukan akreditasi diukur pada unsur-unsur berikut:

a. Perencanaan program pelatihan
b. Penyelenggaraan program pelatihan
c. Evaluasi program pelatihan
d. Hasil penyelenggaraan program pelatihan
e. Pembiayaan program pelatihan
f. Sarana pendukung program pelatihan

Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi mengukur tingkat kepuasan peserta atas layanan program sertifikasi dan tingkat kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi.

Aspek layanan yang dinilai meliputi:

a. penyampaian informasi terkait penyelenggaraan ujian (waktu dan tempat);
b. alokasi waktu ujian
c. kelayakan tempat dan sarpras ujian;
d. informasi terkait hasil ujian;
e. profesionalitas petugas saat ujian.

Aspek kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi meliputi:

a. penyiapan sarana dan prasarana;
b. penyiapan naskah soal ;
c. penyiapan administrasi ujian;
d. ketersediaan tim penguji sebelum ujian;
e. kesesuaian pelaksanaan ujian dengan jadwal;
f. ketersediaan dokumentasi ujian.

FORMULA IKU

Realisasi = (Kesiapan Akreditasi x 50%) + (Implementasi sertifikasi x 50%

- Kesiapan akreditasi = Persentase kesiapan KLDI untuk di akreditasi berdasarkan self assessment dan/atau telaahan
- Implementasi sertifikasi = Realisasi = (40% x Persentase kepuasan peserta atas penyelenggaraan sertifikasi/kesesuaian janji layanan) + (60% x Persentase kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi)

Realisasi dan capaian IKU Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi yang Kredibel 5a-N Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	78%	78%	
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89,13%	89,13%	Max/TLKV
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	114,27	114,27	

Realisasi IKU diperoleh dari kesiapan akreditasi dan implementasi sertifikasi. Untuk kesiapan akreditasi di tahun 2023, nilai diperoleh dari nilai akreditasu BPSDM Jawa Barat.

Program Pelatihan	Nilai
Program Pelatihan Teknis Perencanaan Penganggaraan	76.5
Program Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan	79
Program Pelatihan Teknis Pengelolaan Aset	83.5
Program Pelatihan Teknis Pajak Daerah	83
Realisasi	**80.5**

Untuk implementasi sertifikasi diperoleh dari kepuasan peserta sertifikasi yang diukur melalui survei evaluasi dengan skala 4 yang dilakukan ketika ujian berlangsung ataupun melalui website sebagai bentuk konfirmasi pengambilan sertifikat. Peserta dinyatakan puas apabila menilai ≥ 3 pada minimal 50% aspek yang dinilai. Perincian nilai implementasi sertifikasi adalah sebagai berikut.

Nama Program	Kesesuaian	Kepuasan	Realisasi
Pusdiklat AP			
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Anggaran	100%	N/A	N/A
Pusdiklat KNPK			
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	100%	100%	100%

Nama Program	Kesesuaian	Kepuasan	Realisasi
Uji Kompetensi Penata Laksana Barang Mahir Tahun 2023			
Uji Kompetensi Penilai Properti Dasar Bagi Mahasiswa PKN STAN			
Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pelelang dalam rangka Kenaikan Jabatan Pelelang Ahli Muda ke Pelelang Ahli Madya			
Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pelelang dalam rangka Pengangkatan Pelelang Ahli Pertama Tahun 2023			
Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dalam rangka Kenaikan Jenjang Penilai Pemerintah Ahli Pertama ke Penilai Pemerintah Ahli Muda Tahun 2023			
Pusdiklat Bea dan Cukai			
Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Februari	100%	100.00%	100.00%
Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Juni			
Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Oktober			
PKN STAN			
Uji Kompetensi Pajak	100%	83.13%	93.25%
Sertifikasi Penilai Properti Dasar			
Ujian Sertifikasi ICAEW dan Ujian Sertifikasi CGAAB			
Sertifikasi Bendahara dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1			
Sertifikasi Penilai Properti Dasar			
Sertifikasi Akuntansi Pemerintah			
Uji Kompetensi Pajak			
Sertifikasi Bendahara			
BPPK	**100%**	**94,38%**	**97,75%**

Realisasi Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi = (50% x 80,5) + (50% x 97,75%) = 89,13%

Sepanjang tahun 2023 belum terdapat kendala yang dapat menghambat IKU ini. Target IKU Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi pada tahun 2023 dapat telampui, berikut ini adalah upaya-upaya yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023.

1. Pelaksanaan akreditasi program pada BPSDM Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur;
2. Pelaksanaan Identifikasi kebutuhan sertifikasi tahun 2023;
3. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi JFAA oleh Pusdiklat AP, dengan 34 responden seluruhnya puas terhadap penyelenggaraan sertifikasi
4. Pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Ahli Kepabeanan oleh Pusdiklat BC dengan rincian SAK bulan Februari: 362 responden, seluruhnya puas terhadap penyelenggaraan sertifikasi. SAK bulan Juni: 389 responden, seluruhnya puas terhadap penyelenggaraan sertifikasi. SAK bulan Oktober: sedang dalam proses, sehingga belum masuk perhitungan IKU.
5. Pelaksanaan berbagai sertifikasi pada Pusdiklat KNPK, antara lain Ujikom JF AKPD, Ujikom JF Pelelang, dll. Dari total 123 peserta, seluruh peserta menyatakan puas terhadap layanan sertifikasi.
6. Pelaksanaan berbagai kegiatan Sertifikasi pada PKN STAN, antara lain uji kompetensi pajak, sertifikasi penilaia property dasar, ujian sertifikasi ICAEW, ujian sertifikasi CGAAB, Sertifikasi Bendahara, Sertifikasi PBJ level 1, Sertifikasi Penilai Properti Dasar, dan Sertifikasi Akuntansi Pemerintah.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada periode selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Persiapan, pelaksanaan dan pemantauan proses akreditasi;
2. Persiapan proses sertifikasi dan pelaksanaan uji kompetensi

Terdapat dua kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi adalah Risiko Peserta training of trainers tidak memenuhi batas syarat kelulusan dan Risiko Asistensi yang tidak tepat. Berikut ini adalah rencana mitigasi yang disusun untuk Risiko Peserta *training of trainers* tidak memenuhi batas syarat kelulusan.

Rencana Mitigasi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Melakukan pembahasan desain pembelajaran ToT perencanaan anggaran dan aset bagi calon trainer pada BPSDM Provinsi Jabar dalam waktu dekat dan melakukan koordinasi dengan BDK Cimahi terkait rencana penyelenggaraannya	Pusdiklat AP	Oktober 2023
Persiapan melaksanakan ToT pengembangan kompensi pengelola keuangan negara	Setban, Pusdiklat AP dan Pusdiklat KNPK	Triwulan III 2023
Mempersiapkan *learning material* tepat waktu	Pusdiklat AP dan Pusdiklat KNPK	Sepanjang waktu
Pengecekan sarana dan prasarana pembelajaran	Pusdiklat AP dan Pusdiklat KNPK	Sepanjang waktu

Pada tahun 2023, mitigasi yang telah dilaksanakan terkait Risiko Peserta training of trainers tidak memenuhi batas syarat kelulusan adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan koordinasi kepada stakeholders Pengguna untuk mengkonfirmasi komitmen dan kesesuaian
2. Pelaksanaan koordinasi dari Pusdiklat AP dengan bpsdm untuk memfasilitasi jika selain pemda yang akan mengikuti ToT
3. Pelaksanaan Koordinasi internal Setban, Pusdiklat AP dan Pusdiklat KNPK

Mitigasi risiko yang telah dilaksankaan sepanjang tahun 2023 berhasil menurunkan level Risiko Peserta *training of trainers* tidak memenuhi batas syarat kelulusan dari level sedang ke level renah. Berikut ini adalah kurva yang menggambarkan tren risiko tersebut.

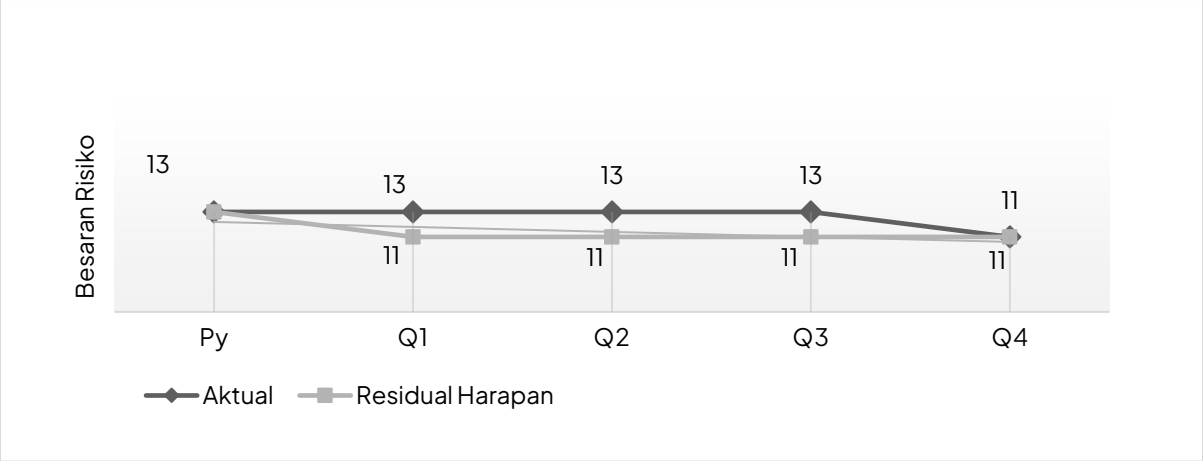

Kejadian risiko (*risk event*) kedua yang berpotensi berpengaruh terhadap Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi adalah Risiko Asistensi yang tidak tepat. Berikut ini adalah rencana mitigasi yang disusun untuk Risiko asistensi yang tidak tepat.

Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab	Periode
Pemantauan dan evaluasi BPSDM Prov. DKI Jakarta	Tim Evaluator	Sepanjang Tahun
Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pelatihan dengan Peserta dari KLID pada Pusdiklat AP dan KNPK	Bagian OTL	
Penyebaran survei kepuasan layanan akreditasi program secara formal melalui ND Sekretaris Badan	Bagian OTL	Desember 2023
Penyusunan *marketing kit* akreditasi program	Sekretariat BPPK, Pusdiklat AP dan Pusdiklat KNPK	Oktober 2023

Hingga akhir Tahun 2023, mitigasi risiko yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan proses bisnis akreditasi.
2. Pelaksanaan sosialisasi layanan akreditasi melalui Forum Pembelajaran Keuangan Negara yang mengundang peserta dari berbagai KLID.
3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program pelatihan terakreditasi pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
4. Penyusunan *marketing kit* berupa landing page akreditasi program, video & pamflet stakeholder gathering, layanan *contact center*.

Mitigasi risiko yang dilaksanakan berhasil membuat risiko asistensi yang tidak tepat berada pada level rendah di akhir tahun 2023. Berikut ini adalah grafik yang mengilustrasikan tren risiko asistensi yang tidak tepat.

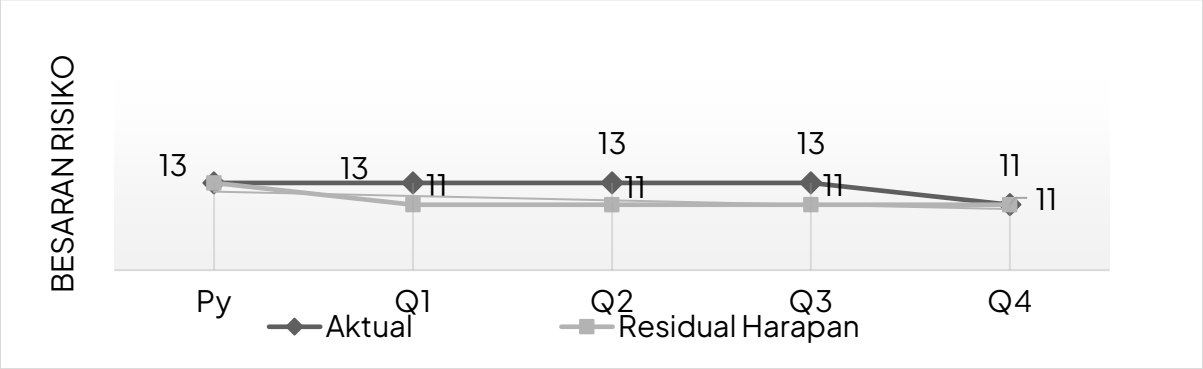

IKU Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi merupakan IKU yang baru diterapkan pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dilihat perbandingannya dari tahun ke tahun. Namun salah satu komponen penghitungan IKU ini yaitu Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi merupakan IKU yang sudah ada di BPPK sehingga dapat dilihat perbandingannya. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi dari Sub IKU Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi dari tahun 2020-2023.

	2020	2021	2022	2023
Target Renstra	70%	80%	80%	80%
Target IKU	80%	80%	85%	86%
Realisasi IKU	99,74%	98,8%	99,32%	97,75%
Capaian	120	120	116,85	113,66

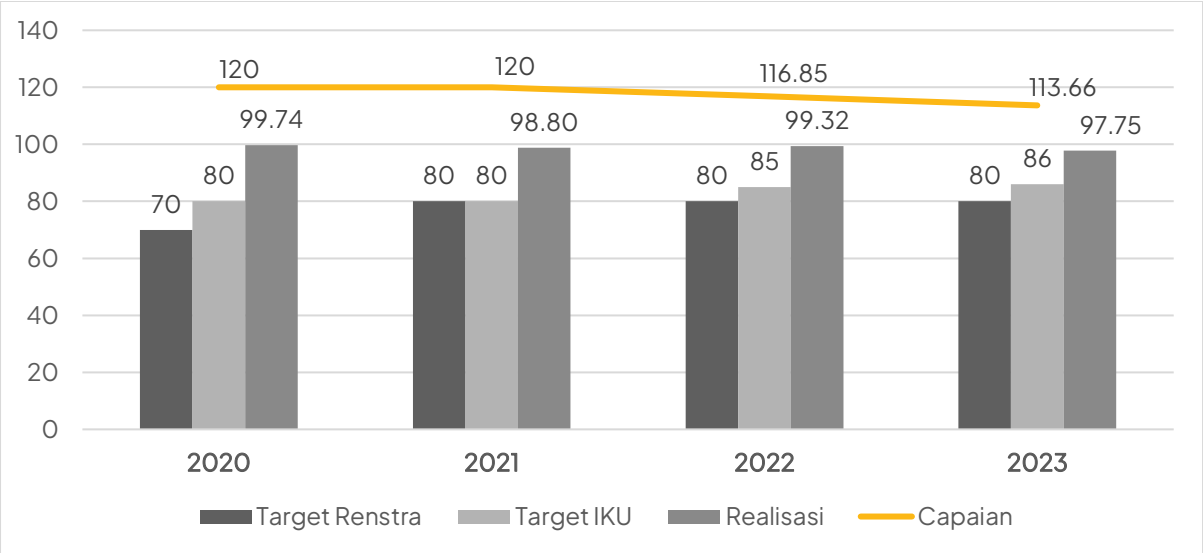

SS-6. MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG RELIABEL DAN BERDAYAGUNA

Manajemen pengetahuan yang reliabel adalah penerapan kebijakan dan praktik pengelolaan pengetahuan melalui kegiatan identifikasi, dokumentasi, organisasi, penyimpanan, distribusi, dan penerapan pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat dipercaya sebagai sumber data/informasi dalam penyelesaian pekerjaan sedangkan manajemen pengetahuan yang berdayaguna adalah manajemen pengetahuan yang berkemampuan mendatangkan hasil dan manfaat untuk organisasi.
Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan sebuah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 17 : SS Manajemen Pengetahuan yang Reliabel dan Berdayaguna

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
6	**Manajemen Pengetahuan yang Reliabel dan Berdayaguna**			**113,64**
6a-N	Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC	100,00%	113,64%	113,64

Sampai dengan akhir periode tahun 2023 capaian untuk SS ini adalah **113,64**. Adapun perincian dan penjelasan IKU adalah sebagai berikut.

6a-N Persentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC

IKU ini bertujuan mengukur tingkat pemanfaatan *knowledge document*/materi pembelajaran di bidang Keuangan Negara pada Kemenkeu *Learning Center* (KLC). KLC merupakan media pembelajaran *online* yang berisi berbagai materi tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan masyarakat umum.

Knowledge yang diukur pemanfaatannya dalam IKU ini adalah seluruh materi/*knowledge document* yang ada pada menu pusat pengetahuan (*knowledge center*) dan *Knowledge Management System* (KMS).

IKU ini diukur melalui tiga aspek, yaitu:

1. Efektivitas pengelolaan *Community of Practice*

   Pengelolaan Community of Practice (CoP), diukur berdasarkan jumlah lesson learned dari CoP yang aktif dikelola oleh BPPK. CoP dikatakan aktif apabila memiliki setidaknya satu dokumentasi lesson learned yang diunggah ke KLC. Target untuk setiap Pusdiklat adalah 5 lesson learned dari 3 CoP aktif, dan BDK 1 lesson learned dari 1 CoP aktif.

2. *User Engagement*

   User engagemnet diukur berdasarkan bounce rate KLC v2 dan jumlah unique pageviews. target unique pageviews adalah 1.000 dikali jumlah WI dan 500 dikali jumlah dosen pada unit.

3. Kualitas konten

   Kualitas konten diukur berdasarkan rata-rata rating yang diberikan oleh pengunjung terhadap konten yang ada di menu pusat pengetahuan/knowledge center yang telah mendapatkan penilaian/rating minimal 30 kali.

FORMULA IKU

Realisasi	=	(50% x a) + (10% x b) + (20% x c) + (20% x d)

a = Pengelolaan CoP

b = *bounce rate*

c = *uniqe pageview*

d = kualitas konten

Target dan realisasi IKU Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Manajemen Pengetahuan yang Reliabel dan Berdayaguna 6a-N Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	70%	70%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	74,27%	102,31%	102,31%	107,46%	107,46%	113,64%	113,64%	

Capaian	120	120	120	120	120	113,64	113,64	

Total nilai realisasi IKU adalah 107,46% dengan rincian sebagai berikut:

1. CoP (bobot 50%): 112,35% (CoP telah menghasilkan 144 *Lesson Learned*);
2. *Bounce Rate* (bobot 10%): realisasi 82,81%, capaian 94,59%;
3. *Page View* (bobot 20%) realisasi 1.023.886 capaian 120%;
4. Rating (bobot 20%) realisasi 4,99 capaian 120%.

Perincian nilai tiap komponen adalah sebagai berikut.

Jumlah *Uniqe page view*	CoP 50%	*Bounce Rate* 10%	*Page View* 20%	*Rating* 20%	Nilai
Feb	5.59%	96.19%	7.57%	120.00%	37.93%
Mar	64.12%	95.07%	43.52%	120.00%	74.27%
Apr	81.76%	94.73%	63.40%	120.00%	87.04%
Mei	83.53%	94.68%	120.00%	120.00%	99.23%
Jun	89.71%	94.59%	120.00%	120.00%	102.31%
Jul	90.88%	94.59%	120.00%	120.00%	102.90%
Ags	92.35%	94.59%	120.00%	120.00%	103.64%
Sept	100.00%	94.59%	120.00%	120.00%	107.46%
Okt	100.00%	94.59%	120.00%	120.00%	107.46%
Nov	102.06%	94.59%	120.00%	120.00%	108.49%
Des	112.35%	94.59%	120.00%	120.00%	113.64%

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU "Persentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC" adalah masih belum terdapat standar waktu proses penjaminan mutu yang dilakukan sebelum aset intelektual dapat diterbitkan pada KMS, sehingga terdapat aset intelektual yang sudah *di-upload* tetapi belum dapat dilihat orang lain karena belum melalui penjaminan mutu.

Upaya yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023 dalam rangka pencapaian IKU Persentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC adalah pemanfaatan aset intelektual pada KLC 2 pada Bulan November 2023.

Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah sebagai berikut.

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
Penyusunan *knowledge document* Penggunaan *knowledge document* pada KLC sebagai pemerkaya materi pembelajaran	Pusdiklat, PKN STAN, BDK	2024

IKU Persentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC merupakan IKU yang sudah ada di BPPK sejak lama. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi IKU tersebut dari tahun 2020 – 2023.

Tabel 3. 18 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan *Knowledge* pada *Platform* KLC

	2020	2021	2022	2023
Target Renstra	100%	100%	100%	100%
Target IKU	100%	100%	100%	100%
Realisasi IKU	111,46%	116%	115,29%	113,64%
Capaian IKU	111,46	116	115,29	113,64

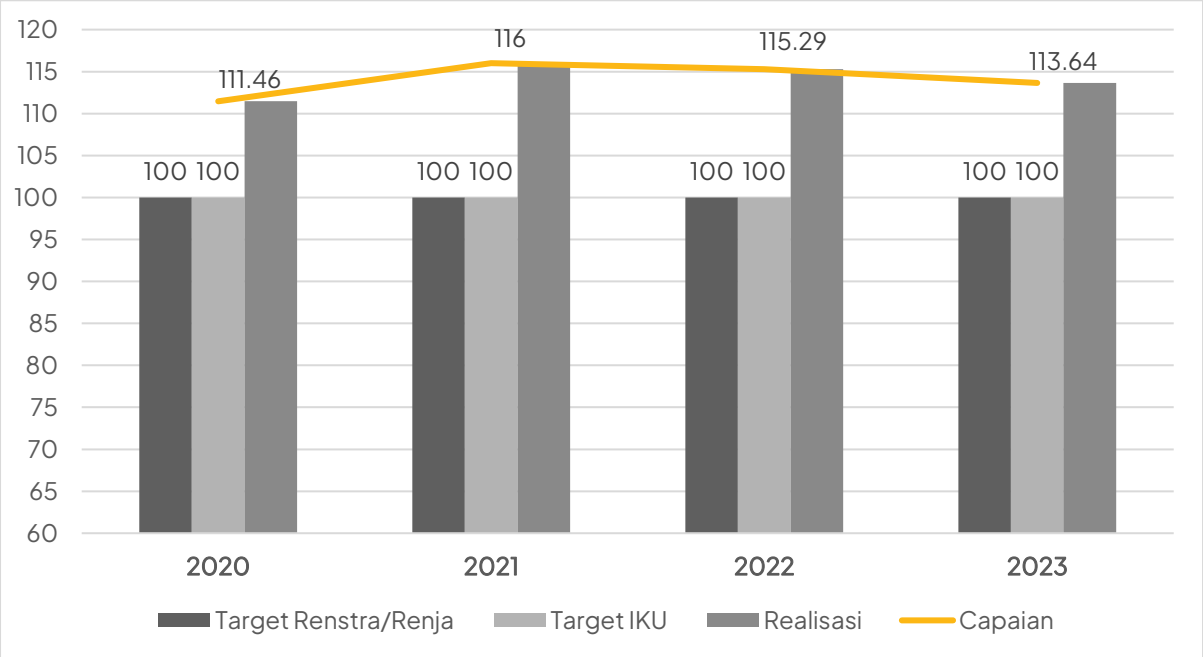

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa target IKU Persentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC mengalami penurunan pada tahun 2023 jika dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan formula IKU di tahun 2023 sehingga target dan realisasinya tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya

SS-7. PENDIDIKAN YANG *FIT FOR PURPOSES*

Pendidikan yang *fit for purpose* adalah pengelolaan pendidikan vokasi yang sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi, meliputi fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengelolaan beasiswa yang selaras dengan manajemen talenta, yang meliputi aspek seleksi dan penempatan studi serta pemanfaatan pascastudi.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan tiga buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan berikut.

Tabel 3. 19 : SS Pendidikan yang *fit for purposes*

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
7	**Pendidikan yang fit for purposes**			**111,93**
7a-N	Indeks kualitas penelitian	181,00	233,80	120
7b-N	Persentase kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan standar mutu pendidikan tinggi	96,40%	98,58%	102,26
7c-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kemenkeu	85,00	96,49	113,52

Indeks capaian untuk SS ini sampai dengan Triwulan IV adalah **119,93**. Adapun perincian dan penjelasan IKU pada SS ini adalah sebagai berikut.

7a-N Indeks Kualitas Penelitian

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas penelitian yang dhasilkan oleh PKN STAN dengan mempertimbangkan kualitas publikasinya dan proses kolaborasinya. Riset atau penelitian dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan

merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut.

Penelitian kolaborasi didefinisikan sebagai kerja sama antar beberapa pihak untuk melakukan sebuah penelitian. Kolaborasi bisa dilakukan antara para akademisi, yang berasal dari bidang keilmuan yang sama, namun dengan penguasaan metode riset atau kepemilikan data yang berbeda satu sama lain. Bisa juga oleh mereka yang berasal dari bidang keilmuan berbeda, tetapi saling melengkapi. Ataupun dengan berbagai pihak lain seperti praktisi, instansi pemerintah, dll. Penelitian kolaborasi yang dimaksud adalah penelitian tercatat. Tercatat adalah penelitian yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) sesuai ketentuan yang berlaku terkait konten penelitian dan format penulisan. Persetujuan dari Ketua Jurusan juga dimaksudkan untuk memastikan penelitian dilakukan pada tahun berjalan (bukan penelitian sebelumnya) dengan output hasil penelitian baik berupa publikasi hasil penelitian ataupun laporan hasil penelitian.

Jika penelitian kolaborasi terdaftar di jurnal tetapi tidak melalui persetujuan Ketua Jurusan, maka penelitian ini tidak diakui dalam perhitungan capaian IKU (tetapi bisa diajukan sebagai penilaian AK). Hasil penelitian kolaborasi bernilai 2 sks (laporan akhir penelitian) atau sks sesuai level publikasi. Nilai sks tersebut akan dibagi rata dengan jumlah dosen PKN STAN yang terlibat di penelitian kolaborasi.

Indeks kualitas penelitian adalah nilai seluruh penelitian PKN STAN yang terpublikasi pada tahun 2023 berdasarkan bobot/formula yang ada telah ditentukan ditambah dengan nilai penelitian kolaborasi.

FORMULA IKU

Realisasi	=	70% komponen Publikasi x 30% komponen kolaborasi

Adapun bobot dari komponen publikasi adalah sebagai berikut.

1. Penelitian dipublikasikan di Jurnal Internasional Q1 mendapat nilai 10
2. Penelitian dipublikasikan di Jurnal Internasional Q2 mendapat nilai 8

3. Penelitian dipublikasikan di Jurnal Internasional Q3 mendapat nilai 6
4. Penelitian dipublikasikan di Jurnal Internasional Q4 mendapat nilai 4
5. Penelitian dipublikasikan di Jurnal Nasional Sinta 1 mendapat nilai 6
6. Penelitian dipublikasikan di Jurnal Nasional Sinta 2 mendapat nilai 4
7. Penelitian dipublikasikan di Jurnal Nasional Sinta 3 mendapat nilai 3
8. Penelitian dipublikasikan di Jurnal Nasional Sinta 4 mendapat nilai 1,5
9. Penelitian dipublikasikan di Jurnal Nasional Sinta 5 mendapat nilai 1
10. Penelitian dipublikasikan di Jurnal Nasional Sinta 6 mendapat nilai 0,5
11. Penelitian dipublikasikan di *prosiding* internasional / *conference* internasional mendapat nilai 1
12. Penelitian dipublikasikan di *prosiding* nasional / *conference* nasional mendapat nilai 0,5

Komponen Kolaborasi

1. Penelitian kolaborasi internasional, nilai 3
2. Penelitian kolaborasi nasional, nilai 2

Sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2023, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut. Target untuk tahun 2023 adalah 181 sedangkan realisasi 233,8 sehingga capaian 129,17 namun sesuai KMK 300 Tahun 2022 maka angka capaian maksimal adalah 120.

BPPK	SS: Pendidikan yang fit for purposes 7a-N Indeks kualitas penelitian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	181	181	
Realisasi	N/A	33,95	33,95	71,65	71,65	233,8	233,8	Max/TLKV
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Sampai dengan periode Q4, terdapat 132 penelitian yang sudah selesai dipublikasikan (total poin 280 dari target 238) dan terdapat 63 penelitian kolaborasi (poin 126 dari target 50). Sehingga realisasi IKU ini adalah 233,8 dari target akhir tahun sebesar 181.

Berikut adalah perincian realisasi penelitian yang dipublikasikan sepanjang tahun 2023.

Kategori	Bobot	Jumlah	Nilai Indeks
Penelitian dipublikasikan di Jurnal Internasional Q1	10	0	0
Penelitian dipublikasikan di Jurnal Internasional Q2	8	2	16
Penelitian dipublikasikan di Jurnal Internasional Q3	6	10	60
Penelitian dipublikasikan di Jurnal Internasional Q4	4	0	0
Penelitian dipublikasikan di Jurnal Nasional Sinta 1	6	0	0
Penelitian dipublikasikan di Jurnal Nasional Sinta 2	4	12	48
Penelitian dipublikasikan di Jurnal Nasional Sinta 3	3	14	42
Penelitian dipublikasikan di Jurnal Nasional Sinta 4	1.5	43	64.5
Penelitian dipublikasikan di Jurnal Nasional Sinta 5	1	34	34
Penelitian dipublikasikan di Jurnal Nasional Sinta 6	0.5	3	1.5
Penelitian dipublikasikan di prosiding internasional/conference internasional	1	14	14
Penelitian dipublikasikan di prosiding nasional/conference nasional	0.5	0	0
			280

Sedangkan untuk komponen kolaborasi sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Kategori	Bobot	Jumlah	Nilai Indeks
Penelitian kolaborasi internasional	3	0	0
Penelitian kolaborasi nasional	2	63	126
			126

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Terdapat dosen yang belum mengajukan proposal karena bidang keilmuan Program Studi saat ini.
2. Sebagian besar proposal baru disampaikan dan diseminarkan pada Triwulan III 2023.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan III yaitu:

1. Menyelenggarakan IHT terkait penelitian untuk dosen dan mahasiswa (NVivo, SLR, SEM PLS)
2. Memfasilitasi rencana penjajakan kerja sama dengan institusi lain.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada periode berikutnya adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan Bimtek Proposal Penelitian Kualitatif
2. Penyelenggaraan Program Klinik Statistik setiap pekan

Tabel 3. 20 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Penelitian

	2020	2021	2022	2023
Target Renstra	90	148	193	238
Target IKU	90	193	335	181
Realisasi IKU	238	442	546,5	233,80
Capaian IKU	120	120	120	120

Pada tahun 2023 terdapat penurunan target dan realisasi dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini disebabkan adanya reformulasi IKU supaya lebih *challenging* di mana pada tahun 2023 diterapkan ketentuan baru sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan bersama mahasiswa tidak diakui poinnya.
2. Penelitian yang telah dipublikasikan 1-2 tahun sebelumnya pada jurnal internasional dan kemudian di-*discontinued* oleh institusi pemeringkatnya, poinnya dikurangi 50% dari total poin yang semula didapat saat publikasi dimaksud.

7b-N Persentase kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan standar mutu pendidikan tinggi

IKU ini bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan PKN STAN. Standar mutu pendidikan tinggi adalah standar mutu yang telah ditetapkan oleh Kemenristek Dikti untuk menjaga kualitas dari perguruan tinggi. IKU ini mengukur kesesuaian antara penyelenggaraan pengajaran di PKN STAN dengan standar mutu Kemenristek Dikti.

FORMULA IKU

Realisasi	=	Penyelenggaraan Pendidikan PKN STAN / Standar Mutu Pendidikan Tinggi x 100%

Pada periode Tahun 2023, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Pendidikan yang *fit for purposes* 7b-N Persentase kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan standar mutu pendidikan tinggi

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	96,40%	96,40%	Max/TLKV
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98,58%	98,58%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	102,26	102,26	

Sampai dengan akhir periode 2023, belum ditemukan masalah yang dapat menghambat pencapaian IKU ini. Dalam rangka pencapaian IKU ini, telah dilakukan pengisian matriks kesesuaian penyelenggaran Pendidikan dengan standar mutu pendidikan tinggi. Adapun rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2024 oleh UIC PKN STAN adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran mahasiswa PKN STAN sesuai standar mutu Pendidikan tinggi.

Tabel 3. 21 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan standar mutu pendidikan tinggi

Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
-	-	-	-	96,40%	98,58%

IKU Persentase kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan standar mutu pendidikan tinggi adalah IKU yang baru diimplementasika di level BPPK pada tahun 2023 sehingga tidak terdapat perbandingan terget dan realisasi tahun-tahun sebelumnya

7c-N Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas efektivitas program beasiswa Kementerian Keuangan diukur dari sisi keselarasan dengan manajemen talenta, yang meliputi aspek seleksi dan penempatan studi serta pemanfaatan pascastudi. Penyelarasan program beasiswa Kementerian Keuangan dengan kebijakan talent management meliputi aspek perencanaan, seleksi, penempatan dan pelaksanaan studi, serta pemanfaatan pascastudi. Menimbang kewenangan dan ketepatan proses bisnis, maka pengukuran IKU didasarkan pada aspek penempatan dan pelaksanaan studi, yaitu proses penempatan awardee dan kelulusan sesuai dengan jadwal.

Tingkat penempatan awardee dihitung dari penerima beasiswa FETA maupun beasiswa MINTS pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan dalam pengumuman dan ketentuan terkait yang berlaku pada saat penawaran beasiswa, yang berangkat menjalani studi pada tahun ini.

Tingkat kelulusan dihitung dari penerima beasiswa FETA maupun MINTS pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan dalam pengumuman dan ketentuan terkait yang berlaku pada saat penawaran beasiswa, yang direncanakan lulus tahun ini. Lulus sesuai jadwal adalah lulus sesuai dengan rencana studi yang tertera pada LoA atau dokumen sejenis, berupa tanggal perkiraan akhir studi dalam kalender akademik atau informasi resmi lainnya dari pihak Kampus; dan/atau lulus sesuai dengan masa tugas belajar yang tertera pada Surat Tugas Belajar dari Unit Eselon I asal karyasiswa; Perpanjangan masa tugas belajar dapat dilakukan maksimal sepanjang 6 bulan dari masa studi awal serta telah diterbitkan Surat Tugas Belajar yang baru. Alumni yang telah mendapatkan surat pengembalian sementara ke unit karena menunggu proses penerbitan sertifikat/ijazah kelulusan dianggap telah lulus sesuai dengan jadwal

FORMULA IKU

Realisasi	=	(10% x tingkat penempatan Awardee pada top 30 universities by subject) + (90% x Tingkat kelulusan tepat waktu pada top 30 universities by subject)

Adapun IKU ini diukur berdasarkan:

1. Tingkat penempatan *Awardee* pada top 30 *universities by subject* (bobot penilaian 10%). Perhitungan berasal dari jumlah *awardee* yang memulai studi / jumlah *awardee* yang mendapatkan *unconditional LoA* x 100%.
2. Tingkat kelulusan tepat waktu pada top 30 *universities by subject* (bobot penilaian 90%. Jumlah *awardee* yang lulus sesuai jadwal pada Surat Tugas Belajar / Jumlah *Awardee* yang dijadwalkan lulus x 100%.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, capaian IKU ini adalah 113,52.

BPPK	SS: Pendidikan yang *fit for purposes* 7c-N Tingkat efektifitas beasiswa Kementerian Keuangan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	Max/TLKV
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96,49	96,49	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	113,52	113,52	

Sampai dengan periode ini belum ditemukan masalah yang dapat menghambat pencapaian IKU tersebut. Adapun Tindakan yang telah dilakukan sampai dengan periode triwulan IV yaitu telah diselenggarakannya kegiatan seminar digital (BroSis) secara berkala dalam rangka penyebaran informasi mengenai beasiswa.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada periode selanjutnya oleh UIC Pusdiklat KM adalah sebagai berikut:

1. Membuka kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan dalam proses seleksi bersama dan aplikasi (periode semesteran)
2. Seleksi calon penerima beasiswa (periode semesteran)
3. Pengelolaan *predeparture* (periode sepanjang tahun)
4. Monitoring dan Evaluasi Periodik bersama UE1 dan Perguruan Tinggi Mitra (periode triwulanan)

Tabel 3. 22 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan

	2021	2022	2023
Target Renstra	75%	80%	82%
Target IKU	75%	80%	85%
Realisasi IKU	81,47%	99,41%	96,49%

SS-8. PENGUATAN TATA KELOLA DAN BUDAYA KERJA KEMENKEU SATU DALAM EKOSISTEM KOLABORATIF

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan mewadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan enam buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan berikut.

Tabel 3. **23** : SS Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
8	**Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif**			111,63
8a-CP	Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*	100,00%	118,21%	118,21
8c-CP	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100,00%	100,00%	100,00
8d-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%	99,58%	108,24
8e-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100,00	120,00	120,00
8f-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100,00%	108,67%	108,67

Indeks capaian untuk SS ini adalah **111,63**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS "Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif" adalah sebagai berikut.

8a-CP Tingkat penyelesaian ekosistem *delayering* dan optimalisasi pengelolaan Jafung

IKU ini mengukur tingkat penyelesaian ketentuan-ketentuan dalam rangka program penyederhanaan birokrasi (delayering) dan pengelolaan jabatan fungsional Kementerian Keuangan. Beberapa komponen di dalam IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Penyelesaian Ekosistem *Delayering* Kementerian Keuangan, terdiri atas:
   a. Penyelesaian Penataan Organisasi dengan target unit Eselon I: DJA, DJPPR, BPPK, dan Setjen;

b. Penyelesaian Infrastruktur Organisasi; serta
c. Pengalihan Jabatan Administrasi ke JF dengan target unit Eselon I DJPK, DJA, DJPPR, dan BPPK.

2. Penyelesaian Optimalisasi Pengelolaan Jafung, terdiri atas:
   a. Penyelesaian Infrastruktur Jabatan Fungsional; dan
   b. Penyempurnaan Manajemen SDM.
3. Penyelesaian Mekanisme Kerja Kementerian Keuangan ini bertujuan memastikan ketersediaan perangkat peraturan dalam rangka implementasi *delayering* dan JF hasil konsolidasi.

FORMULA IKU

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Capaian Ekosistem Delayering} + \text{Capaian Optimalisasi Pengelolaan Jafung} + \text{Capaian Pola Kerja Kemenkeu}}{3}$$

Sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2023, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif 8a-CP Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	30%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	
Capaian	120	120	120	100	100	120	120	

Tidak terdapat kendala dalam pencapaian IKU ini. Sebagaimana Nota Dinas Kepala Biro Organta Nomor ND-23/SJ.2/SJ.22/2023, Penataan Organisasi BPPK telah ditetapkan dalam PMK Nomor 135 Tahun 2023 dan PMK dimaksud telah diundangkan pula dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977 tanggal 11 Desember 2023.

Dengan demikian, BPPK memiliki waktu 1 (satu) tahun atau hingga 11 Desember 2024 untuk penyiapan implementasi delayering dan organisasi BPPK baru.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2023 dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain.

1. Pembahasan Penataan Organisasi dan Delayering bersama KemenpanRB telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pada 07 Februari, 12 April, dan 27 Juni 2023. Telah disusun penyesuaian atas RPMK OTK BPPK berdasarkan hasil pembahasan terakhir bersama KemenPANRB;
2. Pelaksanaan survei pra delayering pada 21-28 Juni 2023 bagi pejabat administrator (eselon III) dan pejabat pengawas (eselon IV) di unit BPPK yang menjadi target delayering dengan capain isian survei 100%. Survei bertujuan mengetahui persepsi dan kesiapaan pejabat administrasi yang akan dialihkan serta memitigasi risiko pasca delayering;
3. Penyampaian masukan pembagian tugas pembinaan JF dalam rangka penyiapan infrastruktur pembinaan JF konsolidasi keuangan negara dan selaras dengan PO BPPK khususnya pemusatan fungsi pembinaan JF keuangan negara di BPPK sebagaimana saat ini diatur dalam KMK 597/KMK.01/2020 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan. Telah dilaksanakan pembahasan atas usulan dimaksud bersama biro Organta pada 17 Mei 2023;
4. Pelaksanaan Updating berkala dan pembahasan pada Board Level BPPK terhadap catatan PO BPPK oleh KemenPANRB;
5. Penyiapan bahan dan koordinasi bersama Biro Organta dalam penyampaian tanggapan KemenPANRB;
6. Pelaksanaan *Benchmarking* dengan UE I Kemenkeu dan K/L lain yang telah delayering dalam rangka akselerasi PO dan Delayering BPPK telah dilaksanakan.
7. Pelaksanakan FGD penyusunan uraian jabatan JF Widyaiswara. Selain itu telah dilakukan permintaan masukan atas konsep mekanisme kerja di maksud kepada seluruh Pusdiklat dimana hasilnya dipaparkan dalam board meeting Dalam rangka identifikasi pengalihan tugas JA ke JF dan perumusan konsep mekanisme kerja pasca delayering.
8. Pelaksanaan Tugas Tim Project Management Office Penataan Organisasi BPPK dalam rangka akselerasi penyiapan infrastruktur PO dan delayering BPPK.

9. Pembahasan pembagian kewenangan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara bersama Biro Organta pada 12 dan 22 September 2023 dengan melibatkan pula Tim PMO-PO.
10. Pelaksanaan proses reviu dan legal drafting RPMK OTK BPPK oleh Biro Organta pada 23 Oktober 2023 untuk finalisasi dan penyiapan harmonisasi dengan Kemenkumham.
11. Pelaksanaan pertemuan Kepala BPPK dengan Kepala Biro Organta pada 03 November 2023 untuk membahas beberapa hal antara lain tugas dan fungsi BPPK terkait uji kompetensi/sertifikasi, perkembangan PO dan delayering, peran BPPK dalam transformasi JF di bidang keuangan negara, pemanfaatan JF Keuangan Negara (JFKN) oleh BPPK dan rencana pengembangannya, dan akselerasi dukungan (Penyiapan Teknologi Informasi dan Change Management) secara terpusat.
12. Penyampaian surat permohonan harmonisasi RPMK OTK dari Biro Organta ke Kemenkumham pada Minggu Ke-IV Oktober 2023 dan proses harmonisasi dimaksud mulai berlangsung pada 7 November 2023.
13. Penyampaian permohonan penetapan RPMK OTK dari Sekretariat Jenderal kepada Menteri Keuangan melalui ND Nomor ND-1584/SJ/2023 tanggal 1 Desember 2023 untuk selanjutnya dapat dilakukan pengundangan di KemenKUMHAM
14. Penerbitan PMK Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. PMK dimaksud telah diundangkan pula dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977 tanggal 11 Desember 2023.

Berikut ini adalah rekomendasi rencana aksi untuk periode selanjutnya.

1. Pengusulan pengalihan Jabatan Administrasi (Eselon III dan IV) ke dalam Jabatan Fungsional kepada Kementerian PANRB;
2. Penyusunan infrastruktur organisasi antara lain informasi jabatan, uraian jabatan, rumpun jabatan, peta jabatan, standar kompetensi teknis jabatan, dan evaluasi jabatan (grading); dan
3. Penyusunan pelimpahan wewenang sesuai jabatan baru, penyesuaian proses bisnis (SOP) berdasarkan organisasi baru, dan penyesuaian penomoran dan administrasi naskah dinas.

Salah satu kejadian risiko (risk event) yang berpotensi berpengaruh terhadap IKU ini adalah keterlambatan proses penyelesaian delayering. Terkait dengan risiko ini, rencana mitigasi yang dilakukan oleh BPPK adalah sebagai berikut.

No	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Penetapan PMK OTK • Koordinasi dan pembahasan penyelarasan fungsi PMO bersama Biro Organta; • Koordinasi dan pembahasan pembagian kewenangan uji kompetensi dan sertifikasi di bidang keuangan negara bagi profesi dan non JF • Penyesuaian RPMK OTK • Pemantauan berkala proses reviu, legal drafting, harmonisasi hingga penetapan PMK OTK	Tim PMO/PO	Triwulan IV 2023
2	Penyiapan Infrastruktur Penataan Organisasi • Koordinasi dan pemantauan berkala pelaksanaan tugas Tim PMO-PO • Reporting perkembangan Tim PMO-PO pada level board/pimpinan.		

Hingga akhir tahun 2023, mitigasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan b*enchmarking* dengan unit serupa (DJPK) yang telah melaksanakan delayering, pada 26 Januari 2023 dalam rangka akselerasi penyiapan infrastruktur PO BPPK;
2. Pelaksanaan rapat koordinasi bersama Biro Organta pada 31 Januari 2023 dalam rangka penyiapan bahan dan penyamaan persepsi rencana pembahasan usulan PO BPPK bersama KemenPANRB;
3. Pembahasan Tindak Lanjut Usulan Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan Biro Organta pada 15 Februari 2023;
4. Pelaksanaan FGD penyusunan uraian jabatan JF Widyaiswara;
5. Pelaksanaan koordinasi dan diskusi dengan Biro Organta atas usulan konsep RPMK OTK yang telah disusun;

6. Pelaksanakan survei pra *delayering* bagi Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) unit target delayering di BPPK pada 21-28 Juni 2023 yang bertujuan untuk mengetahui persepsi dan kesiapan para pejabat yang akan dialihkan;
7. Pembentukan Tim Project Management Office-Penataan Organisasi BPPK dalam rangka akselerasi penyiapan infrastruktur PO dan delayering BPPK serta pemantauan pelaksanaan tugas secara berkala atas pencapaian target/output;
8. Pelaksanaan koordinasi dan pembahasan penyelarasan rancangan PMK OTK BPPK terkait beberapa fungsi khususnya pembagian kewenangan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara bersama Biro Organta;

Langkah-langkah mitigasi tersebut membuat risiko ini dapat turut ke level rendah. Berikut ini adalah grafik yang mengilustrasikan tren level risiko.

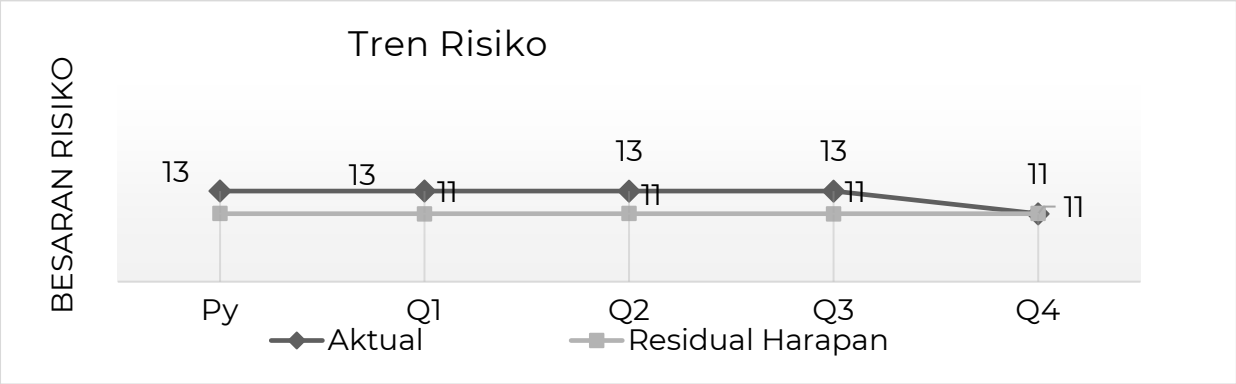

IKU Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung mulai diimplementasikan pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dilihat perbandingan capaiannya dari tahun ke tahun. IKU Tingkat penyelesaian ekosistem delayering juga tidak terdapat dalam dokumen Renstra Sekretariat Bdana ataupun dalam Renja. Adapun perbandingan capaian IKU dengan target Renstra BPPK adalah sebagai berikut.

Target 2022	Realisasi 2022	Target Renstra	Target 2023	Realisasi 2023
-	-	-	100%	120%

8b-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Peningkatan *Well Being*

IKU ini bertujuan mengukur kualitas apek pengelolaaan SDM yang meliputi komponen berikut.

1. Kualitas Kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi pegawai;
2. Kualitas pengelolaan karir SDM melalui kualitas implementasi Manajemen Talenta;
3. Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon; dan
4. Pemanfaatan HRIS untuk mendukung Kebijakan dan Layanan SDM

FORMULA IKU

$$\frac{\text{Realisasi Aspek 1}}{\text{Target Aspek 1}} \times 30\% + \frac{\text{Realisasi Aspek 2}}{\text{Target Aspek 2}} \times 30\% + \frac{\text{Realisasi Aspek 3}}{\text{Target Aspek 3}} \times 30\% + \frac{\text{Realisasi Aspek 4}}{\text{Target Aspek 4}} \times 10\%$$

Aspek 1 : Tingkat Pemenuhan Kompetensi SDM

Pemenuhan Kompetensi SDM

Aspek Pemenuhan Kompetensi SDM diukur berdasarkan pemenuhan Kompetensi manajerial-Sosial kultural dan pemenuhan Kompetensi Teknis dengan perhitungan:

Formula = (60% x A. Indeks Capaian Pemenuhan Kompetensi Manajerial-Sosial Kultural) + (40% x B. Indeks Capaian Pemenuhan Kompetensi Teknis)

Aspek 2 : Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dalam Rangka Pengisian Jabatan

Implementasi Manajemen Talenta dalam rangka pengisian jabatan promosi, dilakukan dengan tahapan:

- Analisis kebutuhan Talent -- 15
- Identifikasi calon Talent -- 25
- Forum Pimpinan -- 20
- Pengembangan Talent -- 15
- Evaluasi Talent -- 25
- Pengangkatan Talent pada jabatan target -- 20

Kegiatan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan proses Manajemen Talenta yang berjalan di periode sebelumnya.

Aspek 3 : Tingkat Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon

Capaian: [Jumlah Pejabat Administrator, Pengawas, JPTP, JF, Pelaksana dan pejabat di lingkungan organisasi non eselon yang mutasi atau promosi antar unit JPTM atau unit organisasi non eselon tahun 2023] / [Jumlah Pejabat Administrator dan Pengawas yang mutasi atau promosi tahun 2023] x 100%

Nilai 90 – mutasi/promosi antar unit < 33%

Nilai 100 – mutasi/promosi antar unit 33%

Nilai 120 – mutasi/promosi antar unit > 33%

Aspek 4 : Tingkat Pemanfaatan HRIS untuk mendukung Kebijakan dan Layanan SDM

Diukur dari rata-rata capaian kegiatan A, kegiatan B dan kegiatan C

Kegiatan A: Persentase Deklarasi Data SDM dan Pemutakhiran Dokumen SDM JPT, JA, dan JP Pada HRIS

Kegiatan B: Persentase Penyelesaian Validasi dan Approval Data SDM pada HRIS

Kegiatan C: Indeks Pemanfaatan Data HRIS

Sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2023, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif 8b-CP: Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Peningkatan *Well Being*							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLKV
Realisasi	119,39%	109,38%	109,38%	117,67%	117,67%	118,21%	118,21%	
Capaian	119,39	109,38	109,38	117,67	117,67	118,21	118,21	

Dari pengukuran yang dilakukan, capaian dari tingkat pemenuhan kapasitas SDM mendapatkan nilai 114,92%, Tingkat implementasi manajemen talenta dalam rangka pengisian jabatan memperoleh nilai 120%, Tingkat implementasi mutasi antara UJPTM/Non Eselon memperoleh capaian 120% dan Tingkat pemanfaatan HRIS untuk mendukung kebijakan dan layanan SDM memperoleh capaian 117,34%. Dari keempat

komponen tersebut menjadikan capaian IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *wellbeing* sebesar 118,21.

Berikut ini adalah rincian realisasi IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being di Tahun 2023.

No.	Komponen	s.d. Des		
		target	realisasi	capaian
1.	**Kualitas Kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi (30%)**	100%	114.92%	114.92%
1.A.	Indeks capaian pemenuhan kompetensi Manajerial-Sosial Kultural (60%)	97.70%	99.59%	120.00%
1.A.1)	Pemenuhan JPM Struktural minimal 80% (Bobot 60%)		99.31%	
1.A.2)	Pemenuhan indeks ketepatan waktu penyiapan infrastruktur AT dan indeks kualitas pelaksaaan AT (Bobot 40%)		100%	
1.B.	Indeks capaian pemenuhan kompetensi teknis (40%)	3	3.219	107.30%
1.B.1)	Indeks ketepatan waktu penyiapan infrastruktur AT (Bobot 70%)		3	
1.B.2)	Indeks kualitas pelaksanaan AT (Bobot 30%)		3.73	
2.	**Tingkat implementasi Manajemen talenta dalam rangka pengisian jabatan (30%)**	100%	120%	120%
3.	**Tingkat implementasi mutasi antara UJPTM/Non Eselon (30%)**	33%	37%	120%
4	**Tingkat pemanfaatan HRIS untuk mendukung kebijakan dan layanan SDM (10%)**	100%	117.34%	117.34%
REALISASI IKU				**118.21%**

Akar masalah dalam pemenuhan IKU "Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being* antara lain:

1. Pelaksanaa Asesmen teknis merupakan penilaian yang baru dimulai pada tahun 2022, Asesi maupun asesor belum terbiasa dengan penilaian tersebut.
2. Penetapan aturan terkait penataan organisasi (delayering) BPPK yang masih dalam proses.
3. Tidak adanya timeline MAUE1 dari Sekretariat Jenderal yang dapat dijadikan acuan.
4. Tidak semua pegawai aware terhadap data SDM di HRIS sehingga berdampak pada data dan kelengkapan dokumen pendukung data SDM di HRIS masih belum maksimal. Selain itu saat ini HRIS sedang dilakukan maintenance yang mengakibatkan pegawai tidak dapat melakukan pemutakhiran data dengan baik (beberapa riwayat tidak terdapat tombol tambah/edit/hapus/upload untuk proses pemutakhiran data).

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Melakukan perencanaan dan persiapan lebih awal agar penilaian kompetensi berjalan lebih lancar. Pelaksanaan Online Group Coaching dan Feedback one on one bagi pejabat dengan JPM Mansoskul < 80%
2. Melaksanakan Manajemen Talenta dalam pengisian jabatan kosong dengan mekanisme mutasi/promosi, baik pada jabatan Administrator maupun jabatan Pengawas yang kosong. Selain itu dilakukan pemetaan minat alih jabatan fungsional bagi pejabat BPPK dalam rangka persiapan delayering.
3. Tetap melakukan pemantauan pada arahan Sekretariat Jenderal terkait pelaksanaan MAUE1.
4. Melakukan monitoring secara berkala terhadap keakuratan dan kelengkapan data HRIS melalui monitoring pelaksanaan deklarasi data SDM.
5. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi data SDM pada HRIS secara *one-on-one meeting* dengan unit kerja di lingkungan BPPK.

Adapun rekomendasi rencana aksi yang perlu dilaksanakan pada periode selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi dan pengembangan kompetensi terkait mansoskul dan teknis.
2. Memperbarui *boxing talent* dan pelaksanaan manajemen talenta dengan calon talent yang telah memenuhi syarat.

3. Koordinasi secara intens dengan para Sekretaris Jenderal UE I lain serta didasarkan pada analisis data yang memadai.
4. Pemanfaatan HRIS: Pemutakhiran data HRIS secara rutin, sinkronisasi data HRIS dan GPP menggunakan role PBDK, monitoring secara rutin terkait capaian form akurasi data, edossir, dan verifikasi/validasi data tiap bulan, pemberian meja bantuan terkait pemutakhiran data HRIS.

Tabel 3. 24: Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan *Well Being*

Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
-	-	-	-	100	118,21

IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being merupakan IKU baru di Tahun 2023, IKU ini juga tidak tercantum dalam Renstra BPPK. Pada tahun 2022 terdapat IKU yang hampir serupa dengan IKU ini, namun terdapat perbedaan formula sehingga target dan realisasinya tidak bisa dibandingkan secara langsung.

8c-CP Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu

IKU ini mengukur indeks ketepatan waktu penyelesaian cetak biru Kemenkeu. Dalam cetak biru Kemenkeu, yang juga merupakan tindak lanjut hasil LOM 2023 tanggal 19-20 Janruari 2023. Hasil LOM menyepakati untuk melakukan revisit mandat Kemenkeu dan pengorganisasiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dinamika/tantangan yang dihadapi sebagaimana dituangkan dalam BA LOM 2023, antara lain:

1. Penguatan tusi Kemenkeu dalam pengelolaan keuangan negara terkait Alokasi, Distribusi & Stabilisasi (Lead: DJA);
2. Mengarahkan kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi dan mendorong industrialisasi (Lead: BKF);
3. Meninjau kembali relevansi 5 program RSPP dalam menjawab tantangan & berbagai mandat UU (Lead: Setjen dan DJA);
4. Penyusunan konsep nerve system untuk menyusun kebijakan sektor fiskal, moneter, keuangan, riil, & internasional (Lead: BKF);

5. Menjalankan purwarupa KIU & Menyusun kelembagaan KIU secara permanen (Lead: Setjen);
6. Pembahasan pembentukan 2 UE-1 terkait sektor keuangan dan pengelolaan sistem informasi (Lead: Setjen).

Selain itu, perlu dilakukan pembahasan terkait mandat Kemenkeu yang melekat pada UE I terkait namun tidak masuk dalam kesepakatan LOM 2023 (UE I terkait). Tindak lanjut atas masing-masing poin sebagaimana tercantum dalam BA LOM 2023, akan dilakukan oleh unit eselon I terkait dengan pembagian berdasarkan tugas dan fungsinya.

Formula IKU Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu adalah sebagai berikut.

Komponen	Uraian	UIC	Output	Target
A. Inisiatif Permulaan Kemenkeu Intelligence Unit (KIU)	1. Pengembangan Business Intelligence terkait Fiskal dan Riil	Seluruh UE I, SMV	Dukungan Analisis Data / Desain Data	Q3
	2. Pengembangan Business Intelligence terkait Moneter dan Sektor Keuangan	DJP, DJBC, Setjen (Set. KSSK), BKF (PKSK)	Dukungan Analisis Data / Desain Data	Q3
	3. Menjalankan purwarupa KIU	UE I Terkait	Hasil Analisis	Q4
B. Dukungan Kelembagaan	4. Penyiapan unit pengelola sistem informasi (Chief Information Officer)	Setjen dan Seluruh Unit TIK di UE I, LNSW	Naskah akademik	Q3
	5. Penyiapan unit yang memiliki fungsi Sektor Keuangan dan Fungsi Intelijen Keuangan	Setjen, BKF, UE I terkait	Naskah akademik	Q4

Sampai dengan Periode Triwulan IV Tahun 2023, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

	8c-CP Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	

BPPK terlibat dalam komponen 5, yaitu dukungan kelembagaan terkait pengelolaan IT (CIO) dengan realisasi 100%.

Detail Capaian dari komponen 5 adalah sebagai berikut:

Komponen	Rincian Penyelesaian	Realisasi Per Rincian
Pembentukan 2 unit Eselon I Terkait Sektor Keuangan dan Pengelolaan Sistem Informasi (CIO) (100%)	Telah disusun naskah akademik unit pengelolaan sistem informasi dan telah dipresentasikan kepada Sesjen pada taggal 29 September dan 27 November 2023	100%
	Telah disusun naskah akademis unit sektor keuangan	100%

Sampai dengan Triwulan IV, tidak terdapat permasalahan yang menghambat capaian IKU ini sehingga capaian IKU ini adalah 100. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU yaitu sebagai berikut.

1. Telah dilakukan pembahasan finalisasi manual IKU
2. Telah dilakukan beberapa kali pembahasan dipimpin Sesjen terkait KIU dan penguatan fungsi IT didampingi Para Sahli, JFAK Utama, KSSK, dan BKF.
3. Telah disusun dan disampaikan naskah akademik penguatan kelembagaan fungsi pengelolaan TIK dan intelijen keuangan melalui ND-18/SJ.21/2023 tanggal 30 September dan secara konsep telah pula dipresentasikan kepada Sesjen pada tanggal 29 September dan 27 November 2023.

Pada tahun 2024, IKU ini tidak diterapkan lagi sehingga tidak terdapat rekomendasi rencana aksi yang perlu untuk dilaksanakan.

IKU Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan merupakan IKU yang baru diimplementasikan di tahun 2023 sehingga capaian di tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan capaaian tahun-tahun sebelumnya. Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan juga tidak tercantum dalam Renstra BPPK.

Target 2022	Realisasi 2022	Target Renstra	Target 2023	Realisasi 2023
-	-	-	100%	100%

8d-CP Persentase penyelesaian program IS RBTK

IKU ini bertujuan untuk memonitor dan memastikan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas. IKU ini mengukur capaian pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kemenkeu (termasuk *data analytics*). Persentase penyelesaian inisiatif Program IS RBTK dapat diukur secara berkala sesuai dengan rincian kegiatan yang dilaksanakan pada setiap milestone penyelesaian masing-masing inisiatif Program IS RBTK.

Transformasi Digital merupakan bagian dari Misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital.

Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut dalam *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) pada 19-20 Januari 2023 telah ditetapkan 23 Inisiatif Strategis Kemenkeu dan 13 Inisiatif Strategis Berbasis Project Data Analitik.

Persentase penyelesaian inisiatif Program IS RBTK dapat diukur secara berkala sesuai dengan rincian kegiatan yang dilaksanakan pada setiap milestone penyelesaian masing-masing inisiatif Program IS RBTK. Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot milestone (level 4) berdasarkan durasi sesuai dengan milestone IS di mana unit tersebut menjadi UIC Utama. Inisiatif Strategi dengan UIC BPPK adalah Penguatan Implementasi Pembelajaran Terintegrasi dan Manajemen Pengetahuan Kementerian Keuangan untuk Mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai Learning Organization.

Adapun Data Analytics dengan UIC BPPK adalah Rekomendasi Expert Locator/Penyusun Aset Intelektual.

Pada Periode Tahun 2023, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif 8d-CP Persentase penyelesaian program IS RBTK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%	Max/ TLKV
Realisasi	24,63%	52,28%	52,28%	82,80%	82,80%	99,58%	99,58%	
Capaian	107,09	113,65	113,65	120	120	108,24	108,24	

Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot *milestone* (level 4) berdasarkan durasi sesuai dengan milestone IS di mana unit tersebut menjadi UIC Utama. IS dengan UIC BPPK adalah Penguatan Implementasi Pembelajaran Terintegrasi dan Manajemen Pengetahuan Kementerian Keuangan untuk Mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai Learning Organization (IS KMS). *Data Analytics* dengan UIC BPPK adalah Rekomendasi *Expert Locator* v.2 (IS *Data Analytics Expert Locator* v.2).

Berikut ini adalah perbandingan capaian IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK pada unit-unit di Kementerian Keuangan.

				s.d. Desember		
No	UNIT	Target Raw	Realisasi Raw	Target IKU	Realisasi IKU	Capaian IKU
1	SETJEN	100.00%	99.94%	92.00%	99.94%	**108.63%**
2	DJA	100.00%	99.92%	92.00%	99.92%	**108.61%**
3	DJP	100.00%	99.78%	92.00%	99.78%	**108.45%**
4	DJBC	100.00%	99.83%	92.00%	99.83%	**107.51%**
5	DJPB	100.00%	99.83%	92.00%	99.83%	**108.51%**

No	UNIT	Target Raw	Realisasi Raw	Target IKU	Realisasi IKU	Capaian IKU
				s.d. Desember		
6	DJKN	100.00%	99.92%	92.00%	99.92%	108.61%
7	DJPK	100.00%	99.58%	92.00%	99.58%	108.24%
8	DJPPR	100.00%	100,00%	92.00%	100,00%	108,70%
9	ITJEN	100.00%	100.00%	92.00%	100.00%	108.70%
10	BKF	100.00%	100.00%	92.00%	100.00%	108.70%
11	BPPK	100.00%	99.58%	92.00%	99.58%	108.24%
12	LNSW	100.00%	98.56%	92.00%	98.56%	108,21%

Adapun akar masalah yang muncul terkait dengan pencapaian IKU ini yaitu FGD Finalisasi Laporan LO baru dapat dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2024, sehingga penyampaian Laporan Penilaian Tingkat Implementasi LO Tahun 2023 baru dapat dilaksanakan pada awal bulan Januari 2024, terlambat dari target awal untuk disampaikan pada Desember 2023.

Berbagai upaya telah dilakukan BPPK dalam rangka pencapaian IKU ini, antara lain:

1. Penyusunan usulan *Charter* dan *Work Breakdown Structure* (WBS) IS RBTK BPPK Tahun 2023.
2. Penyampaian usulan *Charter* dan WBS IS RBTK BPPK kepada CTO sebagai bagian dari IS RBTK Kemenkeu Tahun 2023.
3. Penetapan IS RBTK Kemenkeu Tahun 2023 melalui KMK Nomor 124 Tahun 2023.
4. Pelaksanaan Rapat *One-on-one* Pemantauan Progres Triwulanan dengan CTO pada tanggal 29 Maret 2023 (IS *Data Analytics Expert Locator* v.2) dan 4 April 2023 (IS KMS).
5. Pelaksanaan eksplorasi dan penambahan data untuk IS DA *Expert Locator* v.2
6. Persiapan penarikan data untuk IS DA *Expert Locator* v.2
7. Penyusunan kajian implementasi modul *reward system*
8. Pelaksanaan sosialisasi konsep pedoman terkait penghargaan/*reward system*
9. Perhitungan penghargaan/*reward system* Triwulan I
10. Pelaksanaan reviu *piloting* pembelajaran terintegrasi tahun 2022 oleh Pusdiklat (melalui mekanisme *After-Action Review*)
11. Pelaksanaan Reviu implementasi Manajemen Pengetahuan Kemenkeu
12. Pelaksanaan FGD Penyusunan Pedoman Operasional Pembelajaran Terintegrasi

13. Pelaksanaan Implementasi Pembelajaran Terintegrasi Triwulan I oleh Pusdiklat
14. Pelaksanaan Asistensi Pembelajaran Terintegrasi yang dikelola oleh Unit Pengguna Triwulan I
15. Pelaksanaan Reviu Periodik Implementasi Pembelajaran Terintegrasi Triwulan I oleh Pusdiklat
16. Penyusunan Kajian Penerapan Modul Identifikasi Pengetahuan
17. Pelaksanaan Implementasi Modul Penghargaan/*Reward* pada KMS
18. Perhitungan penghargaan/*reward system* Triwulan II
19. Pelaksanaan Implementasi Pembelajaran Terintegrasi Triwulan II oleh Pusdiklat
20. Pelaksanaan Asistensi Pembelajaran Terintegrasi yang dikelola oleh Unit Pengguna Triwulan II.
21. Pelaksanaan koordinasi dengan Tim Teknis UE I untuk integrasi KMS
22. Penarikan *data scheduler*
23. Pelaksanaan identifikasi kata non *mining full (stopwords)*
24. Pelaksanaan reviu Periodik Implementasi Pembelajaran Terintegrasi Triwulan II oleh Pusdiklat
25. Penetapan proses integrasi data aset intelektual (KMS Itjen dan KMS Kemenkeu)
26. Pelaksanaan audiensi dan Koordinasi Pembobotan Kriteria Keahlian
27. Pelaksanaan Evaluasi model *indexing, weighting, sorting*, dan *ranking*.
28. Penyampaian unit sample penilaian *Learning Organozation* (LO)
29. Pelaksanaa Implementasi Pembelajaran Terintegrasi Triwulan III oleh Pusdiklat
30. Pelaksanaan Asistensi Pembelajaran Terintegrasi yang dikelola oleh Unit Pengguna Triwulan III
31. Pelaksanaan Reviu Periodik Implementasi Pembelajaran Terintegrasi Triwulan III oleh Pusdiklat
32. Perhitungan penghargaan/reward system Triwulan III
33. Pelaksanaan *Self Assessment* penilaian *Learning Organozation* (LO)
34. Pelaksanaan Survei Online penilaian *Learning Organozation* (LO)
35. Penambahan fitur integrasi pada KMS
36. Pelaksanaan *Pagination* dan *Filtering* Aplikasi *Expert Locator* v.2
37. Pelaksanaan UAT dan pengajuan hosting Aplikasi Expert Locator v.2
38. Pelaksanaan Sosialisasi dan promosi ke Unit Pengelola MP dan SDM

39. Pemberian Penghargaan KM bagi pegawai dan Unit yang berkontribusi pada penyusunan Aset Intelektul pada KMS
40. Penilaian Komite dan Penyusunan Laporan Penilaian *Learning Organization* (LO)
41. Perhitungan penghargaan/reward system Triwulan IV
42. Pengembangan Modu Identifikasi Pengetahuan
43. Penyusunan Dokumen Analisis Pemanfaatan Aset Intelektual
44. Pelaksanaan Implementasi Pembelajaran Terintegrasi Triwulan IV oleh Pusdiklat
45. Pelaksanaan Asistensi Pembelajaran Terintegrasi yang dikelola oleh Unit Pengguna Triwulan IV
46. Pelaksanaan Reviu Periodik Implementasi Pembelajaran Terintegrasi Triwulan IV oleh Pusdiklat
47. Pelaksanaan Integrasi KMS dengan KMS Itjen dan Biro KLI

Sementara itui rencana aksi untuk dapat dilaksanakan di tahun 2024 adalah monitoring pencapaian IS RBTK tahun 2024 dengan UIC Sekretariat BPPK dan Komite Learning Organization 2024.

IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK diimplementasikan sejak tahun anggaran 2020 dengan nama IKU Persentase Penyelesaian IS Kemenkeu. Berikut ini adalah perbandingan target IKU dan realisasi IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK 2020-2024.

Tabel 3. 25 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTK

	2020	2021	2022	2023
Target Renstra	-	-	-	-
Target IKU	85%	85%	92%	92%
Realisasi	93,42%	98,16%	94,6%	99,58%

8e-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Indeks efektivitas ekosistem kehumasan merupakan salah satu IKU mandatory di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi

2023. IKU ini merupakan penyempurnaan dari IKU efektivitas komunikasi publik yang telah diterapkan pada tahun 2021.

IKU ini terdiri atas lima unsur pengukuran sebagai berikut.

Unsur 1 : Efektivitas komunikasi publik, dengan bobot 25%.

Mengukur Kampanye komunikasi publik oleh Biro KLI di luar (non) agenda setting.

Variable pengukuran komunikasi publik yang efektif meliputi empat tahapan yang komprehensif berikut.

a. Tahapan input, dengan bobot 20%. Tahapan ini diukur melalui ketersediaan dan kesesuaian dokumen strategi komunikasi dengan implementasi taktik.
b. Tahapan output, dengan bobot 40%. Tahapan ini diukur berdasarkan pemenuhan output atas indikator keberhasilan yang disusun.
c. Tahapan outtakes, dengan bobot 30%. Tahapan ini diukur melalui survei dengan kuesioner kepada target audience, peserta kegiatan, wartawan/media untuk mengetahui apakah pesan kunci pada suatu taktik tersampaikan dengan baik.
d. Tahapan outcome, dengan bobot 10%. Tahapan ini diukur melalui survei kuesioner kepada publik umum untuk mengetahui apakah tujuan dari kampanye tercapai.

Unsur 2 : Partisipasi agenda setting (kolaborasi), dengan bobot 35%.

Unsur pengukuran ini dilakukan dengan item penilaian sebagai berikut.

a. Partisipasi Penyusunan Agenda Setting (40%)
b. Nilai 100 apabila menyampaikan data/informasi. Nilai 0 apabila tidak menyampaikan data/informasi.
c. Implementasi taktik (30%)
d. Nilai 0-100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi taktik.
e. Implementasi pesan kunci (30%)
f. Nilai 0-100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi pesan kunci.

Unsur 3 : Employee advocacy (pemangku tugas komunikasi), dengan bobot 10%.

Mengukur partisipasi pegawai Biro KLI dalam mengampilifikasi konten Kemenkeu di program Employee Advocacy sesuai dengan taktik topik proaktif Agenda Setting.

Unsur 4 : Penanganan isu negatif, dengan bobot 25%.

a. Merupakan upaya dalam mengedukasi publik dan merespon sentimen negatif terkait kebijakan Kemenkeu.
b. Tingkat penanganan isu negatif mengukur respon terhadap isu negatif melalui akun media sosial atau taktik komunikasi lain berdasarkan rekomendasi strategi komunikasi untuk ditindaklanjuti.
c. Isu negatif akan dilaporkan dalam bentuk laporan analisis media cetak dan sosial atau news update yang disertai rekomendasi strategi komunikasi sebagaimana yang terdapat dalam aplikasi EKSIS untuk ditindaklanjuti, dan dilengkapi dengan Ms Teams sebagai media kolaborasi (apabila ada isu negatif yang tidak termuat dalam laporan analisis pagi dan sore media cetak, online, dan medsos, dapat dibuatkan laporan News Update)
d. Respon tindak lanjut rekomendasi dapat melalui akun media sosial akun resmi atau pun white label.
e. Penggunaan aplikasi EKSIS efektif mulai Semester 2 tahun 2023. Apabila Pusintek belum dapat memfasilitasi aplikasi EKSIS pada semester 2, maka proses dilakukan melalui Collaboration Tools.

Unsur 5 : Implementasi hasil Rakor Kehumasan dengan bobot 5%.

Merupakan upaya dalam menyukseskan program-program kolaborasi hasil Rakor Kehumasan Kemenkeu yang melibatkan kolaborasi Biro KLI sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal dengan antar unit eselon I maupun dengan SMV yang diharapkan lebih efektif, efisien dari sisi anggaran dan SDM, serta optimal dalam menambah daya jangkau programnya.

Sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2023, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	8e-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	100	100	-	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	N/A	108,45	108,45	-	108,45	120	120	
Capaian	N/A	108,45	108,45	N/A	108,45	120	120	

Kendala yang muncul pada pencapaian IKU ini adalah BPPK tidak memiliki tupoksi secara langsung atau yang berhubungan langsung dengan pesan kunci/narasi utama. Tindakan yang telah dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan IV adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi secara intens dengan Biro KLI
2. Pelaksanaan aktivasi konten media massa, melalui siaran pers Wisuda PKN STAN
3. Pengadministrasian *Employee Advocacy*

Adapun rekomendasi rencana aksi yang dapat dilaksanakan pada tahun 2024 adalah melakukan aktivasi event, dan media sosial dengan Unit BPPK dan/atau Unit Eselon I.

Tabel 3. 26 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

	2021	2022	2023
Target Renja BPPK	-	-	3,55
Target Restra BPPK	-	-	-
Target IKU	3,55	3,55	100
Realisasi	3,75	3,91	120

IKU indeks efektivitas ekosistem kehumasan adalah IKU yang sudah ada sejak tahun 2021, namun pada tahun 2023 terdapat formulasi IKU sehingga target dan capaiannya tidak bisa diperbandingkan secara langsung.

8f-CP Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif, Kementerian Keuangan melakukan Melakukan kegiatan penguatan budaya di lingkungan Kementerian Keuangan melalui upaya menumbuhkan dan membudayakan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif pegawai berdasarkan strategi internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi, sehingga pegawai dapat menyadari, memahami dan menerima/menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan efektif berbasis *core values* ASN dan nilai-nilai Kemenkeu yang perlu dibudayakan dalam rangka mendukung produktivitas dan kinerja pegawai dalam pola kerja baru dengan tepat sasaran serta melakukan pengukuran terkait penguatan budaya kepada pegawai yang telah mengikuti kegiatan penguatan budaya tersebut.

Tujuan dari IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu adalah Untuk mendorong produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai yang memiliki nilai-nilai, sikap dan perilaku/kebiasaan efektif yang mendukung dan sesuai dengan pola kerja baru dan arah transformasi organisasi.

FORMULA IKU

1. Pelaksanaan Internalisasi Penguatan Budaya sesuai KMK Nomor 429/KMK.01/2022 dan SE Nomor SE-15/MK.1/2022 (50%)	
a. Internalisasi Penguatan Budaya di UEI	20%
b. Penguatan Budaya Integritas oleh UE I	10%
c. Monitoring pelaksanaan E-learning Penguatan Budaya	20%
2. Monitoring dan Evaluasi Penguatan Budaya Kemenkeu (50%)	
a. Rata-Rata Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu	40%
b. Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Kemenkeu kepada Setjen c.q. Biro SDM	10%

Sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2023, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif 8f-CP Tingkat kematangan budaya Kemenkeu satu							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y-23**	**Pol/KP**
Target	-	20	20	-	20	100	100	Max/TLKV
Realisasi	N/A	30	30	35	35	108,67	108,67	
Capaian	N/A	120	120	N/A	120	108,67	108,67	

Rincian dari realisasi IKU Tingkat kematangan Budaya Kemenkeu Satu adalah sebagai berikut,

No.	Rincian Kegiatan	
1	Telah melaksanakan lebih dari 2 kegiatan internalisasi Penguatan Budaya di Lingkungan BPPK	10%

No.	Rincian Kegiatan	
2	Telah Mmelakukan monitoring pelaksanaan E-Learning Penguatan Budaya Semester I di Lingkungan BPPK dengan jumlah peserta yang mengikuti E-Learning > 80%	10%
3	Telah melakukan monitoring pelaksaaan e-learning Penguatan Budaya semester II di Lingkungan BPPK dengan jumlah peserta yang mengikuti > 80%	10%
4	Telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Kemenkeu Semester I di Lingkungan BPPK	5%
5	Penguatan budaya integritas di lingkungan BPPK melalui hasil monev atas realisasi sosialisasi antikorupsi oleh Itjen dengan nilai 76,05	7.60%
6	Pelaksanaan habituasi budaya oleh seluruh duta transformasi	10%
7	Rata-rata tingkat kematangan Budaya Kemenkeu di lingkungan BPPK - memiliki = 11,56% - menerapkan = 22,87% - paham = 16,64%	51.07%
8	Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Kemenkeu Semester II di Lingkungan BPPK	5.00%
	Realisasi	**108.67%**

Akar masalah yang muncul pada IKU "Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu" adalah sebagai berikut:

1. Munculnya banyak perilaku negatif yang dilakukan oleh pegawai.
2. Dengan munculnya kasus RAT yang mengurangi kepercayaan masyarakat pada Kementerian Keuangan, perlu memperkuat karakter pegawai dengan cara memperkuat budaya kemenkeu.
3. Hasil survey BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kemenpan RB menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki nilai paling rendah pada aspek HARMONIS.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 antara lain:

1. Pelaksanaan *benchmark* Budaya Organisasi ke PLN pada tanggal 10 Maret.
2. Pelaksanaan FGD Pembahasan *Roadmap* Penguatan Budaya Kementerian Keuangan bersama Biro SDM.
3. Pelaksanaan audiensi hasil survei BerAKHLAK bersama konsultan dan Biro SDM.
4. Penyusunan strategi penguatan budaya nilai Harmonis.

5. Pelaksanaan Internalisasi Penguatan Budaya Kemenkeu pada tanggal 22 Juni 2023 dan Kemenkeu Corpu Talk: Kemenkeu Satu Santun Berbudaya pada tanggal 9 Mei 2023
6. Pelaksanaan sosialisasi antikorupsi sebagai bagian dari budaya integritas dengan jumlah kegiatan 17 frekuensi.
7. Pelaksanaan *e-learning* budaya kemenkeu melalui KLC dengan capaian peserta 96,21%
8. Pengiriman laporan Penguatan Budaya Kemenkeu Semester I di Lingkungan BPPK melalui Nota Dinas nomor ND-2727/PP.1/2023 tanggal 20 Juli 2023.
9. Penyelenggaraan Family Day Kemenkeu bertema Integritas.
10. Penugasan para *Change Agent* untuk membuat konten bertema integritas dan menyebarkannya.
11. Penugasan para *Change Agent* untuk membuat kegiatan penguatan *engagement* pegawai.
12. Pelaksanaan survei penguatan budaya Kemenkeu
13. Pelaksanaan sosialisasi habituasi budaya oleh Biro SDM
14. Pelaksanaan habituasi budaya oleh para Duta transformasi sampai dengan 30 November 2023
15. Pelaksanaan habituasi budaya oleh seluruh duta transformasi (10%)
16. Pelaksanaan E-learning budaya organisasi telah diikuti oleh 96% pegawai BPPK di semester I dan II (10%)
17. Pengiriman Laporan pelaksanaan budaya semester II (5%)
18. Pencapaian hasil survey tingkat kematangan budaya sesuai dengan target (40%)

Adapun untuk rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2024 adalah penerapan dan sosialisasi budaya Kemenkeu Satu dengan UIC Sekretariat BPPK c.q. Bagian SDMKI.

Salah satu kejadian risiko (risk event) yang berpotensi berpengaruh terhadap IKU tingkat kematangan budaya kemenkeu satu adalah loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi. Terkait dengan risiko ini, rencana mitigasi yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Rencana Mitigasi	Waktu Pelaksanaan
1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi anti korupsi, penguatan budaya Kemenkeu dan kode etik secara berkelanjutan	Sepanjang tahun 2023
2. Melaksanakan kegiatan yang dapat menumbuhkan loyalitas dan *engagement* pegawai.	Sepanjang tahun 2023

Hingga akhir tahun 2023, mitigasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kegiatan internalisasi penguatan budaya Kementerian Keuangan
2. Pelaksanaan pembelajaran penguatan budaya organisasi Kementerian Keuangan
3. Pemberian pembinaan dan/atau sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran yang tergolong hukuman disiplin dan pelanggaran kode etik
4. Penyelenggaraan kegiatan yang dapat menumbuhkan penguatan *engagement* dan integritas pegawai.

Langkah-langkah mitigasi tersebut membuat risiko ini turun dari level sangat tinggi menjadi sedang. Berikut ini adalah grafik yang mengilustrasikan penurunan level risiko.

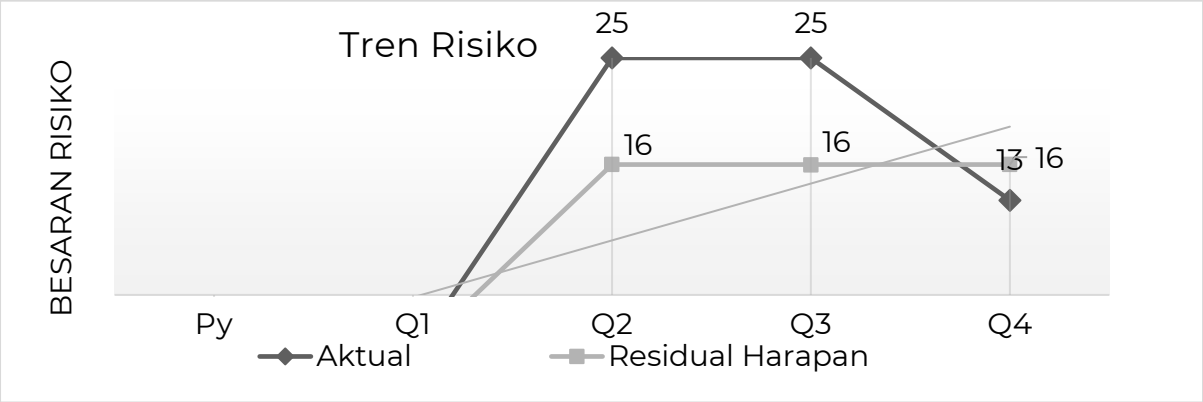

IKU Tingkat kematangan budaya Kemenkeu satu merupakan IKU baru di tahun 2023 sehingga capaian IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Target 2022	Realisasi 2022	Target Renstra	Target 2023	Realisasi 2023
-	-	-	100%	108,67%

SS-9. PENGUATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN YANG OPTIMAL

Pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Pengelolaan BMN yang produktif adalah apabila seluruh BMN telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan dua buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan berikut.

Tabel 3. 27 : SS Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal			117,33
9a-CP	Tingkat penggunaan aset bersama	45%	120%	120
9b-N	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100,00	114,66	114,66

Indeks capaian untuk SS ini adalah **117,33**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU adalah sebagai berikut.

9a-CP Tingkat Penggunaan Aset Bersama

IKU ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan melalui optimalisasi penggunaan aset bersama. Masih terdapat penggunaan aset yang belum optimal pada unit eselon I lain namun pada sisi lain masih terdapat unit eselon I lain yang masih melakukan sewa gedung untuk kantor dengan biaya yang cukup

tinggi serta masih terdapat beberapa satker yang penggunaan BMN belum sesuai SBSK di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan asset dan meningkatkan efisiensi biaya pengelolaan asset, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan berusaha mendorong kepatuhan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan menginisiasi penggunaan asset bersama pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja terkait implementasi SBSK dan penggunaan aset bersama.

IKU "Tingkat penggunaan Aset Bersama" diukur melalui tiga komponen sebagai berikut.

a) Persentase jumlah satker yang implementasikan SBSK (bobot: 50%). Tingkat kesesuaian SBSK gedung kantor yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja Kementerian Keuangan.
b) Persentase pengurangan jumlah satker yang belum memiliki gedung kantor (bobot: 30%). Pengurangan jumlah satker Kementerian Keuangan yang belum memiliki gedung kantor sendiri.
c) Persentase pengurangan biaya sewa (bobot: 20%). Pengurangan biaya sewa gedung kantor satuan kerja Kementerian Keuangan.

Sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2023, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	9a-CP Tingkat Penggunaan Aset Bersama							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	45%	45%	Max/ TLKV
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120%	120%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Realisasi IKU Tingkat penggunaan aset bersama diukur oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Realisasi IKU di tahun 2023 adalah 120% yang diperoleh dari realisasi komponen 1 (Persentase jumlah satker yang mengimplementasikan SBSK).

Permasalahan yang muncul pada pencapaian IKU ini adalah *database* SIMAN v2 terkait SBSK pada satker di lingkungan BPPK belum sepenuhnya valid sehingga ketika dilakukan penilaian menjadi rendah dan perlu dilakukan pemutakhiran.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan profiling BMN terhadap seluruh satker BPPK untuk menentukan tingkat efisiensi penggunaan BMN Gedung Kantor.
2. Pelaksanaa koordinasi dengan KPKNL/DJKN untuk melakukan penilaian terkait SBSK di satker lingkungan BPPK.
3. PelaksanaaKoordinasi dengan satuan kerja (salah satunya memperbaiki kode klasifikasi BMN) agar nilai SBSK satuan kerja lebih akurat.
4. Penyelesaian tindak lanjut melalui alih fungsi dan menyampaikannya melalui nota dinas ke KPKNL setempat.

Rekomendasi rencana aksi untuk dilakukan UIC Setban dan seluruh satuan kerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data profiling BMN dan perhitungan kertas kerja SBSK di lingkungan BPPK
2. Memerintahkan kepada satuan kerja untukberkoordinasi dengan KPKNL setempat melakukan penilaian kembali SBSK Tanah dan Bangunan Gedung
3. Melakukan pemantauan realisasi perhitungan SBSK di lingkungan BPPK

Tabel 3. 28 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Penggunaan Aset Bersama

	2020	2021	2022	2023
Target Renstra	-	-	-	-
Target IKU	-	-	25%	45%
Realisasi	-	-	110%	120%

9b-N Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas pengelolaan kuangan BA 015, dimana IKU ini mengukur rata-rata pencapaian dari tiga buah sub-IKU berikut.

1. Indeks Kualitas pelaporan keuangan BA015

2. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu
3. Tingkat efisiensi belanja birokrasi.

Pada periode Tahun 2023, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
	9b-N Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLKV
Realisasi	120	116,43	116,43	116,51	116,51	114,66	114,66	
Capaian	120	116,43	116,43	116,51	116,51	114,66	114,66	

Perincian realisasi atas tiga sub-IKU adalah sebagai berikut.

1. Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA015 sampai dengan periode Triwulan IV memiliki target 90,40 dan realisasi 98,05 sehingga capaian sub-IKU ini adalah 108,46.
2. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu sampai dengan Triwulan IV memiliki target 100 dan realisasi 115,52 sehingga capaian sub-IKU ini adalah 115,52.
3. Indeks efisiensi belanja birokrasi sampai dengan Triwulan IV 2023 memiliki target 85 dan realisasi 146 sehingga capaian sub-IKU ini adalah 120.

Akar masalah dari IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Pada sub-IKU indeks kualitas pelaporan keuangan BA015
   Sampai dengan Desember 2023, pelaksanaan Audit BPK terhadap LK BA 015 sudah selesai, sehingga realisasi IKU dari unsur nilai opini BPK sudah dapat dihitung (100). Namun demikian, masih ada rekomendasi yang masih dalam proses disebabkan masih dalam penagihan oleh PUPN dan menunggu hasil Pembahasan Tindak Lanjut (PTL) Semester II TA 2023, apakah dapat ditagih sesuai hasil reviu Itjen atau tidak.
2. Pada sub-IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
   a. Indikator deviasi Hal III DIPA belum maksimal karena terdapat 7 (tujuh) satker yang memiliki deviasi lebih dari 5%, hal tersebut dikarenakan adanya pergeseran kegiatan dari yang telah direncanakan sebelumnya;
   b. Indikator penyerapan anggaran belum maksimal karena sebagian besar kegiatan pembelajaran klasikal terlaksana di semester II serta kegiatan

pengadaan untuk renovasi di sebagian besar satker diselesaikan pada triwulan akhir;

c. Indikator belanja kontraktual belum maksimal karena terdapat kontrak belanja modal dengan nilai 50jt-200jt yang dilakukan pembayaran pada triwulan II, III, dan IV;
d. Indikator penyelesaian tagihan belum maksimal karena terdapat keterlambatan penyelesaian 2 (dua) tagihan;
e. Indikator pengelolaan UP dan TUP belum maksimal karena terdapat nilai persentase GUP yang belum optimal dan terdapat setoran sisa TUP;
f. Indikator penyerapan SMART belum maksimal karena terdapat kegiatan yang dapat diefisiensikan realisasi anggarannya;
g. Indikator konsistensi belum maksimal karena realisasi anggaran yang tidak tercapai 100% di bulan Desember 2023;
h. Indikator efisiensi dan nilai efisiensi belum maksimal karena capaian sasaran program dan capaian output program telah melebihi target yang ditetapkan namun belum maksimal dan penyerapan anggarannya tinggi; dan
i. Indikator rata-rata NKA Satker sebesar 98,06 hal ini dikarenakan oleh nilai penyerapan yang belum optimal dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

3. Pada sub-IKU Indeks efisiensi belanja birokrasi
   a. Bagian Keuangan tidak memiliki kendali penuh atas implementasi IKU tersebut.
   b. Terdapat kesulitan dalam penentuan komponen perhitungan IKU Efisiensi belanja birokrasi.
   c. Terdapat perubahan metode pengukuran Kertas Kerja dan Proposal Efisiensi Belanja Birokrasi.

Adapun rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Pada sub-IKU indeks kualitas pelaporan keuangan BA015
   a. Melakukan asistensi dan bimbingan teknis kepada Satker dalam penyusunan Laporan Keuangan berikutnya agar sesuai dengan rekomendasi dan kebijakan.
   b. Melakukan asistensi dan bimbingan kepada Satker dalam rangka pencatatan dan pelaporan TGR.
   c. Melakukan koordinasi dengan satker terkait progress penagihan piutang yang telah diserahkan ke PUPN.

d. Melakukan koordinasi ke satker terkait tindak lanjut temuan pemeriksaan pada LHP BPK atas LK TA 2023

2. Pada sub-IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
   a. Melakukan monitoring kinerja anggaran secara intensif kepada satker dan unit kerja di lingkungan BPPK;
   b. Mendorong satker agar melakukan koordinasi intensif dengan pemilik kegiatan (Bagian, Bidang, Seksi) untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dan belanja sesuai dengan rencana (RUP dan RPD hal III DIPA);
   c. Memastikan satker melakukan pemutakhiran RPD hal. III DIPA setiap triwulan sesuai ketentuan yang berlaku,serta deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen);
   d. Mendorong satker agar melakukan akselerasi kegiatan dan belanja, khususnya belanja barang dan modal;
   e. Memastikan pengadaaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200 juta (dua ratus juta rupiah) diselesaikan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024;
   f. Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024;
   g. Menghimbau satker agar mengajukan SPM maksimal H-2 sebelum akhir bulan agar SP2D terbit pada bulan tersebut;
   h. Menghimbau satker untuk meminimalkan jumlah UP/TUP sesuai dengan kebutuhan riil, melakukan revolving UP lebih dari satu kali dalam satu bulan, serta melakukan perhitungan TUP secara presisi untuk meminimalkan pengembalian TUP; dan
   i. Mendorong tercapainya sasaran program, output program, dan rincian output yang maksimal.

3. Pada sub-IKU Tingkat efisiensi belanja birokrasi tidak terdapat rekomendasi rencana aksi karena sub-IKU ini tidak diterapkan kembali di tahun 2024.

Tabel 3. 29 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015

Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
90	95,79	100	112,78	100	114,66

SS-10. PENGUATAN EKOSISTEM TIK YANG KOLABORATIF

Sistem manajemen informasi yang andal akan terwujud dengan adanya penguatan pengelolaan layanan TIK yaitu melalui ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau *Business Impact Analysis* (BIA).

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan sebuah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan berikut.

Tabel 3. **30 :** SS Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
10	**Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif**			**114,35**
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	114,35%	114,35

Indeks capaian untuk SS ini sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah **114,35**. Adapun perincian dan penjelasan IKU adalah sebagai berikut.

10a-CP Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK

IKU ini mengukur kualitas pengelolaan sistem TIK Kemenkeu melalui 2 Sub-IKU yaitu:

1. Penyelesaian proyek strategis TIK
2. Penyelesaian data analytics

Proyek strategis BPPK berupa pengembangan KLC 2.4 dilaksanakan dengan tahapan berdasarkan KMK No. 798/KMK.01/2019.

Penyelesaian *data analytics* ialah pengembangan aplikasi *Expert Locator* dimana aplikasi ini berfungsi untuk mencari orang-orang yang *expert* di bidang keuangan

negara atau bidang lainnya dengan menerapkan metode dan teknik analitik, sehingga memudahkan *user* dalam mencari *expert* yang ada.

FORMULA IKU

Realisasi = Rata-rata capaian proyek strategis dan capaian *data analytics*

Sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2023, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif 10a-CP Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	110%	114,35%	114,35%	118,27%	118,27%	114,35%	114,35%	
Capaian	110	114,35	114,35	118,27	118,27	114,35	114,35	

Terdapat kendala dalam pencapaian IKU ini, yaitu :

1. Terdapat update teknologi yang diperlukan dan banyak masukan dan saran dari stakeholder untuk dilakukan penyesuaian fitur/modul.
2. Keamanan informasi dan update teknologi *data center*

Meskipun terdapat kendala dalam pencapaian IKU ini namun IKU Tingkat pengelolaan sistem TIK tetap memperoleh realisasi diatas target. Beberapa kegiatan/tindakan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU Tingkat pengelolaan sistem TIK ini adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Koordinasi dengan Pusdiklat dan Balai Diklat dengan didampingi Bagian OTL, rekapitulasi dan laporan masukan-masukan pengembangan KLC 2.4 dari Pusdiklat dan Balai Diklat, serta penetapan dokumentasi perencanaan, analisis, rancangan, tampilan mockup, pengembangan *back-end* dan *front-end* sistem KLC 2.4, dan penyusunan manual pengguna.
2. Pengembangan *expert locator* (*data analytics*) *front-end* dan *back-end* sebagian telah dilaksanakan dan memastikan progressnya selesai sesuai tahapan pengembangan dan timeline.

3. Pelaksanaan pengembangan KLC 2.4 sesuai dengan tahapan pengembangan dan timeline.
4. Pengembangan aplikasi pada sisi *back-end* (paralel sd Oktober).
5. Pengembangan aplikasi pada sisi *front-end* (paralel sd Oktober).
6. Penyusunan dokumen Perubahan Analisis Kebutuhan dan Spesifikasi Sistem KLC 2. 4 (paralel sd September).
7. Penyusunan *Mock Up*.
8. Pelaksanaan FGD Sosialisasi ke tiap eselon 2 di BPPK dan eselon 1 Kemenkeu untuk *expert locator*.
9. Perbaikan aplikasi sesuai dengan masukan pada kegiatan Sosisalisai dan FGD untuk *expert locator.*

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode berikutnya adalah melakukan pemeliharaan performa aplikasi.

IKU "Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK" ini sebenarnya sudah diterapkan pada tahun 2022 namun terdapat perubahan formula IKU pada tahun 2023 sehingga capaian pada tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian 2022. Namun demikian, IKU ini memiliki sub-IKU "Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK" yang telah tercantum dalam Renstra BPPK 2020-2024 Berikut ini adalah tabel yang mengilustrasikan perbandingan target renstra/renja, target IKU, realisasi, dan capaian sub-IKU Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK 2020-2024.

Tabel 3. 31 : Perbandingan Target dan Realisasi sub-IKU Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK

	2020	2021	2022	2023
Target Renstra	85%	87%	90%	92%
Target IKU	85%	87%	90%	92%
Realisasi IKU	100%	100%	100%	111%

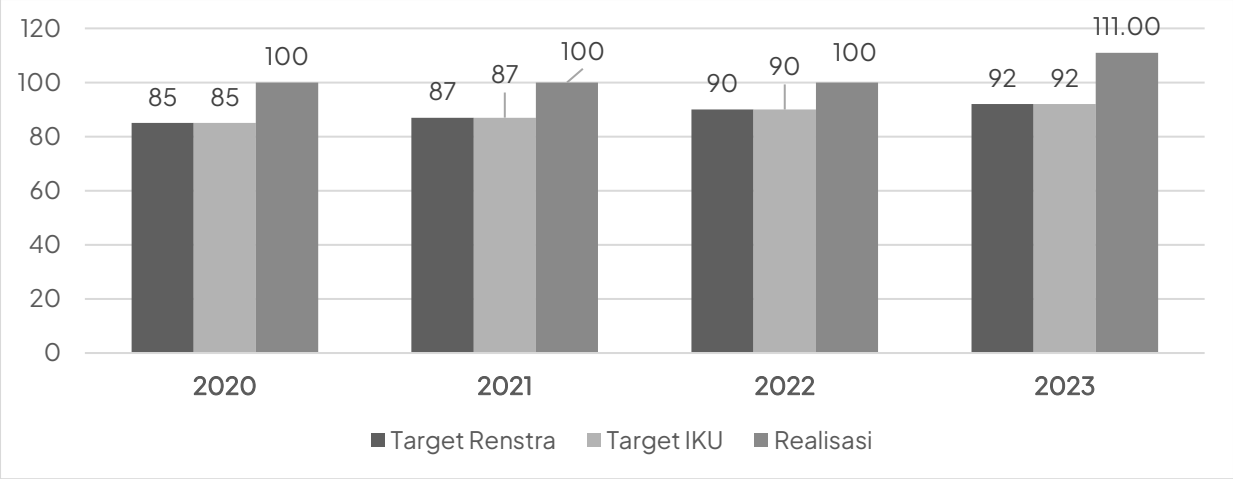

SS-11. PENGUATAN PENGAWASAN-PENGENDALIAN INTERNAL YANG EFEKTIF

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeudicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasikan sebuah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan berikut.

Tabel 3. 32 : SS Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
11	**Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter**			**110,17**
11a-CP	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal	82	90,34	110,17

Sampai dengan triwulan IV capaian untuk SS ini adalah **110,17.** Adapun perincian dan penjelasan IKU adalah sebagai berikut.

11a-CP Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan.

Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 3 komponen sebagai berikut:

Komponen penghitungan IKU Indeks Efektivitas UKI adalah sebagai berikut:

A. **Komponen Pengungkit (Bobot 25%)**
   - Komitmen pimpinan (7,5%)
   - Dukungan Sumber Daya Manusia (7,5%)
   - Akses Data dan Informasi (5%)
   - Komunikasi (5%)

B. **Komponen Proses (25%)**
   - Pemilihan Probis yang dipantau (4%)
   - Penyusunan RCM dan FRS (4%)
   - Profiling Pegawai (4%)
   - Penyusunan Program Kerja (3%)
   - Pelaksanaan Pemantauan (3%)
   - Penarikan simpulan pengendalian internal (3%)
   - Pelaporan pengendalian internal (4%)

C. **Komponen Hasil (Bobot 50%)**
   - Penanganan Pengaduan Masyarakat (15%)
   - Penyelesaian Laporan Informasi di aplikasi J3Li (15%)
   - Kejadian tangkap tangan (20%)

FORMULA IKU

Indeks Efektivitas UKI	=	Nilai Komponen Pengungkit + Nilai Komponen Proses + Nilai Komponen Hasil

Rincian realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

BPPK	SS: Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif 11a-CP Indeks Efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	82	82	Max/TLKV
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90,34	90,34	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	110,17	110,17	

Indeks efektivitas UKI didapatkan dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat VI sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST-2132/IJ/IJ.1/2023 tanggal 23 November 2023. Penilaian dilakukan pada UKI-I BPPK dan empat UKI-II di lingkungan BPPK sebagai sampel yaitu BDK Palembang, BDK Cimahi, BDK Yogyakarta, dan BDK Manado. Penilaian dilakukan terhadap kondisi maupun kegiatan yang dilakukan oleh UKI BPPK selama bulan November Tahun 2022 s.d. Oktober Tahun 2023. Dari hasil penilaian tersebut diperoleh Indeks Efektivitas UKI BPPK sebesar 90,34.

Dalam pencapaian IKU Indeks Efektiviyas UKI terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Dengan adanya mutasi terbaru maka terdapat beberapa PIC UKI yang belum mendapatkan pelatihan terkait UKI.
2. Belum semua pegawai memahami sepenuhnya terkait ketentuan disiplin, kode etik, dan kode perilaku.
3. Terdapat perubahan manual IKU Indeks Efektivitas UKI berdasarkan ND-435/IJ.8/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang kemudian dilakukan penyeseuain kembali berdasarkan ND-718/IJ.8/2023 tanggal 21 November 2023.

Meskipun terdapat kendala dalam pencapaian IKU ini namun IKU Indeks Efektivitas UKI tetap memperoleh realisasi diatas target. Beberapa kegiatan/tindakan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Pembaharuan data SDM UKI berdasarkan Jadwal Pelaksanaan Pemantauan dan Sumber Daya Pemantauan masing-masing UKI.
2. Pelaksanaan pengajuan pengembangan kompetensi UKI bagi PIC yang belum mendapatkan pelatihan terkait UKI. Beberapa pelatihan sudah mulai dan sedang dilaksanakan sesuai usulan pelatihan.
3. Pelaksanaan EPITE pada 3 BDK yaitu BDK Palembang, BDK Medan, dan BDK Pontianak dan 7 unit pusat yaitu Sekretariat Badan, Pusdiklat AP, Pusdiklat BC, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat KNPK, Pusdiklat KM, dan Pusdiklat KU.
4. Pelaksanaan rapat secara rutin dengan para PIC UKI di seluruh unit BPPK untuk menyampaikan hal-hal yang penting pada bulan tersebut.
5. Pelaksanaan PPU secara rutin setiap bulan sebagai bentuk Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas.

6. Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku pada tanggal 31 Juli sd 18 Agustus 2023.
7. Pelaksanaan rapat koordinasi pelaksanaan EPITE pada seluruh balai diklat
8. Persiapan penyusunan EKR dan RPT
9. Pelaksanaan *entry meeting* dan *closing* meeting penilaian indeks efektivitas UKI.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan rapat koordinasi UKI seluruh BPPK secara rutin dan dalam kesempatan tertentu juga mengundang Itjen agar informasi terkait KI tersampaikan 2 arah.
2. Mengikutsertakan pegawai UKI yang baru dalam pelatihan UKI.
3. Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian indeks efektivitas UKI.

IKU Indeks efektivitas UKI merupakan IKU yang baru di tahun 2023 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini juga tidak terdapat dalam Renstra BPPK.

Target 2022	Realisasi 2022	Target Renstra	Target 2023	Realisasi 2023
-	-	-	82	90,34

C. Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran BPPK Periode Tahun 2023

Sampai dengan berakhirnya tahun 2023 BPPK melakukan realisasi anggaran sebesar Rp421.089.197.000,00 atau 96,41% dari total pagu sebesar Rp 436.749.612.000,00.

Berikut ini adalah realisasi anggaran BPPK sampai dengan akhir periode tahun 2023 menurut jenis belanja.

Tabel 3. 33 : Realisasi Anggaran BPPK Periode Tahun 2023 Menurut Jenis Belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Belanja Pegawai	9.876.406.000	9.517.666.000	96,37%
2	Belanja Barang	364.361.763.000	353.648.826.000	97,06%
3	Belanja Modal	62.511.443.000	57.922.705.000	92,66%
	Jumlah	**436.749.612.000**	**421.089.197.000**	**96,41%**

Berikut ini adalah tabel perbandingan pagu anggaran dan realisasi anggaran BPPK menurut jenis belanja tahun 2022 dengan tahun 2023.

Tabel 3. 34 : Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran BPPK 2022 dan 2023 Menurut Jenis Belanja

No	Uraian	2022			2023		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)
1	Belanja Pegawai	52.752.502	51.711.867	98,03%	9.876.406	9.517.666	96,37%
2	Belanja Barang	319.040.393	281.372.899	88,19%	364.361.763	353.648.826	97,06%
3	Belanja Modal	56.728.539	56.191.829	99,05%	62.511.443	57.922.705	92,66%
	Jumlah	428.521.434	389.276.595	90,84%	436.749.612	421.089.197	96,41%

Realisasi belanja BPPK sampai dengan periode 31 Desember 2023 mencapai 96,41% (terserap Rp421,09M dari pagu Rp436,75M) dengan rincian Belanja Pegawai 96,37% (terserap Rp9,52M dari pagu Rp9,88M), Belanja Barang 97,06% (terserap Rp353,65M dari pagu Rp364,36M), dan Belanja Modal 92,66% (terserap Rp57,92M dari pagu Rp62,51M).

Realisasi belanja rupiah murni mencapai 96,68% (terserap Rp401,71M dari paguRp415,5M), sedangkan realisasi belanja BLU mencapai 91,18% (terserap Rp19,38M dari pagu Rp21,25M). Agar mendapatkan nilai indikator penyerapan anggaran IKPA yang optimal pada triwulan IV BPPK harus melakukan realisasi rupiah murni sebesar 90,12% (terserap RpRp303,42M dari pagu netto rupiah murni Rp336,7M) sehingga sampai dengan periode ini masih terdapat kekurangan penyerapan anggaran sebesar Rp-20,96M.

Realisasi belanja pegawai hanya terdiri dari uang makan dan lembur dengan realisasi uang makan sebesar 97,34% (terserap Rp9,32M dari pagu Rp9,58M) dan realisasi uang lembur sebesar 65,09% (terserap Rp194,55JT dari pagu Rp0,3M).

Tabel 3. 35 : Realisasi Anggaran BPPK Periode Tahun 2023 Menurut Kegiatan

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
4678	Legislasi dan Litigasi	3.960.000	0	0,00
4679	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	117.940.223.000	112.486.975.569	95,38%
4680	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum (PKN STAN)	45.870.170.000	43.416.982.860	94,65%
4681	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	683.116.000	605.693.252	88,67%
4682	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN)	841.809.000	821.858.050	97,63%
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM	217.647.938.000	210.897.827.501	96,90%
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN)	53.250.310.000	52.390.337.571	98,39%

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
4685	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	82.162.000	64.138.100	78,06%
4686	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal (PKN STAN)	88.205.000	75.753.461	85,88%
4687	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	341.719.000	329.632.127	96,46%
	Total	**436.749.612.000**	**421.089.198.491**	**96,41%**

Dari tabel terlihat bahwa pagu anggaran terbesar adalah pada kegiatan "Pengelolaan Organisai dan SDM (4864)". Anggaran ini sebagian besar digunakan untuk KRO Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan dengan RO terbesar adalah karyasiswa dan pembelajaran klasikal.

2. Permasalahan/Kendala yang Dihadapi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam merealisasikan anggaran BPPK selama periode Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

1. Pada satker hanya terdapat pagu uang makan dan uang lembur, sehingga pada saat terjadi mutasi, cuti panjang, hari libur nasional serta penugasan yang membuat pegawai tidak berhak mendapat uang makan akan sangat berpengaruh terhadap realisasi belanja pegawai tersebut;
2. Pelaksanaan beberapa kegiatan sangat tergantung dari stakeholder eksternal seperti pelatihan klasikal bergantung pada permintaan unit eselon I pengguna, sehingga kegiatan dan penyerapan anggaran tidak dapat dialokasikan secara merata sesuai dengan target yang ditentukan, begitu juga karyasiswa yang akan sangat bergantung tagihan dari kampus;

3. Terdapat keterlambatan proses pengadaan belanja modal yang menyebabkan nilai deviasi dan penyerapan anggaran tidak optimal;
4. Belanja modal terkait peralatan dan mesin tidak dapat diakselerasi karena harus menunggu penyelesaian renovasi;
5. Terdapat kegiatan yang baru dapat diselesaikan pertanggungjawaban keuangannya mendekati batas waktu yang ditetapkan. Pada saat yang bersamaam, sistem atau aplikasi yang digunakan mengalami kendala.

D. Realisasi Output

a. Realisasi *Output* BPPK Periode Tahun 2023

Realisasi *Output* Kegiatan BPPK periode Tahun 2023 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3. 36 : Realisasi *Output* BPPK Periode Tahun 2023

Kode	Uraian	Target 2023	Satuan	Realisasi 2023	% Capaian
4678	Legislasi dan Litigasi				
4678.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan	1	100,00
4679	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum				
4679.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				
CAN.101	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	175	Unit	207	118,29
4679.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				

Kode	Uraian	Target 2023	Satuan	Realisasi 2023	% Capaian
EBA.103	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	1	Dokumen	2	200,00
EBA.104	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	12	Layanan	12	100,00
EBA.105	Kerumahtanggaan	156	Layanan	156	100,00
EBA.994	Layanan Perkantoran	156	Layanan	156	100,00
4679.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
EBB.101	Kendaraan Bermotor	9	Unit	9	100,00
EBB.102	Peralatan Fasilitas Perkantoran	6.108	Unit	6.650	108,87
EBB.103	Gedung/Bangunan	19.876	m2	23.109	116,27
4679.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				
EBD.101	Dokumen Perbendaharaan Unit	1	Dokumen	3	300,00
EBD.102	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	1	Dokumen	3	300,00
EBD.103	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit	1	Dokumen	4	400,00
EBD.104	Laporan Keuangan Unit	1	Laporan	3	300,00
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan	4	400,00
4680	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum				

Kode	Uraian	Target 2023	Satuan	Realisasi 2023	% Capaian
4680.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				
CAN.101	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	85	Unit	87	102,35
4680.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
EBA.104	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	12	Layanan	12	100,00
EBA.105	Kerumahtanggaan	12	Layanan	12	100,00
EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	12	100,00
4680.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
EBB.102	Peralatan Fasilitas Perkantoran	960	Unit	1.099	114,48
EBB.106	Gedung/Bangunan	17.512	m2	17.512	100,00
4681	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik				
4681.BMB	Komunikasi Publik				
BMB.101	Jurnal BPPK	2	layanan	2	100,00
BMB.102	Corpu TV	1	layanan	2	200,00
BMB.103	Publikasi Media Cetak	1	layanan	6	600,00
BMB.104	Strategi Komunikasi	1	layanan	3	300,00
BMB.105	Pameran/Eksibisi	1	kegiatan	2	200,00
4682	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik				
4682.BMB	Komunikasi Publik				

Kode	Uraian	Target 2023	Satuan	Realisasi 2023	% Capaian
BMB.101	Jurnal Keuangan Negara	5	layanan	20	400,00
BMB.102	Layanan Kepustakaan	12	layanan	12	100,00
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM				
4683.AAG	Peraturan Menteri				
AAG.101	Peraturan/Kebijakan terkait Organisasi	1	PerMen	3	300,00
4683.AAH	Peraturan lainnya				
AAH.101	Peraturan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	1	peraturan	3	300,00
4683.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				
ABA.101	Kajian Akademis BPPK	24	Kajian	38	158,33
4683.DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan				
DCF.101	Program dan Materi pembelajaran	201	Orang, Kegiatan	388	193,03
DCF.102	Pembelajaran Digital	3.232.737	Jamlator	7.404.617	229,05
DCF.103	Pembelajaran Klasikal	928.103	Jamlator	1.130.237	121,78
DCF.104	Sertifikasi Kompetensi	189	Peserta	450	238,10
DCF.105	Alat Uji	3	Alat Uji	3	100,00
DCF.106	Manajemen Pengetahuan	557	Aset Intelektual	809	145,24
DCF.107	Karyasiswa Beasiswa	273	Peserta	315	115,38
DCF.108	Regional Training Center	2	Kegiatan	10	500,00

Kode	Uraian	Target 2023	Satuan	Realisasi 2023	% Capaian
DCF.301	Pembelajaran terkait Penguatan Budaya Kerja Kementerian Keuangan (PU)	285.840	Jamlator	826.650	289,20
DCF.302	Pembelajaran Terintegrasi Pengendalian Intern pada	75.000	Jamlator	367.607	490,14
DCF.303	Training of Trainers Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PU)	213.689	Jamlator	225.811	105,67
DCF.304	Pembelajaran Penindakan Narkotika (PU)	13.230	Jamlator	13.161	99,48
DCF.305	Workshop on Vessel Search for Asia/Pacific Customs Officers (PU)	810	Jamlator	1.888	233,09
DCF.306	Pembelajaran terkait Reformasi Tata Kelola Desentralisasi Fiskal dalam Undang-Undang HKPD (PU)	62.620	Jamlator	97.647	155,94
DCF.307	Pengembangan UMKM Melalui Program Pembelajaran	12.000	Jamlator	25.376	211,47
DCF.308	Pembelajaran Green Financing Policy Maker di Kemenkeu melalui Sertifikasi dan Dialog berbasis Riset (PU)	1.740	Jamlator	2.930	168,39
4683.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				

Kode	Uraian	Target 2023	Satuan	Realisasi 2023	% Capaian
EBA.101	Administrasi Kepegawaian	1.310	Layanan	3.255	248,47
EBA.102	Pengelolaan Jafung	365	Layanan	839	229,86
EBA.103	Penjaminan Mutu	1	Laporan	1	100,00
EBA.104	Akreditasi Program Pelatihan Keuangan Negara	1	Layanan	2	200,00
EBA.105	Learning Organization	1	Laporan	2	200,00
EBA.106	Rekomendasi Perencanaan Pelatihan	1	Layanan	1	100,00
EBA.107	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	1	Layanan	2	200,00
EBA.994	Layanan Perkantoran	156	Layanan	156	100,00
4683.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal				
EBC.101	Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.161	Pegawai	6.619	306,29
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM				
4684.DBA	Pendidikan Tinggi				
DBA.101	Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Keuangan	1.955	Orang	3.634	185,88
DBA.103	Penerimaan Mahasiswa Baru	7.000	Orang	7.188	102,69
DBA.104	Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama	1.400	Orang	1.789	127,79
DBA.105	Program Pengabdian Masyarakat	45	Orang	136	302,22

Kode	Uraian	Target 2023	Satuan	Realisasi 2023	% Capaian
DBA.106	Hasil Penelitian Dosen/Mahasiswa	65	Orang	69	106,15
DBA.301	Program Studi Diploma III dan IV Fast Track (PU)	1	Orang	1	100,00
EBA.102	Penjaminan Mutu	1	Laporan	3	300,00
EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	12	100,00
4684.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal				
EBC.101	Pengembangan Sumber Daya Manusia	267	Orang	293	109,74
4685	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal				
4685.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
EBA.101	Rekomendasi Kepatuhan Internal	1	Layanan	3	300,00
4686	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal				
4686.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
EBA.101	Rekomendasi Kepatuhan Internal	4	Layanan	4	100,00
4687	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi				

Kode	Uraian	Target 2023	Satuan	Realisasi 2023	% Capaian
4687.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan				
FAB.101	Kemenkeu Learning Center (KLC)	1	Sistem Informasi	3	300,00

b. Penjelasan Atas Realisasi *Output* BPPK Periode Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023 terdapat 67 rincian output pada Eselon I BPPK, terdapat 66 rincian output tercapai dengan rata-rata nilai capaian RVRO sebesar 199,00% dan terdapat 1 rincian output Pembelajaran Penindakan Narkotika (PU) yang tidak mencapai target dengan capaian 99,48%;

Pembelajaran Penindakan Narkotika (PU) terealisasi sebesar 13.161 jamlator dari target 13.230 jamlator, ketidaktercapaian target jamlator ini disebabkan karena jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan tidak sesuai target (29 peserta dari target 30 peserta). Untuk output lain dapat terealisasi sesuai atau bahkan melebihi target sampai dengan akhir periode tahun anggaran 2023.

E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Disiplin fiskal melalui terjaganya defisit anggaran selalu menjadi prioritas dari pemerintah Indonesia. Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga defisit anggaran agar tidak melampaui batas di antaranya adalah mengoptimalkan penerimaan negara dan menjaga efisiensi belanja negara. Terkait dengan aspek belanja, pemerintah selalu berkomitmen melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Pusat yang antara lain tercermin dari kebijakan penghematan anggaran serta perbaikan pola penyerapan anggaran, peningkatan efisiensi belanja barang, serta peningkatan kinerja pada belanja modal.

Selaras dengan semangat pemerintah dalam melakukan efisiensi belanja, Kementerian Keuangan telah menetapkan IKU Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi sebagai salah satu

IKU mandatory bagi seluruh UE1 sejak TA 2020. IKU Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi mengukur efisiensi dari simplifikasi proses bisnis yang ditunjang oleh TIK dan/ atau digitalisasi Kementerian Keuangan. Pada TA 2023, dari penghematan yang dihitung oleh Unit Eselon I yang memiliki rencana investasi TIK yang sudah berjalan dan implementasi maksimal semester 1 2023. IKU Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi mengukur efisiensi dari simplifikasi proses bisnis dan/ atau digitalisasi Kementerian Keuangan.

Efisiensi diukur dengan membandingkan efisiensi setelah adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi dengan sebelum adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi keseluruhan input yang dikeluarkan untuk menjalankan proses bisnis baik sebelum adanya implementasi TIK dan sesudah adanya implementasi TIK
2. Identifikasi produktivitas yang dihasilkan sebelum adanya implementasi TIK dan setelah adanya implementasi TIK
3. Unit Eselon I membandingkan setelah adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi dengan sebelum adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi atas aspek input dan aspek produktivitas.
4. Realisasi akhir IKU adalah hasil perbandingan setelah dengan sebelum disandingkan dengan target semester I (30) dan jika tahunan disandingkan dengan target (85) sesuai formula.

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, BPPK juga menggunakan Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi sebagai salah satu sub-IKU dari IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015. Sub-IKU. Subjek pengukuran Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi BPPK di tahun 2023 adalah Aplikasi KLC 2 yaitu pada modul E-Learning PSIAP dan *Computer Assisted Test* (CAT).

Efisiensi belanja sebagai dampak penggunaan KLC2 *Course* dihitung menggunakan pendekatan potensi efisiensi belanja, yaitu membandingkan pelaksanaan pelatihan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) jika tidak dilaksanakan melalui platform KLC2 Course dengan realisasi pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan melalui platform KLC2 *Course*. Efisiensi belanja sebagai dampak penggunaan *Computer Assisted Test* (CAT) dihitung menggunakan pendekatan potensi efisiensi belanja, yaitu membandingkan pelaksanaan ujian jika tidak dilaksanakan dengan CAT (manual) dengan realisasi pelaksanaan CAT pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan

penggunaan KLC2 *Course* dan CAT sejak awal tahun telah menghasilkan efisiensi anggaran yang menyebabkan penganggaran pelatihan menjadi efisien (efisiensi alokasi anggaran

Selain efisiensi belanja, implementasi TIK dalam penyelenggaraan pembelajaran di BPPK juga memberikan efisiensi produktivitas. Efisiensi produktivitas dihitung dengan membandingkan antara jangka waktu pelatihan PSIAP jika diselenggarakan secara klasikal dan secara *e-learning.* Jangka waktu penyelenggaraan PSIAP secara klasikal dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung kapasitas penyelenggaraan pelatihan klasikal dalam bentuk jamlator yang dapat dilaksanakan dalam satu hari. Rencana jamlator pelatihan *e-learning* aplikasi PSIAP kemudian dibagi dengan rata-rata jamlator per hari jika dilaksanakan secara klasikal, sehingga dihasilkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelatihan PSIAP secara klasikal. Sedangkan perhitungan target waktu KLC CAT menggunakan norma waktu penyelenggaraan ujian secara manual dan berbantuan komputer sebagaimana yang terdapat dalam SOP.

Nilai capaian IKU Efisiensi Belanja Birokrasi BPPK Tahun 2023 sebesar 146% yang berasal dari komponen efisiensi belanja sebesar 126,09% dan komponen efisiensi produktivitas sebesar 165,92%. Efisiensi belanja birokrasi BPPK tahun 2023 adalah sebesar Rp36.013.391.000,00 yang terdiri dari:

1. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp33.768.836.000,00
2. Belanja bahan, percetakan, dan konsumsi Rp2.244.555.000,00

Untuk efisiensi produktivitas, apabila *e-learning* Aplikasi SIAP dilaksanakan secara klasikal maka akan memerlukan 125 hari sedangkan dengan menggunakan metode *e-learning* hanya 46 hari. Untuk penyelenggaraan ujian yang semula membutuhkan 3 hari 2 jam 15 menit maka hanya memerlukan waktu 25 jam 15 menit apabila menggunakan KLC CAT.

Selain efisiensi belanja birokrasi, BPPK juga melakukan efisiensi dalam berbagai bentuk lain, diantaranya:

1. Efisiensi pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan proses bisnis. Selain penggunaan aplikasi Satu Kemenkeu, BPPK juga mengembangkan berbagai inovasi berbasis sistem informasi untuk menunjang otomasi, diantaranya:
   a. Aplikasi SIAPNAGIH untuk pengajuan tagihan di lingkungan Sekretariat Badan;
   b. Aplikasi SIVANNA untuk pengolahan data evaluasi pembelajaran level 1 dan 2;

c. KNPK Satu Data yang merupakan dashboard informasi rencana dan realisasi peserta atau jamlator di Pusdiklat KNPK ;
d. Computer Assited Test (CAT) yang mendukung penyelenggaraan tes di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Efisiensi pelaksanaan perjalan dinas
   a. Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan secara selektif dimana pelaksanaan kegiatan sedapat mungkin dilaksanakan secara daring apabila masih memungkinkan.
   b. Pembayaran uang perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan maksimal 80% dari SBM.
   c. Pembayaran tarnsportasi dibayarkan sesuai dengan Daftar Pengeluaran Riil (*at cost*) dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
3. Efisiensi pemberian kudapan dan makan siang rapat.
   a. Pemberlakuan aturan terkait pemberian makan siang saat rapat hanya jika mengundang peserta rapat dari unit eselon eselon I lain dan pemberian kudapan hanya jika mengundang peserta rapat dari unit eselon II lain.
   b. Pemberian makan siang dan kudapan juga hanya diberikan untuk rapat yang dilaksanakan secara daring.
4. Efisiensi pemberian honorarium dalam rangka pelatihan
   a. Honorarium penyusunan bahan ajar tidak dibayarkan untuk penyusun bahan ajar yang merupakan pejabat/pegawai internal BPPK.
   b. Honorarium asisten pengajar hanya dapat dibayarkan untuk mata pelajaran yang terdapat materi praktik
   c. Honorarium pengajar dalam bentuk team teaching yang dilakukan oleh pakar/praktisi hanya dibayarkan sebesar maksimal 80% dari harga satuan biaya honorarium.
   d. Honorarium teknis penunjang kegiatan pelatihan dibayarkan secara selektif misalnya hanya dapat dibayarkan apabila pelaksana pekerjaan merupakan tenaga teknis dari luar unit kerja penyelenggara pelatihan.
5. Efisiensi pemberian honorium dan jasa profesi non pelatihan
   a. Pembayaran honorarium narasumber hanya dapat diberikan kepada narasumber yang berasal dari luar Kementerian Keuangan.

F. Kinerja Lain-Lain

a. Inisiatif Strategis (IS)

Pada tahun 2023 BPPK memiliki satu buah IS, yaitu:

Pelaksanaan Penjaminan mutu pembelajaran melalui akreditasi pelatihan teknis di bidang Keuangan Negara bagi KLID

IS ini memiliki periode dari Januari s.d. Desember 2023. Adapun target output yang diharapkan adalah program pelatihan teknis di bidang keuangan terakreditasi pada KLID.

IS ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan KLID dalam memperoleh akreditasi untuk melaksanakan program pelatihan teknis di Bidang Keuangan Negara.

Sudah dilakukan akreditasi pada BPSDM Jawa barat dan BPSDM Jawa Timur sehingga status penyelesaian Inisiatif Strategis telah selesai.

Hal-hal berikut merupakan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

1. ToT bagi WI/Pengajar pada Lembaga Penyelenggaran Program Pelatihan Teknis di Bidang Keuangan Negara
2. Asistensi teknis penyiapan akreditas program bagi Lembaga penyelenggara program pelatihan di bidang keuangan negara
3. Pembinaan pada Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi
4. Pemantauan dan Evaluasi pada Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi

b. Implementasi Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Arah kebijakan dan strategi yang diterapkan di Kementerian Keuangan adalah penguatan

pemahaman dan komitmen stakeholder baik internal maupun eksternal, peningkatan kebijakan yang responsif gender, dan peningkatan kualitas layanan responsif gender.

BPPK berkomitmen dengan terus berupaya meningkatkan kebijakan yang responsif gender agar dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan yang responsif gender. Hal tersebut tercermin dari tersedianya sarana dan prasarana yang responsif gender, kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sinergi dan kolaborasi dengan satuan kerja lainnya untuk mendukung inisiatif dalam program Kemenkeu Satu.

Sepanjang tahun 2023, BPPK telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait implementasi Pengarusutamaan Gender di BPPK, antara lain sebagai berikut.

a. Penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender, diantaranya toilet untuk penyandang disabilitas, tempat parkir prioritas, ramp dan lift yang ramah untuk penyandang disabilitas;
b. Penetapan Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-184/PP/2022 tentang Pembentukan Tim Penggerak Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2022. Tim ini dibentuk untuk mendukung implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan Sekretariat BPPK;
c. Penyusunan Pedoman/Panduan PUG dan Maklumat PUG di lingkungan Sekretariat BPPK;
d. Pengolahan data terpilah pegawai BPPK (dasar pengisian aplikasi Sipegiku dan update buku saku PUG BPPK);
e. Pelaksanaan koordinasi dan monitoring pengisian aplikasi Sipegiku BPPK;
f. Sesuai dengan SE-8/2023 tentang Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Kementerian Keuangan menyatakan bahwa khusus RO yang mendukung pengarusutamaan gender dilakukan penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) serta melengkapi Kerangka Acuan Kerja/Term Of Reference (TOR) dengan informasi yang memuat Gender Action Budget, Rincian Anggaran Biaya (RAB), rincian penandaan anggaran dan rekap penandaan anggaran (budget tagging). BPPK melakukan tagging pada RO Layanan Perkantoran, RO Karyasiswa Beasiswa, RO Pembelajaran Klasikal dan RO Pembelajaran Digital;

g. Pelaksanaan reviu atas *Gender Budget Statement* (GBS) telah disampaikan ke satker dan unit kerja dengan menyampaikan hasil Catatan Hasil Reviu (CHR) Itjen dan Catatan Hasil Penelitian (CHP) Biro Perencanaan dan Keuangan;
h. Penyelenggaraan kegiatan Loker Spesial dengan tema "Implementasi Budaya Kemenkeu untuk Lintas Generasi", dengan narasumber Suci Lestari (Plt. Kepala Subbagian Pembangunan Budaya, Biro SDM), pada tanggal 17 Maret 2023;
i. Penyelenggaraan kegiatan Loker dengan tema "Edukasi EKspor untuk UMKM", dengan narasumber Choirul Amin (Pemeriksa Bea dan Cukai, Founder @ekspor.id), pada tanggal 5 Mei 2023;
j. Penyelenggaraan kegiatan Loker dengan tema "*Best Practice* Pembinaan UMKM", dengan narasumber Hasan Ashari (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan), Asqolani (Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN) dan Aniek Juliarini (Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Yogyakarta), pada tanggal 25 Agustus 2023;
k. Penyelenggaraan kegiatan Kemenkeu *Learning Week* dengan judul acara "*Inclusive Learning for Disabilities*", dengan narasumber Christine Hofmann (*Team Lead Skills for Social Inclusion at International Labour Organization*), pada tanggal 5 Oktober 2023;
l. Penyelenggaraan kegiatan *Ideas Chamber* dengan tema "*Women at Work: Opportunities for Career Women*", dengan narasumber Ani Natalia Pinem (Kanwil DJP Jakarta Khusus) dan Prihatiningsih (PT. Pertamina International Shipping) pada tanggal 10 Oktober 2023 di PKN STAN;
m. Penyediaan Area Inspirasi, Pengelolaan Area Parkir Motor Ramah Wanita, dan Pengelolaan Toilet Responsif Gender.

Perincian Implementasi Pengarusutamaan Geder di BPPK sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 37 : Perincian Kegiatan Implementasi PUG di BPPK Tahun 2023

Nama Kegiatan / UIC	Deskripsi singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah Gender yang Relevan
Sosialisasi dan Pendampingan Penguatan Generasi Muda Perempuan PKN STAN-BPPK	Sosialisasi dan motivasi kepada mahasiswi di PKN STAN, pemateri adalah dari eksternal PKN STAN, Nidya Hapsari	20 Oktober 2023	Diikuti oleh sebanyak 300 orang mahasiswi
Program Pelatihan Penguatan Keuangan UMKM dan BUM Desa Perempuan PKN STAN-BPPK	Program untuk memberikan edukasi pelaku badan usaha desa dalam menyusun laporan keuangan yang baik	16 Maret 2023	Diikuti oleh sebanyak 57 orang peserta yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 38 orang perempuan
E Learning PPRG BA 15 Pusdiklat AP BPPK	Program pembelajaran yang diperuntukkan bagi Pegawai Kementerian Keuangan dalam bentuk e- learning yang didesain agar peserta dapat menjabarkan perencanaan dan penganggaran responsif gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E-learning ini diselenggarakan dalam bentuk asynchronous non tatap muka melalui klc2.kemenkeu.go.id sebanyak 15 JP.	Angkatan I (20-26 September 2023) Angkatan II (27 Sept - 4 Okt 2023) Angkatan III (4-10 Oktober 2023) Angkatan IV (11-17 Oktober 2023)	Diikuti sebanyak 2.560 peserta terdiri dari 1.279 Laki-laki dan 1.281 perempuan
E Learning PPRG Kementerian dan Lembaga Pusdiklat AP BPPK	Program pembelajaran dalam bentuk e- learning asynchronous bagi SDM di lingkungan Kementerian/Lembaga yang didesain agar peserta e-learning dapat menguraikan perencanaan dan penganggaran responsif gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E-learning ini diselenggarakan	Angkatan I (6-11 Desember 2023) Angkatan II (13-18 Desember 2023)	Diikuti sebanyak 625 peserta terdiri dari 235 laki laki dan 390 perempuan

Nama Kegiatan / UIC	Deskripsi singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah Gender yang Relevan
	dalam bentuk asynchronous non tatap muka melalui klc2.kemenkeu.go.id sebanyak 12 JP.		
PJJ PPRG BA 15 Pusdiklat AP BPPK	PJJ Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2023. Setelah mengikuti program pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menerapkan pengarusutamaan gender di unit kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi sasaran strategis tersedianya SDM di lingkungan Kementerian Keuangan yang dapat menerapkan pengarusutamaan gender sesuai ketentuan yang berlaku.	24 Februari s.d 3 Maret 2023	Diikuti sebanyak 31 peserta terdiri dari 12 Laki-laki dan 19 perempuan
PUG dalam Kurikulum Leadership Training (Diklat Pimpinan)	Terdapat mata pelatihan GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). Pada PKP, GEDSI menjadii mata pelatiihan dasar yang wajib diambil oleh semua peserta, sedangkan di PKA merupakan mata pelatihan pilihan yang tidak wajib diambil, peserta biisa memilih GEDSI maupun mapel pilihan yang lain. Kurikulum mata pelatihan GEDSI mengacu dari LAN, bahan ajarnya juga dari LAN. Jumlah JP: 3 JP di PKP.	PKA Akt 8-10 dan PKP Akt 15-18 (6 Februari s.d. 8 Desember 2023)	Diikuti oleh 200 orang peserta yang terdiri dari 157 orang laki-laki dan 43 orang perempuan

Selain kegiatan-kegiatan yang sudah tertuang dalam rencana kerja TIM PUG, terdapat pula kegiatan-kegiatan unggulan diluar Rencana Kerja Tim PUG sebagai berikut.

Tabel 3. 38 : Kegiatan Tim PUG Tahun 2023 diluar Rencana Kerja

Kegiatan	Deskripsi singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah Gender yang Relevan
Sosialisasi PUG, "Gender Mainstreaming: Bukan Hanya Tentang Perempuan"	Sosialisasi internal di PKN STAN untuk memberikan pemahaman yang baik tentang PUG, narasumber dari Kepala Unit di PKN STAN, Aktiva Primananda Hadiarta	1 Desember 2023	Diikuti oleh sebanyak 67 peserta yang terdiri dari 41 orang pegawai laki-laki dan 26 orang pegawai perempuan
Penerimaan Mahasiswa Baru SPMB Reguler PKN STAN	Penerimaan mahasiswa/i reguler DIV tahun 2023, yang terdiri dari penerimaan reguler umum, penerimaan afirmasi (daerah timur), dan pembibitan (Pemda)	1 April s.d. 18 September 2023	Reguler: Total Penerimaan: 958 Laki-laki = 447 Perempuan = 511 Afirmasi: Total Penerimaan: 100 Laki-laki = 40 Perempuan = 32 Pembibitan: Total Penerimaan: 46 Laki-laki = 14 Perempuan = 32
Penerimaan Mahasiswa Baru SPMB Alih Program	Penerimaan mahasiswa/I alih program, yang terdiri dari non afirmasi, afirmasi, dan pembelajaran blended learning	15 Mei s.d. 18 September 2023	Non Afirmasi: Total Penerimaan: 423 Laki-laki = 204 Perempuan = 219 Afirmasi Total Penerimaan: 185 Laki-laki = 94 Perempuan = 91 Blended Learning: Total Penerimaan: 113 Laki-laki= 71 Perempuan = 42

Kegiatan	Deskripsi singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah Gender yang Relevan
Penelitian Dosen/Mahasiswa PKN STAN	Penelitian oleh dosen/mahasiswa PKN STAN sepanjang tahun 2023	Sepanjang tahun 2023	Jumlah Dosen Laki-laki = 112 Perempuan = 31 Penelitian: Laki-laki =103 Perempuan = 31 Publikasi Artikel Laki-laki = 82 Perempuan = 28
Program Pengabdian kepada Masyarakat oleh PKN STAN	Pengabdian kepada masyarakat oleh dosen di PKN STAN dengan program- program yang direncakanan sepanjang tahun 2023	Sepanjang tahun 2023	Dilakukan oleh 114 orang dosen yang terdiri dari 112 dosen laki-laki, dan 32 orang dosen perempuan
Sosialisasi kebijakan PUG saat overview PKP PKA.	Penyampaian informasi dan sosialisasi kebijakan PUG pada pelaksanaan pelatihan klasikal PKP PKA. Dalam kegiatan ini, disampaikan kebijakan-kebijakan yg telah dilaksanakan dan mekanisme pelaksanaannya. Hal ini perlu diketahui oleh peserta pelatihan selaku penerima layanan responsif gender.	PKA Akt 8-10 dan PKP Akt 15-18 (6 Februari s.d. 8 Desember 2023)	Diikuti oleh sebanyak 200 orang peserta yang terdiri dari 157 orang laki-laki dan 43 orang perempuan
Penyediaan fasilitas ramah PUG bagi peserta yang membutuhkan.	Menyediakan fasilitas responsif gender berupa: penyediaan kamar lantai 1 bagi peserta dengan isu kesehatan yang tidak memungkinkan ybs naik tangga, menyediakan menu makanan khusus bagi peserta yg menderita sakit/ritual keagamaan tertentu, menyediakan kamar khusus bagi peserta yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan berada dalam satu kamar yang sama dengan orang lain.	PKA Akt 8-10 dan PKP Akt 15-18 (6 Februari s.d. 8 Desember 2023)	Sejumlah 10 orang dari 200 peserta PKA dan PKP 2023

Kegiatan	Deskripsi singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah Gender yang Relevan
Seminar Kesehatan Reproduksi	Penyampaian informasi pentingnya kesehatan reproduksi, dan pentingnya deteksi dini kanker serviks dan payudara untuk pencegahan dan optimalisasi pengobatan kanker serviks dan payudara	19 Desember 2023	diikuti oleh 102 pegawai perempuan
Deteksi Dini Kanker Serviks dengan HPV DNA	Pelaksanaan deteksi dini kanker serviks dengan HPV DNA bagi pegawai wanita dan anggota dharma wanita	19 Desember 2023	41 peserta perempuan
Kegiatan Kemenkeu Learning Week dengan judul acara "Inclusive Learning for Disabilities"	Menyelenggarakan kegiatan Kemenkeu Learning Week dengan judul acara “Inclusive Learning for Disabilities”, dengan narasumber Christine Hofmann (Team Lead Skills for Social Inclusion at International Labour Organization),	5 Oktober 2023	Diikuti oleh 1.064 peserta
Kegiatan Ideas Chamber dengan tema "Women at Work: Opportunities for Career Women"	Menyelenggarakan kegiatan Ideas Chamber dengan tema “Women at Work:Opportunities for Career Women”, dengan narasumber Ani Natalia Pinem (Kanwil DJP Jakarta Khusus) dan Prihatiningsih (PT. Pertamina International Shipping)	10 Oktober 2023	Diikuti oleh 1.338 Peserta
Kemenkeu Corpu Open Class “Pembiayaan UMKM Berkelanjutan: Mendorong Pertumbuhan melaluiSecurities Crowd Funding Syariah (SCF)”	BDK Makassar mengadakan open class ini sebagai bentuk dukungan kepada UMKM dengan memberikan pelatihan atau pembinaan mengenai perluasan akses pembiayaan. Salah satu alternatif pembiayaan yang ada saat ini adalah Securities Crowdfunding Syariah (SCF)	26 Juni 2023	150 peserta terdiri dari: Pelaku UMKM, Pendamping UMKM, Pegawai Kementerian Keuangan

Kegiatan	Deskripsi singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah Gender yang Relevan
Kemenkeu Corpu Open Class "Implementasi PUG : Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)"	Kegiatan diselenggarakan secara daring di studio Balai Diklat Keuangan Pontianak pada tanggal 13 Apri 2023 dengan narasumber Dr. Syarifah Ema Rahmaniah M.Sc.Ed yang merupakan seorang Dosen Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat dan praktisi Pengarusutamaan Gender, pada kegiatan ini dilakukan knowledge sharing Pengarusutamaan Gender terutama terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kegiatan webinar diikuti oleh ASN dan masyarakat umum secara during melalui Zoom Meetings dan Youtube	13 April 2023	Kegiatan diikuti oleh 247 peserta yang terdiri dari ASN dan masyarakat umum dengan rincian 158 laki-laki dan 89 perempuan.
Kemenkeu Corpu Open Class "Membuat Foto Produk Yang Ciamik Bagi UMKM”	BDK Yogyakarta menyelenggarakan KCOC secara tatap muka pada tanggal 3 Juli 2023 dengan narasumber yang merupakan dosen pada Amikom Yogyakarta. Kegiatan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta yang merupakah para pengusaha UMKM mengenai teknik pengambilan foto produk dalam upaya dapat mengiklankan produk dengan menarik. Peserta yang hadir secara luring berasal dari UMKM berjumlah 26 orang dimana 84% merupakan wanita. Kegiatan ini diselenggarakan untuk	3 Juli 2023	Secara tatap muka (klasikal) yang peserta seluruhnya berasal dari UMKM berjumlah 26 orang, dimana pria 4 orang dan wanita 22 orang

Kegiatan	Deskripsi singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah Gender yang Relevan
	semakin memberdayakan masyarakat UMKM, baik pria maupun wanita.		
Seminar dan Mini Bazar "UMKM Kalimantan Timur Bangkit, Ekonomi Melejit"	BDK Balikpapan bersama dengan Pusdiklat KU dan Sekretariat Bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Timur mengadakan seminar dan juga mini bazar bagi UMKM binaan unit Kementerian Keuangan Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada penggiat UMKM terkait legalitas atau perizinan, pembiayaan, dan pemasaran, serta sebagai ajang untuk mempromosikan produknya.	30 Agustus 2023	Kegiatan seminar diselenggarakan secara hybrid. Peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 576 peserta yang terdiri dari 72 peserta datang secara langsung di BDK Balikpapan, 133 peserta di zoom, dan 371 peserta di youtube. Selain itu, terdapat 13 UMKM Non Makanan dan 7 UMKM Makanan yang turut memeriahkan Mini Bazar.

3. Penghargaan Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023 BPPK menerima berbagai penghargaan baik dari Internal Kementerian keuangan maupun dari lembaga-lembaga lain. Berikut ini adalah penghargaan yang diterima oleh BPPK dari unit di Kementerian Keuangan.

a. Inovasi *Computer Assisted Test* (CAT) Menjadikan Tes lebih Efisien, Aman dan Akuntabel berhasil menjadi finalis pada Kompetisi Inovasi Kemenkeu Tahun 2023.

b. Salah satu unit di BPPK (Balai Diklat Keuangan Pontianak) menerima penghargaan sebagai satker dengan nilai IKPA terbaik di semester II di lingkup Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat.
c. BPPK melalui Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial berhasil meraih peringkat keenam Tim Duta Transformasi Terbaik Tingkat Kementerian keuangan.
d. Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan BUM Desa.
e. Pegawai BPPK atas nama Thomas Irwan Kristanti berhasil mendapatkan Juara I kategori Ambassador Terbaik dalam Lomba Kolaborasi Digital Kementerian Keuangan.

Gambar 3. 2 : Ambassador Kolaborasi Digital Terbaik (individu)

f. BPPK meraih penghargaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Kategori Informatif di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Webinar Keterbukaan Informasi Publik melalui Youtube Kemenkeu RI pada tanggal 3 Agustus 2023.
g. Kegiatan ODOIKU yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Keuangan Umum berhasil memperoleh penghargaan Nagara Dana Abyakta Bidang Pembinaan Mental Kategori Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Pusat Tahun 2023.
h. Dosen PKN STAN, Andy Prasetiawan Hamzah berhasil memperoleh penghargaan Nagara Dana Rakca Tahun 2023.
i. BDK Yogyakarta melalui inovasi Pembelajaran Terintegrasi untuk mendorong UMKM Naik Kelas berhasil memperoleh penghargaan Nagara Dana Abyakta Bidang Inovasi Tahun 2023

j. PKN STAN berhasil memperoleh penghargaan Nagara Dana Abyakta Bidang Inovasi Tahun 2023 atas inovasi pembuatan Panduan Penyusunan Laporan Keuangan badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta

Gambar 3. 3 : Penghargaan PPID Tingkat I Kemenkeu Kategori Informatif Tahun 2023

k. BPPK melalui Balai Diklat Keuangan Manado berhasil meraih Juara II pada Lomba Video Pendek dalam rangka Road to Hakordia 2023 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu.

l. BPPK berhasil meraih juara pertama pada lomba video pendek yang diselenggarakan Kementerian Keuangan dalam rangka perayaan Hari Oeang ke-77.

Pada tahun 2023 BPPK juga berhasil meraih penghargaan dari berbagai unit di luar Kementerian Keuangan baik dengan skala nasional maupun internasional.

a. Top Digital Implementation 2023 #Level Stars 5

BPPK meraih penghargaan *Top Digital Implementation* 2023 #Level Stars 5 pada Ajang Top Digital Awards 2022 yang digelar oleh Majalah It Works. Penghargaan tersebut diberikan atas inovasi BPPK pada Kemenkeu *Learning Center* Generasi Kedua (KLC2). Pemanfaatan KLC 2 ini mampu mendukung kegiatan pembelajaran digital sebagai *knowledge management system* (KMS) dan *learning management system* (LMS) terhadap berbagai pengetahuan tentang keuangan dan kekayaan negara.

b. *Top Leader on Digital Implementation* 2022 pada Ajang Top Digital Awards 2023

Kepala BPPK, Bapak Andin Hadiyanto meraih penghargaan sebagai *Top Leader on Digital Implementation* 2023 pada Ajang Top Digital Awards 2023 yang digelar oleh

Majalah It Works. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmennya dalam mengimplementasikan pembelajaran digital dan manajemen pengetahuan sebagai upaya dalam mewujudkan learning organization di lingkungan Kementerian Keuangan.

Gambar 3. 4 : *Top Digital Implementation* 2023 & *Top Leader on Digital Implementation* 2023

c. *Silver Awards* untuk kategori *Best Corporate University – Business Impact*, GlobalCCU Awards 2023

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berhasil meraih Silver Corporate University Award sebagai Best Corporate University dalam kategori Business Impact yang diberikan oleh Global Council of Corporate Universities dalam acara bergengsi GlobalCCU Awards yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2023 berlokasi di Bangalore, India.

Gambar 3. 5 : *Best Corporate University – Business Impact, GlobalCCU Awards* 2023

d. Pada Upacara Hari Pabean Internasional tanggal 26 Januari 2023, Pusdiklat Bea dan Cukai menerima penghargaan berupa *WCO Certificate of Merit* atas kinerjanya sebagai pusat peningkatan kompetensi dan pembinaan sikap karakter juga kedisiplinan generasi muda pada khususnya dan pegawai DJBC pada umumnya.

Gambar 3. 6 : *WCO Certificate of Merit*

World Customs Organization
Organisation mondiale des douanes

CERTIFICATE OF MERIT

On the occasion of International Customs Day,
the World Customs Organization awards this certificate to
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai,
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

representing

Directorate General of Customs and Excise of the Republic of Indonesia

for rendering exceptional service to the international Customs community

御厨邦雄

Kunio Mikuriya
Secretary General

e. Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat Terbaik III

BPPK mlalui Pusdiklat KM mendapat penghargaan sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat Terbaik III Kategori *Adaptive Learning Strategy* dengan Tema Pengembangan Metode dan Bentuk Pengembangan Kompetensi Non Klasikal dalam acara LAN Awards.

Gambar 3. 7 : Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat Terbaik III Kategori *Adaptive Learning Strategy*

f. Juara Lomba Video Inovatif Jambore Nasional Widyaiswara Tahun 2023

Widyaiswara BPPK atas nama Irawan Purwo Aji berhasil memperoleh juara III pada Lomba Video Inovatif Jambore Nasional Widyaiswara Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia.

g. Inovasi Pengembangan Materi Microlearning Tahun 2023

Pada acara LAN Award 2023, BPPK juga memperoleh dua penghargaan Inovasi Pengembangan Materi Microlearning Tahun 2023, dimana dua pegawai BPPK (M. Anang Aziz dan Rahmat Rusfandi) berhasil menjadi juara satu dan juara tiga pada kategori tersebut.

h. *Best Paper Qualitative pada International Conference* KRA X

Salah satu pegawai Pusdiklat Pajak, Rakhmindyarto berhasil memperoleh penghargaan Best Paper Kualitatif pada *International Conference* KRA X Tahun 2023.

i. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bintang III (terbaik)

BPPK melalui Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial berhasil mendapat akreditasi dari LAN RI untuk kategori akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bintang III (terbaik) dengan nilai 95,20 dan kategori akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS dengan nilai 95,47 (Kategori A).

j. Peringkat I pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan X

Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Bapak Heru Wibowo berhasil memperoleh Peringkat I dalam Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasiona Tingkat II Angkatan X LAN RI Tahun 2023 melalui metode pembelajaran Project Based Learning (PBL).

k. Mitra Strategis Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi

BPPK, melalui Pusdiklat KM memperoleh penghargaan dari KPK sebagai mitra strategis pendidikan dan pelatihan anti korupsi yang diserahkan pada acara TAPAKSIAP Peringatan Hakordia 2023 Yng diselenggarakan di Istora Senayan pada 12 Desember 2023.

l. Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM)

BPPK melalui Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan berhasil mendapatkan Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) dari KemenPAN-RB.

Gambar 3. 8 : Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

m. Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) untuk 5 Unit Kerja BPPK

Pada tahun 2023, BPPK kembali mendapatkan Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dari KemenPAN-RB yaitu untuk 5 Unit Kerja di BPPK, yaitu Pusdiklat Pajak, Politeknik Kuangan Negara STAN, BDK Pontianak, BDK Balikpapan dan BDK Makassar. Dengan perolehan ini maka seluruh satker di BPPK telah memperoleh predikat ZI WBK.

Gambar 3. 9 : Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

5. Inovasi di BPPK selama Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, bermacam inovasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi diimplementasikan di BPPK. Beberapa inovasi yang mulai diimplementasikan di BPPK pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

a. SIVANA (Sitem Informasi Evaluasi Terintegrasi)

SIVANA atau Sistem Informasi Evaluasi Terintegrasi merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan pengolahan data Evaluasi Pembelajaran Level 1 dan Evaluasi Pembelajaran Level 2. Aplikasi ini memfasilitasi pekerjaan di Subbid Evaluasi Pembelajaran dan Sertifikasi yang terkait dengan evaluasi pembelajaran mulai dari tahap perencanaan, sampai dengan output berupa laporan. Beberapa fitur yang tersedia dalam aplikasi ini antara lain:

- Persiapan
- Evaluasi Level 1
- Evaluasi Level 2

b. Latihan Soal dalam Bentuk Multimedia Interaktif pada Seri E-Learning PIPK

Salah satu program yang diselenggarakan dalam rangka Program Unggulan Pengendalian Intern pada Pelaporan Keuangan yaitu 5 seri E-learning sebagai diseminasi pemahaman secara masif bagi pejabat/petugas pengelola keuangan di seluruh Kementerian/Lembaga.

Tahun ini, untuk mendukung program unggulan yang dijalankan, disusun latihan soal berbentuk multimedia interaktif menggunakan Articulate Storyline berupa pilihan ganda, isian singkat, dan mencocokan jawaban. Hal ini agar jenis latihan yang disajikan kepada peserta semakin beragam. Penyajian latihan ini ditampilkan setelah peserta mempelajari materi, untuk persiapan peserta sebelum memasuki sesi kuis pilihan ganda pada KLC.

c. Ken Arok (Kendali dan Audit Rencana Output Kegiatan)

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu saat ini di Pusdiklat Bea dan Cukai, hampir semua proses yaitu:

1. proses monitoring pengumpulan data,
2. pemberian penilaian,
3. pengolahan hasil nilai,
4. rekapitulasi kondisi saat audit,
5. hingga proses rekapitulasi permasalahan yang dihadapi

hanya dapat diketahui secara offline oleh PIC auditor sendiri karena PIC auditor menggunakan tools kertas kerja berupa microsoft excel. (Kertas Kerja bersumber dari Subbag Kepatuhan Internal, Sekretariat BPPK)

Permasalahan utamanya di Pusdiklat Bea dan Cukai, proses seperti ini mengakibatkan laporan tidak dapat diakses setiap saat/update pada saat tiap-tiap proses bisnis berlangsung dan PIC pengumpulan data dari masing-masing bidang tidak dapat ikut andil memonitoring pengumpulan data. Dan beranjak dari hal itu pula, penjaminan mutu selama ini di Pusdiklat Bea dan Cukai hanya dilakukan untuk aspek output berupa dokumen, bukan pengawalan proses bisnis dari awal.

Mengingat dalam pelaksanaan tugas penjaminan mutu melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya (Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran, Bidang Penyelenggaraan Pembelajaran dan Bidang Penjaminan Mutu Pembelajaran dan Sertifikasi), idealnya proses ini dapat menggunakan sebuah collaborative tools sehingga: easy to access, dapat termonitoring sejak awal proses bisnis, tersinkronisasi antar Bidang, dan kejelasan informasi yang tersedia setiap saat yang dapat digunakan sebagai monitoring sekaligus early warning system untuk turut andil dalam pelaksanaan setiap proses bisnis di Pusdiklat Bea dan Cukai.

Ide inovasi tersebut telah digunakan dan diberi nama “Ken Arok (Kendali dan Audit Rencana Output Kegiatan)” yang dapat diakses melalui bit.ly/KEN-AROK

d. WINNER (Sawit Learning Center)

Proses analisis kebutuhan pembelajaran di wilayah kerja BDK Pekanbaru selama ini belum dilaksanakan secara optimal, utamanya dalam kaitannya dengan identifikasi kebutuhan pembelajaran yang memiliki unsur kekhasan wilayah BDK Pekanbaru. Proses AKP yang selama ini berjalan masih berpusat pada AKP yang menjadi tanggung jawab Pusdiklat sehingga potensi tidak terakomodasinya kebutuhan khas wilayah menjadi lebih besar. Selain itu, dengan khasnya permasalahan yang dimiliki oleh maing-masing wilayah, diperlukan kontribusi dan masukan dari seluruh unit Kementerian Keuangan di wilayah tersebut untuk dapat menghasilkan alternatif solusi yang komprehensif sehingga dapat lebih efektif mengatasi permasalahan yang ada.

Inovasi ini dilaksnakan dengan tujuan untuk dapat memberikan ragam solusi pembelajaran yang ddukung oleh manajemen pengetahuan dalam rangka pengembangan kompetensi para praktisi sawit di wilayah kerja BDK Pekanbaru.

e. Pembelajaran Terintegrasi bagi UMKM Naik Kelas

Usaha yang terus berkembang (naik kelas) tentu menjadi dambaan bagi setiap pengusaha, juga UMKM. Dalam upaya mengembangkan usaha, berbagai faktor menjadi kendala bagi UMKM, sehingga mereka perlu bantuan untuk berkembang (naik kelas), antara lain melalui pelatihan .

f. Analisis Hasil Evaluasi Pembelajaran Berbasis Data Kualitatif

Evaluasi pembelajaran (aspek penyelenggaraan dan pengajar) berfungsi sebagai feedback dalam rangka perbaikan layanan Pusdiklat secara berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat kekurangan dalam tools dan proses bisnis yang berlaku yang berpotensi menimbulkan misleading bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. Inovasi dilakukan dalam bentuk analisis data kualitatif saran/masukan peserta dalam formulir evaluasi pembelajaran dengan aplikasi pengolah data kualitatif NVivo dan hasilnya dipaparkan dan didiskusikan dalam forum Dialog Kinerja Organisasi maupun forum penting lainnya. Penerima manfaat dari inovasi diantaranya: internal Pusdiklat Pajak, Sekretariat Badan, Kepala Badan, peserta pembelajaran, serta Direktorat Jenderal Pajak..

g. *Open Access* Tes Potensi Akademik dan Tes Bahasa Inggris

Open Access tes dilaksanakan setelah melihat peluang, mempertimbangkan beragam permintaan, dan kebutuhan penyelenggaraan tes, serta menindaklanjuti masukan dari pengguna tes yang menginginkan adanya tes prediksi. *Open Access* TPA dan TBI dilaksanakan dengan memanfaatkan fitur "Join dengan kode" dalam Aplikasi CAT yang dikembangkan oleh Bagian TIK, Sekretariat BPPK. Fitur "Join dengan kode" memungkinkan peserta untuk mengikuti tes selama memiliki akun SSO Kemenkeu ataupun akun KLC, tanpa perlu terindeks dalam aplikasi. Selain itu, peserta bebas memilih waktu dan lokasi pengerjaan selama masih dalam periode tes, serta dapat langsung mendapatkan skor hasil tes melalui fitur konversi skor yang disediakan oleh bidang PTPM dan ter-embed pada halaman utama tes. Sampai dengan bulan Desember 2023, *Open Access* TPA dan TBI telah diakses oleh 4.495 pengguna yang berasal dari instansi-instansi baik di lingkungan Kementrian Keuangan maupun Kementerian/Lembaga lainnya. Dengan adanya

inovasi ini, seluruh pegawai Kementerian Keuangan memiliki sarana untuk mengukur potensi akademik dan kecakapan berbahasa Inggris yang dapat diakses secara fleksibel, kapan saja, di mana saja, dan tanpa mengeluarkan biaya.

h. Beasiswa S1 Sistem Informasi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Merupakan beasiswa yang diberikan kepada pegawai lulusan DIII di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menempuh pendidikan secara luring pada program studi S1 Sistem Informasi Binus University. Proses utama seleksi administrasi untuk penerima beasiswa ini berdasarkan pada pengalaman kerja pendaftar beasiswa. Karena itu, terdapat pengakuan/rekognisi atas pengalaman kerja tersebut yang ditransfer ke dalam bentuk SKS. Proses pengakuan tersebut dinamakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Mekanisme RPL tersebut berdampak terhadap berkurangnya masa studi yang akan ditempuh oleh penerima beasiswa ini. Masa studi program ini dapat ditempuh dalam jangka waktu 2,5 tahun, lebih cepat selesai satu tahun dibandingkan dengan program reguler yang dijalankan oleh Binus University (masa studi untuk program reguler S1 Binus minimal dapat diselesaikan dalam jangkat waktu 3,5 tahun). Sebelum bekerja sama dengan BPPK Kemenkeu, Program S1 Binus Reguler tidak memiliki mekanisme penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL. Setelah penjajakan kerja sama yang dilakukan PKM, Binus University bersedia untuk membuka khusus program S1 reguler melalui jalur RPL tersebut. *Program RPL hanya ada pada Binus Online Learning"

i. Mon JF KU dan Plot JF KU

Aplikasi/Dashboard Plot JF KU merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan dalam rangka mendukung tugas pengelolaan dashboard/matriks penugasan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan/atau Tenaga Pengajar di Pusdiklat Keuangan Umum. Aplikasi ini dikembangkan sebagai sarana berkolaborasi antar Subbidang di Pusdiklat Keuangan Umum dalam rangka penugasan Jabatan Fungsional. Hal yang melatar belakangi aplikasi ini adalah bahwa untuk saat ini penugasan jabatan fungsional Widyaiswara dilakukan oleh seluruh Subbidang/Subbagian sesuai tugas dan fungsi masing-masing, tidak seperti sebelumnya yang dihandle atau dilakukan oleh salah satu Subbidang. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan penugasan widyaiswara dapat terjadwal dengan rapi, tidak ada bentrok penugasan, dan dapat menjadi dashboard pimpinan jika ingin melakukan pemantauan penugasan widyaiswara. Secara sederhana, Aplikasi ini menggunakan *google spreadsheet*

sebagai sarana input penugasan. Masing-masing Subbidang terkait mendapatkan satu sheet inputan, untuk menginput penugasan Widyaiswara sesuai tugas dan fungsi Subbidang dimaksud. selain itu, diberikan salah satu sheet kompilasi yang menyajikan data menjadi satu kesatuan.

j. *Piloting Project* Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Pembelajaran Terintegrasi

Dalam rangka pertanggungjawaban belanja desa yang akuntabel, aparatur Desa Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum pernah menyusun Laporan Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi Kegiatan. Aparatur Desa Sungai Raya juga belum memahami secara sepenuhnya proses pembuatan surat perintah pembayaran (SPP) yang harus dilakukan dalam membelanjakan keuangan desa. Selain itu, terkait pertanggungjawaban keuangan/SPJ yang seharusnya dilakukan oleh tiap-tiap Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), juga belum dilakukan sepenuhnya di pemerintahan Desa Sungai Raya. Berdasarkan hal terebut, Balai Diklat Keuangan Pontianak melakukan pendampingan kepada PPKD Desa Sungai Raya dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan desa dengan mengimplementasikan Piloting Project Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Pembelajaran Terintegrasi agar terwujud peningkatan kompetensi PPKD dalam pelaksanaan anggaran desa.

6. *Benchmarking* Tahun 2023

Pada periode tahun 2023, banyak Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya yang menjadikan BPPK sebagai tujuan *benchmarking*. Kegiatan *benchmarking* tersebut dilakukan untuk mendalami berbagai *good practices* yang diterapkan BPPK khususnya dalam pengelolaan *Corporate University*, pengelolaan pembelajaran, manajemen pengetahuan dan sharing tusi widyaiswara. Berikut ini adalah daftar *benchmarking* dari KLDI selama periode 2023.

Tabel 3. 39 : Daftar *Benchmarking* ke BPPK Tahun 2023

No.	Nama KLDI	Waktu Pelaksanaan	Materi
1	Bank BTN	12 Januari 2023	Pengelolaan Pembelajaran
2	BPSDM Provinsi Gorontalo	24 Januari 2023	Pengembangan kompetensi ASN
3	Pusdiklat Aparatur Perdagangan, Kementerian Perdagangan	01 Februari 2023	Learning Management System
4	Kementerian Perhubungan	02 Februari 2023	Tata Kelola Corporate University
5	Kementerian BUMN	10 Februari 2023	Kebijakan dan Pelaksanaan Ujian Dinas & Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
6	LNSW	16 Februari 2023	Tim Podcast Pusdiklat KU
7	PPATK	17 Februari 2023	Penjaminan Mutu
8	BPSDM Sumatra Utara	06 Maret 2023	Tata Kelola Corporate University
9	Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan	03 April, 06 Juli dan 15 November 2023	Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi
10	Pemprov Kalimantan Utara	06 Juni 2023	Tata Kelola Corporate University
11	BMKG	04 Juli 2023	Proses Pengusulan pada Global council of Corporate University
12	PT SMF	1 Agustus 2023	Penyusunan E-Learning dan Pembuatan Konten Pembelajaran
13	DJPPR Kemenkeu	1 Agustus 2023	Pemerolehan Predikat ZI-WBBM

No.	Nama KLDI	Waktu Pelaksanaan	Materi
14	Pusdiklat Pertanian Kementerian Pertanian	9 - 11 Agustus 2023	Evaluasi Penyelenggaraan
15	ATR/BPN	15 Agustus 2023	Mekanisme Desain Pembelajaran
16	Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan Yogyakarta	06 September 2023	Implementasi Learning Organization
17	Pusdiklat BMKG	13 September 2023	
18	BPSDM Jawa Tengah	27 September 2023	Proses Pembelajaran
19	Kementerian Dalam Negeri	19 Oktober 2023	Pengelolaan Dana dan Pembiayaan Program Beasiswa
20	Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara	Oktober 2023	Implementasi WFH/WFO
21	Kementerian PUPR	16 November 2023	Inovasi Change Agent
22	Pusdiklat Kementerian Luar Negeri	29 November 2023	Evaluasi Penyelenggaraan
23	Sekretariat Kabinet RI	08 Desember 2023	KLC
24	Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga dan Nuklir	13 Desember 2023	Tugas dan fungsi Widyaiswara
25	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan	13 Desember 2023	Proses Pembelajaran
26	Pusdiklat Tenaga Administrasi, Kementerian Agama	13 Desember 2023	Penyusunan Kurikulum dan Silabus

G. Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP Tahun 2022

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK)Keungan, Inspektorat Jenderal c.q Inspektorat VI selaku APIP telah melaksanakan

evaluasi atas implementasu SAKIP di BPPK. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai efektivitas implementasi SAKIP Instansi Pemerintah. Sesuai dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BPPK yang tercantum dalam llaporan nomor LAP-25/IJ.7/2023 tanggal 10 Mei 2023, BPPK memperoleh nilai sebesar 90,95 dengan predikat "Sangat Memuaskan" dengan rincian sebagai berikut.

Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30%	25,80
Pengukuran Kinerja	30%	28,50
Pelaporan Kinerja	15%	12,90
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	90.95

Atas evaluasi Inspektorat Jenderal tersebut, BPPK melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi yang disampaikan. Adapun tindak lanjut yang telah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Koordinasi terkait kemungkinan pengukuran Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Gap Kompetensi SDM Kemenkeu melalui Pembelajaran/CGI dan Penyelesaian SKTJ

   Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dari hasil evaluasi AKIP BPPK tahun 2022 adalah terkait Indikator Kinerja pada Renstra BPPK belum sepenuhnya tergambar pada Kontrak Kinerja Kepala BPPK dan Pejabat Eselon II BPPK dalam hal ini Indikator Kinerja Renstra berupa "Persentase Pemenuhan Gap Kompetensi SDM Kemenkeu melalui Pembelajaran/CGI" belum diturunkan menjadi IKU dala KK Kepala BPPK maupun KK Pejabat Eselon II BPPK.

   Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Jenderal tesrebut telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Keselarasan Peta Strategi antara BPPK, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dan Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kemenkeu pada 17 November 2023. Dari hasil koordinasi tersebut didapat kesimpulan bahwa sebelum BPPK dapat menetapkan IKU Persentase Pemenuhan Gap Kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran/CGI terdapat hal-hal yang perlu disiapkan baik oleh BPPK , Sekretariat Jenderal Kemenkeu atau UE I lain. Sebelum BPPK menyediakan pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, BPPK memerlukan data gap kompetensi dan identifikasi TNA dari masing-

masing UE1. Sebelum Indikator dapat diimplementasikan perlu dipersiapkan mekanisme pengukuran dampak pasca pembelajaran yang efektif dan sesuai kebutuhan IKU tersebut dan perlu dilakukan penyusunan desain pembelajaran tahapan awal (*piloting*). Selain itu perlu penyediaan kajian atas analisis gap kompetensi yang akan menjadi dasar dalam penyusunan piloting tersebut.

2. Penyajian informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja.
   Sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal pada evaluasi AKIP BPPK tahun 2022, BPPK melakukan tindak lanjut dengan menyertakan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja BPPK Tahun 2023.
   Untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan , Sekretariat Badan juga telah menyelenggarakan *Focus Group Discussion* Penyusunan Kinerja di Lingkungan BPPK pada 10 Januari 2024 yang diikuti oleh seluruh perwakilan unit di lingkungan BPPK. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Biro Perencanaan Keuangan yang membidangi penyusunan laporan kinerja.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab IV
Penutup

Matahari turut berpengaruh dalam menjaga siklus air. Dalam siklusnya, matahari membuat sumber air menguap, kemudian terbentuknya kondensasi berbentuk awan yang berisi uap air. Awan yang mengandung air tersebut mengalami kejenuhan lalu turun sebagai hujan. Sama halnya seperti Kemenkeu. Kemenkeu turut menjaga &

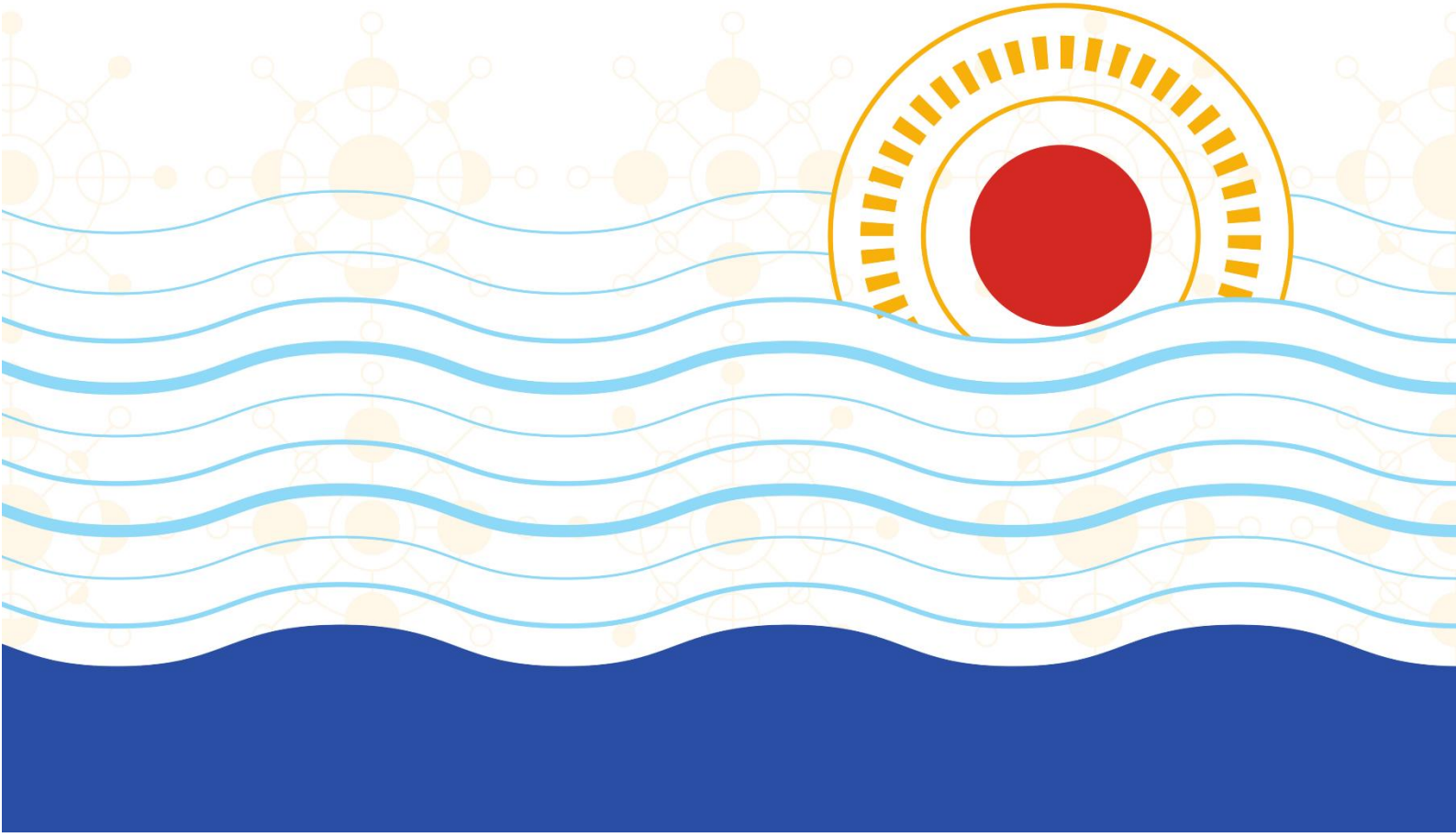

Bab IV
Penutup

Laporan Kinerja BPPK periode 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi dan misi BPPK menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis BPPK Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BPPK memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kementerian Untuk menjalankan perannya tersebut BPPK didukung oleh anggaran yang memadai. Besarnya anggaran tersebut bertujuan untuk menigkatkan kualitas pelayanan dan dukungan BPPK dalam memenuhi kebutuhan unit-unit di Kementerian Keuangan.

Selama periode Tahun 2023 BPPK melakukan realisasi anggaran sebesar Rp421.089.198.491,00 atau 96,41% dari total pagu sebesar Rp 436.749.612.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai satu program, yaitu Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terkandung 67 rincian *output* (RO) dalam 10 kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Legislasi dan Litigasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp3.960.000,00 dan tidak memiliki realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2023.
2. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum memiliki pagu anggaran sebesar Rp117.940.223.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp112.486.975.569,00 atau tercapai sebesar 95,38%.
3. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PKN STAN) memiliki pagu anggaran sebesar Rp45.870.170.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp43.416.982.860,00 atau tercapai sebesar 94,65%.

4. Kegaiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik memiliki pagu anggaran sebesar Rp683.116.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp605.693.252,00 atau tercapai sebesar 88,67%
5. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN) memiliki pagu anggaran sebesar Rp841.809.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp821.858.050,00 atau tercapai sebesar 97,63%.
6. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM memiliki pagu anggaran sebesar Rp217.647.938.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp210.897.827.501,00 atau tercapai sebesar 96,90%.
7. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN) memiliki pagu anggaran sebesar Rp53.250.310.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp52.390.337.571,00 atau tercapai sebesar 98,39%.
8. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal memiliki pagu anggaran sebesar Rp82.162.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp64.138.100,00 atau tercapai sebesar 78,06%.
9. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (PKN STAN) memiliki pagu anggaran sebesar Rp88.205.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp75.753.461,00 atau tercapai sebesar 85,88%.
10. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi memiliki pagu anggaran sebesar Rp341.719.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp329.632.127,00 atau tercapai sebesar 96,46%.

Laporan Kinerja ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun tantangan capaian strategis yang ditunjukkan oleh BPPK selama Tahun 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh IKU dari total 26 IKU pada periode Tahun 2023 telah tercapai dan melampaui targetnya. Adapun kedua puluh enam IKU tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tingkat implementasi learning organization (realisasi sebesar 92,22% dari target sebesar 90%).
2. Indeks integritas organisasi (realisasi sebesar 108,98 dari target 95,55).
3. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya (realisasi sebesar 91,49% dari target 85%)
4. Indeks pembangunan karakter (realisasi sebesar 4,5 dari target 4).

5. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya (realisasi sebesar 94,48% dari target 87%).
6. Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan (realisasi sebesar 116,49% dari target 100,00%).
7. Nilai evaluasi reformasi birokrasi (realisasi sebesar 88,62% dari target 86%).
8. Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara (realisasi sebesar 116,50% dari target 100%).
9. Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu (realisasi sebesar 4 dari target 3).
10. Tingkat implementasi pembelajaran yang inklusif dan kreatif (realisasi sebesar 4,76 dari target 4,00).
11. Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran (realisasi sebesar 5 dari target 4).
12. Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi (realisasi sebesar 89,13% dari target78%).
13. Persentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC (realisasi sebesar 113,64% dari target 100%).
14. Indeks kualitas penelitian (realisasi sebesar 233,8 dari target 181)
15. Persentase kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan standar mutu pendidikan tinggi (realisasi sebesar 98,58% dari target 96,40%).
16. Tingkat efektivitas beasiswa Kemenkeu (realisasi sebesar 96,49 dari target 85)
17. Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung (realisasi sebesar 120% dari target 100%).
18. Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being* (realisasi sebesar 118,21 dari target 100%).
19. Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu (realisasi sebesar 100% dari target 100%).
20. Persentase penyelesaian Program IS RBTK (realisasi sebesar 99,58% dari target 92%).
21. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan (realisasi sebesar 120 dari target 100).
22. Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu (realisasi sebesar 108,67% dari target 100%).
23. Tingkat penggunaan aset bersama (realisasi sebesar 120% dari target 45%).
24. Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015 (realisasi sebesar 114,66 dari target 100).

25. Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK (realisasi sebesar 114,35% dari target 100%).
26. Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (realisasi sebesar 90,34 dari target 82).

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-11/MK/2023
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi

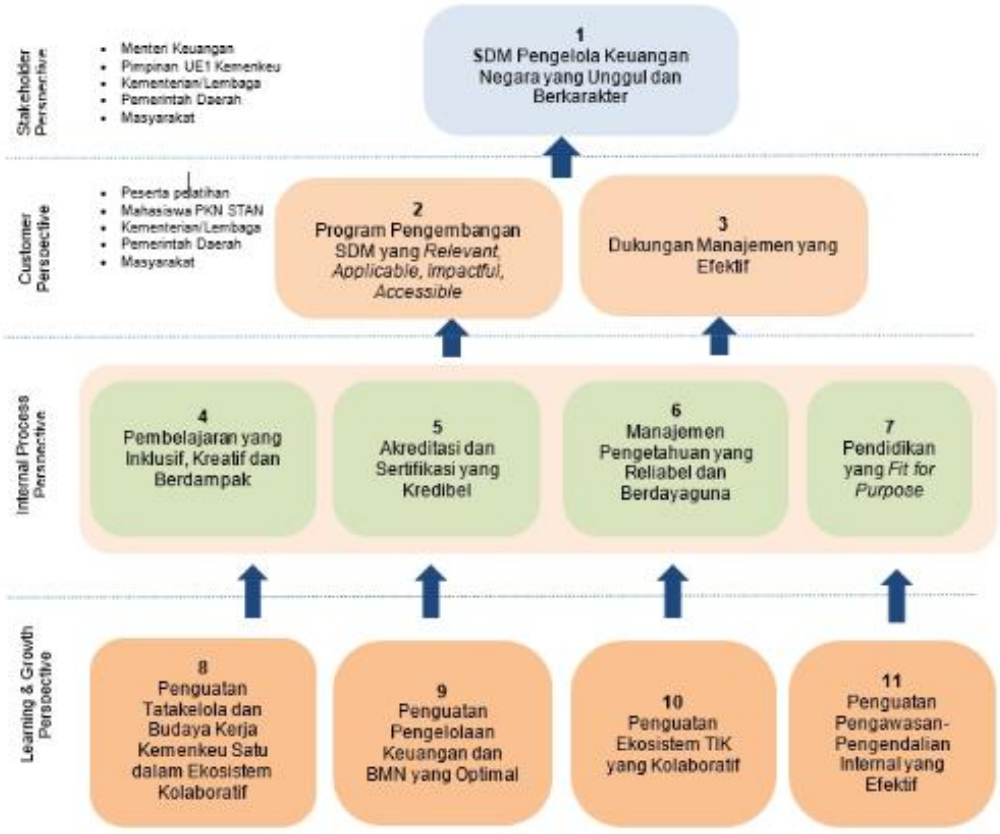

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter	1a-CP	Tingkat implementasi learning organization	90%
		1b-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	85%
		1c-N	Indeks pembangunan karakter	4 (skala 5)
2.	Program Pengembangan SDM yang Relevant, Applicable, Impactful, Accessible	2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	87%
3.	Dukungan Manajemen yang Efektif	3a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%
		3b-CP	Nilai evaluasi reformasi birokrasi	86
		3c-CP	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100%
		3d-CP	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3
4.	Pembelajaran yang Inklusif, Kreatif, dan Berdampak	4a-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang inklusif dan kreatif	4 (skala 5)
		4b-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4 (skala 5)
5.	Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi yang Kredibel	5a-N	Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi	78%
		5a1-N	Persentase kesiapan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara	70%
		5a2-N	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	86%
6.	Manajemen Pengetahuan yang Reliabel dan Berdayaguna	6a-N	Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC	100
7.	Pendidikan yang Fit for Purpose	7a-N	Indeks kualitas penelitian	181
		7b-N	Persentase kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan standar mutu pendidikan tinggi	96,4%
		7c-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kemenkeu	85

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
8.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	8a-CP	Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100%
		8b-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%
		8c-CP	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%
		8d-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%
		8e-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100 (3,55 skala 4)
		8f-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%
9.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	9a-CP	Tingkat penggunaan aset bersama	45%
		9b-N	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		9b1-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	90,4
		9b2-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)
		9b3-N	Indeks efisiensi belanja birokrasi	85
10.	Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif	10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%
		10a1-CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	92%
		10a2-CP	Tingkat penyelesaian data analytics	85%
11.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	11a-CP	Indeks integritas organisasi	97,03

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		11a1-CP Indeks integritas	91,1
		11a2-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4 skala 5)
		11a3-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK	100

Program/Kegiatan		Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp	406.245.235.000,00
1. Legislasi dan litigasi	Rp	45.048.000,00
2. Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum	Rp	160.060.201.000,00
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	1.577.748.000,00
4. Pengelolaan organisasi dan SDM	Rp	243.908.493.000,00
5. Pengelolaan sistem informasi dan teknologi	Rp	499.250.000,00
6. Pengelolaan risiko, pengendalian, dan pengawasan internal	Rp	154.495.000,00

Menteri Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Jakarta, 27 Januari 2023
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Andin Hadiyanto

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1.	SDM pengelola keuangan negara yang unggul dan berkarakter							
1a-CP	Tingkat implementasi learning organization	-	-	-	-	-	90%	90%
1b-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	-	85%	85%	-	85%	85%	85%
1c-N	Indeks pembangunan karakter	-	-	-	-	-	4	4 (skala 5)
2.	Program Pengembangan SDM yang relevant, applicable, impactful, accessibel							
2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	-	87%	87%	-	87%	87%	87%
3.	Dukungan Manajemen yang Efektif							
3a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%
3b-CP	Nilai evaluasi reformasi birokrasi	-	86	86	-	86	-	86
3c-CP	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	-	100%	100%	-	100%	100%	100%
3d-CP	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	-	3	3	-	3	3	3
4.	Pembelajaran yang inklusif, kreatif, dan berdampak							
4a-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang inklusif dan kreatif	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
4b-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pelatihan	-	-	-	-	-	4	4 (skala 5)
5.	Akreditasi dan Sertifikasi kompetensi yang kredibel							
5a-N	Persentase kualitas implementasi program akreditasi dan sertifikasi	-	-	-	-	-	78%	78%
5a1-N	Persentase kesiapan akreditasi program pelatihan bidang keuangan negara	-	-	-	-	-	70%	70%
5a2-N	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	-	-	-	-	-	86%	86%
6.	Manajemen pengetahuan yang reliabel dan berdaya guna							

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-N	Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC	50%	60%	60%	70%	70%	100%	100%
7.	Pendidikan yang fit for purpose							
7a-N	Indeks kualitas penelitian	-	-	-	-	-	181	181
7b-N	Persentase kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan standar mutu Pendidikan tinggi	-	-	-	-	-	96,4%	96,4%
7c-N	Tingkat Efektivitas beasiswa Kemenkeu	-	-	-	-	-	85	85
8.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif							
8a-CP	Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung	30%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
8b-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8c-CP	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	-	-	-	-	-	100%	100%
8d-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
8e-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	-	100	100	-	100	100	100 (3,55 skala 4)
8f-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	-	20%	20%	-	20%	20%	100%
9.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
9a-CP	Tingkat penggunaan aset bersama	-	-	-	-	-	45%	45%
9b-N	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
9b1-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	-	68	68	-	68	90,4	90,4
9b2-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100 (95,5%)
9b3-N	Indeks Efisiensi belanja birokrasi	-	85	85	-	85	85	85
10.	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif							

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10a1-CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	10%	30%	30%	60%	60%	92%	92%
10a2-CP	Tingkat penyelesaian data analytics	23%	46%	46%	69%	69%	85%	85%
11.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
11a-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	97,03	97,03
11a1-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	91,1	91,1
11a2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100	100 (Level 4 skala 5)
11a3-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK	-	-	-	-	-	100%	100%

Jakarta, 27 Januari 2023

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,

Ditandatangani Secara Elektronik

Andin Hadiyanto

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Juta Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Dukungan Program Kementerian Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel/ Tingkat Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara	Pelaksanaan Penjaminan mutu pembelajaran melalui akreditasi pelatihan teknis di bidang Keuangan Negara bagi KLID	Program Pelatihan Teknis di Bidang Keuangan Negara terakreditasi pada KLID.	ToT bagi Widyaiswara/Pengajar pada Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Teknis di Bidang Keuangan Negara	Tingkat kelulusan dari peserta ToT mencapai 70%	Jan-Des 2023	BPPK	105,814
				Asistensi teknis penyiapan Akreditasi Program bagi Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan di Bidang Keuangan Negara.	Kesiapan Akreditasi Program pada 5 Lembaga Pelatihan Pemerintah mencapai 70%	Jan-Des 2023		
				Pembinaan pada Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi	Dukungan pelaksanaan proses bisnis	Jan-Des 2023		
				Pemantauan dan Evaluasi pada Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi	Rekomendasi perbaikan	Jan-Des 2023		

Jakarta, 27 Januari 2023

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik

Andin Hadiyanto

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-01A/PP/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-01/PP/2023 tanggal 31 Januari 2023 , dengan rincian sebagai berikut:

a. Pergeseran Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Internal process perspective						Stakeholder/customer perspective					
5	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif					1	Dukungan manajemen yang efektif				
5a-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	95,55	95,55	dihapus					
5a1-CP	Indeks integritas	-	-	91,1	91,1	1c-CP	Indeks integritas	-	-	91,1	91,1
5a2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	100	100	dihapus					

b. Perubahan Jenis Cascading dan satuan target IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Internal process perspective						Internal process perspective					
5	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif					5	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif				
5b-N	Indeks Efektivitas UKI	-	-	82%	82%	5a-CP	Indeks Efektivitas UKI	-	-	82	82

c. Perubahan Trajectory Target IKU dan Sub-IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Stakeholder/Customer perspective						Stakeholder/Customer Perspective					
1	Dukungan Manajemen yang Efektif					1	Dukungan Manajemen yang Efektif				
1a-CP	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	-	100%	100%	100%	1a-CP	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100%	100%	100%	100%
Learning and growth perspective						Learning and growth perspective					
2	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif					2	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif				
2a-CP	Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung	85%	85%	100%	100%	2a-CP	Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100%	100%	100%	100%
8	Pengelolaan TIK yang andal					8	Pengelolaan TIK yang andal				

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
8a2-CP	Tingkat penyelesaian data analytics	69%	69%	85%	85%	8a2-CP	Tingkat penyelesaian data analytics	69%	69%	92%	92%

Adendum Perjanjian Kinerja ini mulai berlaku sejak 1 Juli tahun 2023.

Jakarta, 18 September 2023

Menyetujui,
Kepala Badan,

Ditandatangani Secara Elektronik
Andin Hadiyanto

Sekretaris Badan,

Ditandatangani Secara Elektronik
Iqbal Islami

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1.	Dukungan Manajemen yang Efektif (Penugasan dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100	Penerima Layanan
		Nilai evaluasi reformasi birokrasi	86	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan Sekretariat Badan	4,25	Penerima Layanan
		Nilai kinerja regulasi	85	Penerima Layanan
5.	Penguatan Pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)	Indeks integritas organisasi	95,5	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas UKI	82%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	97%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Nilai pengawasan kearsipan internal	91	Penguatan Internal atau Anggaran

Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1.	Dukungan Manajemen yang Efektif	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100	Penerima Layanan

Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
	(Penugasan dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)	Nilai evaluasi reformasi birokrasi	86	Penerima Layanan
		Indeks integritas	91,1	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan Sekretariat Badan	4,25	Penerima Layanan
		Nilai kinerja regulasi	85	Penerima Layanan
5.	Penguatan Pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)	Indeks efektivitas UKI	82	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	97%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Nilai pengawasan kearsipan internal	91	Penguatan Internal atau Anggaran

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum						Menjadi					
No	Indikator Kinerja Individu	Target				No	Indikator Kinerja Individu	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1.	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	-	100%	100%	100%	1.	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100%	100%	100%	100%
2.	Nilai evaluasi reformasi birokrasi	-	86	-	86	2.	Nilai evaluasi reformasi birokrasi	-	86	-	86
-	-	-	-	-	-	3.	Indeks integritas	-	-	91,1	91,1
3.	Indeks kepuasan pengguna layanan Sekretariat Badan	-	-	4,25	4,25	4.	Indeks kepuasan pengguna layanan Sekretariat Badan	-	-	4,25	4,25
4.	Nilai kinerja regulasi	60	60	85	85	5.	Nilai kinerja regulasi	60	60	85	85

Sebelum						Menjadi					
No	Indikator Kinerja Individu	Target				No	Indikator Kinerja Individu	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
5.	Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung	85%	85%	100%	100%	6.	Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	-	-	100%	100%	7.	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	-	-	100%	100%
7.	Persentase penyelesaian program IS RBTK	69%	69%	92%	92%	8.	Persentase penyelesaian program IS RBTK	69%	69%	92%	92%
8.	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%	100%	100%	100%	9.	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%	100%	100%	100%
9.	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	-	100	100	100	10.	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	-	100	100	100
10.	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu satu	-	20%	100%	100%	11.	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu satu	-	20%	100%	100%
11.	Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA 015	100	100	100	100	12.	Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA 015	100	100	100	100
12.	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	100%	100%	13.	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	100%	100%
13.	Tingkat keberhasilan migrasi data center dan pemanfaatan collaboration tools	100%	100%	100%	100%	14.	Tingkat keberhasilan migrasi data center dan pemanfaatan collaboration tools	100%	100%	100%	100%
14.	Indeks integritas organisasi	-	-	95,55	95,55	-	-	-	-	-	-
15.	Indeks efektivitas UKI	-	-		82%	15.	Indeks efektivitas UKI	-	-		82
16.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	60%	60%	97%	97%	16.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	60%	60%	97%	97%
17.	Nilai pengawasan kearsipan internal	-	-	91	91	17.	Nilai pengawasan kearsipan internal	-	-	91	91
18.	Tingkat implementasi learning organization	-	-	90%	90%	18.	Tingkat implementasi learning organization	-	-	90%	90%

Sebelum						Menjadi					
No	Indikator Kinerja Individu	Target				No	Indikator Kinerja Individu	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
19.	Tingkat penggunaan aset bersama	-	-	45%	45%	19.	Tingkat penggunaan aset bersama	-	-	45%	45%
20.	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	100%	100%	100%	20.	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	100%	100%	100%

Adendum Sasaran Kinerja Pegawai ini mulai berlaku sejak 1 Juli tahun 2023.

Jakarta, 18 September 2023

Menyetujui,
Kepala Badan,

Ditandatangani Secara Elektronik
Andin Hadiyanto

Sekretaris Badan,

Ditandatangani Secara Elektronik
Iqbal Islami

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023
NOMOR: 11/MK/2023

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan review akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

Jakarta, 27 Januari 2023
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Andin Hadiyanto

«TanggalPenandatanganan»

DAFTAR RISIKO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko		Besaran Risiko	
				Awal Periode	Residual Harapan
1	SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter	1.1	Tingkat pemahaman pegawai terhadap Learning Organization belum memadai	17	11
		1.2	Asistensi knowledge management kurang optimal	11	10
		1.3	Peserta tidak dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran	17	11
		1.4	Program pembangunan karakter kurang berdampak pada pembentukan karakter mahasiswa	14	11
2	Program Pengembangan SDM yang Relevant, Applicable, Impactful, Accessible	2.1	Peserta pembelajaran yang dikirim tidak sesuai dengan persyaratan pada kerangka acuan program	6	6
3	Dukungan Manajemen yang Efektif	3.1	Peserta SPMB tidak memperoleh pelayanan prima	17	11
		3.2	Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum atau tidak ditindaklanjuti	5	5
		3.3	Desain pembelajaran belum sesuai dengan kebutuhan stakeholders	6	6
4	Pembelajaran yang Inklusif, Kreatif, dan Berdampak	4.1	Layanan pembelajaran tidak sesuai dengan ekspektasi peserta	6	6
		4.2	Adanya proses dalam tahapan pembelajaran yang belum sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku di BPPK	11	11
5	Akreditasi dan Sertifikasi yang Kredibel	5.1	Peserta training of trainers tidak memenuhi batas kelulusan	13	11
		5.2	Asistensi yang tidak tepat	13	11
		5.3	Uji kompetensi jabatan fungsional dan sejenisnya tidak berhasil diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan ada perubahan kebijakan	8	8

«TanggalPenandatanganan»

6	Manajemen Pengetahuan yang Reliabel dan Berdayaguna	6.1	Aset intelektual yang terdapat pada platform KLC tidak sesuai kebutuhan	6	6
7	Pendidikan yang Fit for Purpose	7.1	Tidak dapat menghasilkan penelitian yang berdampak bagi urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara	2	2
		7.2	Tidak terdapat perbaikan kesesuaian penyelenggaraan pendidikan di PKN STAN dengan Standar Mutu Perguruan Tinggi	13	11
		7.3	Tidak tercukupinya anggaran karyasiswa beasiswa	15	10
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	8.1	Keterlambatan proses penyelesaian delayering	13	11
		8.2	Tidak terpenuhinya kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk pejabat struktural	10	10
		8.3	Keterlambatan penyelesaian tahapan penyusunan cetak biru organisasi Kemenkeu	6	6
		8.4	Keterlambatan penyelesaian milestone dari target yang ditetapkan	2	2
		8.5	Kurang optimalnya informasi yang disampaikan BPPK dalam mendukung agenda isu proaktif dan mengantisipasi respon terhadap isu negatif atau sensitif di Kemenkeu	1	1
		8.6	Rendahnya tingkat kesadaran pegawai atas budaya Kemenkeu	11	6
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	9.1	Terdapat temuan salah saji dalam pemeriksaan LK BA 015	1	1
		9.2	Nilai smart DJA rendah	17	13
		9.3	Indikator penyerapan anggaran IKPA tidak mencapai nilai optimal	17	13
		9.4	Terdapat gedung dan/atau sarpras di lingkungan BPPK yang belum sesuai dengan standar barang dan standar kebutuhan	1	1
10	Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif	10.1	Kegagalan pada tahap perencanaan pengembangan proyek strategis	6	6
		10.2	Kegagalan sistem IT	10	10
11	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	11.1	Adanya tangkap tangan, pungli, dan tindakan korupsi yang dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum pada pegawai di lingkungan BPPK	1	1

		11.2	Pembangunan ZI-WBK/WBBM pada unit kerja BPPK yang diusulkan belum optimal berdasarkan hasil evaluasi lapangan	11	5

Jakarta, 27 Januari 2023

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik

Andin Hadiyanto

ADENDUM PIAGAM DAN DATA PENDUKUNG
MANAJEMEN RISIKO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023
NOMOR: 11-A1/MK/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum KESATU terhadap Piagam Manajemen Risiko nomor 11/MK/2023 dan dokumen pendukung manajemen risiko tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Sebelum Adendum				Setelah Adendum			
No SO/ RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko		No SO/ RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan			Awal Periode	Residual Harapan
1.	**SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter**			**1.**	**SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Berkarakter**		
-	-	-	-	1.5	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI),	17	13

«TanggalPenandatanganan»

Sebelum Adendum				Setelah Adendum			
No SO/ RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko		No SO/ RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan			Awal Periode	Residual Harapan
					Inspektorat Jenderal, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum		
8	**Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif**			**8**	**Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif**		
8.5	Kurang optimalnya informasi yang disampaikan BPPK dalam mendukung agenda isu proaktif dan mengantisipasi respon terhadap isu negatif atau sensitif di Kemenkeu	1	1	8.5	Kurang optimalnya informasi yang disampaikan BPPK dalam mendukung agenda isu proaktif dan mengantisipasi respon terhadap isu negatif atau sensitif di Kemenkeu	2	2
8.6	Rendahnya tingkat kesadaran pegawai atas budaya Kemenkeu	11	6	8.6	Dihapus	-	-
8.7	-	-	-	8.7	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	25	16
9	**Penguatan pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal**			**9**	**Penguatan pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal**		
9.1.	Terdapat temuan salah saji dalam pemeriksaan LK BA 015	1	1	9.1	Terdapat temuan salah saji dalam pemeriksaan LK BA 015	6	6
9.4	Terdapat gedung dan/atau sarpras di lingkungan BPPK yang belum sesuai dengan standar barang dan standar kebutuhan	1	1	9.4	Terdapat gedung dan/atau sarpras di lingkungan BPPK yang belum sesuai dengan standar barang dan standar kebutuhan	5	5

«TanggalPenandatanganan»

Sebelum Adendum				Setelah Adendum			
No SO/ RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko		No SO/ RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan			Awal Periode	Residual Harapan
11	**Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif**			**11**	**Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif**		
11.1	Adanya tangkap tangan, pungli, dan tindakan korupsi yang dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum pada pegawai dilingkungan BPPK	1	1	11.1	-	-	-

Keterangan: Adendum Piagam Manajemen Risiko dan Data Pendukung Manajemen Risiko mulai berlaku sejak 25 Juli 2023

Jakarta, 4 September 2023
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Andin Hadiyanto

«TanggalPenandatanganan»

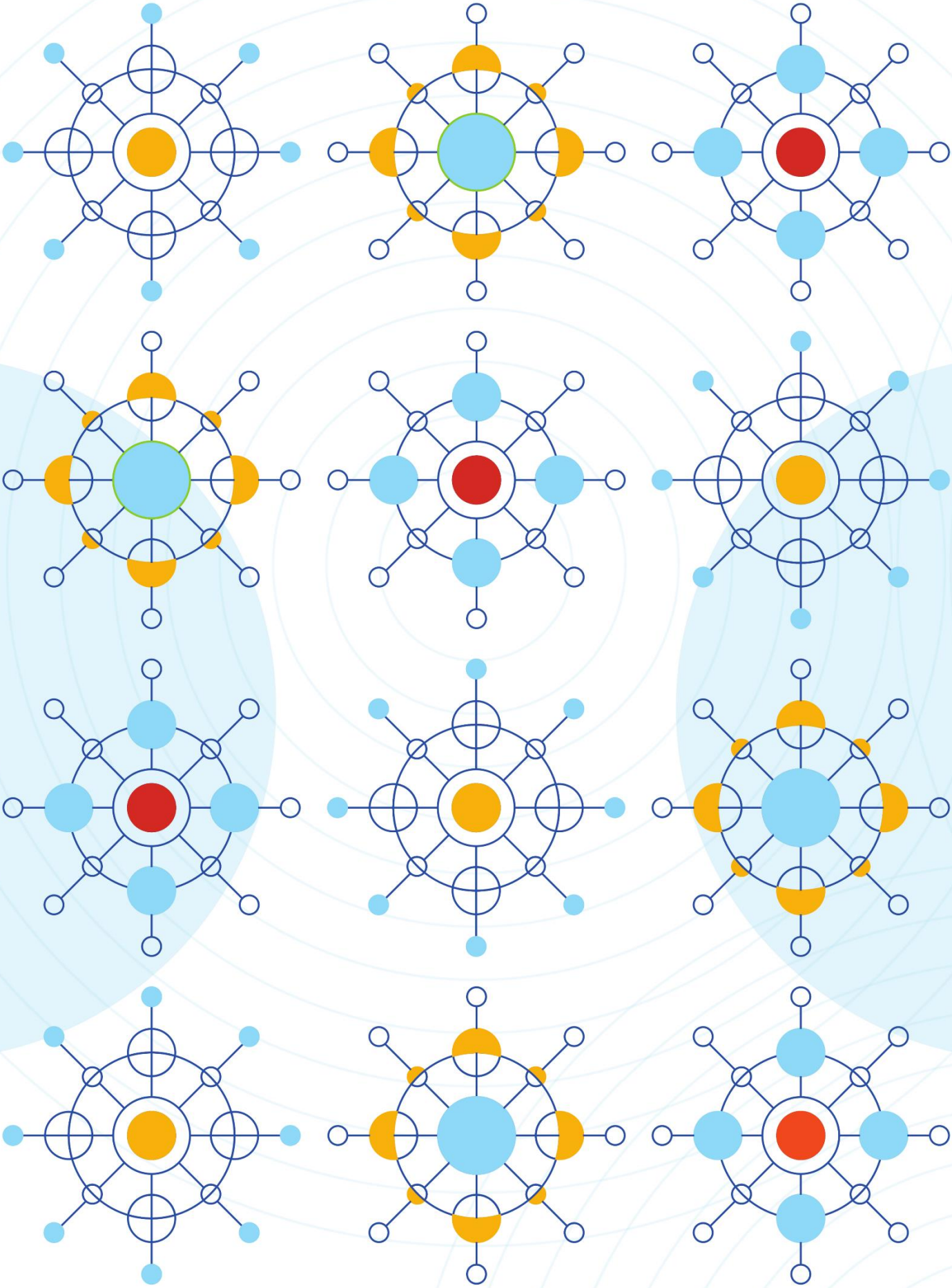

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kemenkeu
Corporate University

www.bppk.kemenkeu.go.id